LAPORAN KLASTER 2:
Kobe dan Sawai Itepo



Oktober 2026

Disusun oleh Tim Delegasi Peneliti Kab. Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Dala Institute dan eLSiL Kie Raha

KONTRIBUTOR

Tim Penyusun
Hansen Sukma Kartika
Taufiq Abdullah
Yudhi F. Syah Kasau
Mahmud Ngolo
Magfirah
M. Jen Hamid
Risal Buabes
Sulti Baharuddin

REVIEWER
Azka Azifa

VISUAL
Astari Parapat

Data yang digunakan pada penelitian ini dikumpulkan oleh gabungan peneliti dari perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Dala Institute, dan eLSiL Kie Raha pada November 2025

Daftar Isi

Pendahuluan.....5

Latar Belakang.....5
Pertanyaan Penelitian.....6
Proses Pemilihan Desa Secara Partisipatif.....9
Data Primer.....12
Wawancara Mendalam (Semi-Terstruktur).....12
Diskusi Kelompok Terarah (FGD).....13
Tinjauan Data Sekunder.....13
Tahap 1: Analisis Dalam Kasus.....
Tahap 2: Perbandingan Lintas Kasus.....
Kerangka Analisis.....14

Gambaran Umum Klaster 2.....15

Kondisi Geografis.....16
Demografis.....17
Struktur Ekonomi.....18
Infrastruktur Layanan Dasar.....19

Temuan Penelitian.....21

RQ 1: Perubahan Sosial-Ekonomi.....22

1.1 Transformasi Ekonomi dan Tantangan Penghidupan Ekonomi Tradisional.....22
1.2. Kenaikan Harga Sebagai Dampak Dari Peningkatan Aktivitas Ekonomi Turunan Dari Kegiatan Pertambangan.....24
1.3. Penjualan Lahan dan Lonjakan Kesejahteraan yang Bersifat Sementara.....25
1.4 Bertambahnya Penduduk dan Perubahan Kohesi Sosial.....27
1.5 Perbedaan Pandangan terhadap dampak tambang dipahami melalui pengalaman sehari-hari.....29
1.6 Pengaduan dilakukan untuk menangani masalah mendesak tapi proses tidak pasti.....31

RQ 2: Perubahan Akses Layanan Dasar.....33

2.1 Air Bersih sebagai Layanan Mendesak dengan Pengalaman yang Beragam.....33
2.2 Pelayanan Kesehatan Meningkat, Namun Terbatas oleh SDM dan Operasional.....34
2.3 Pendidikan Gratis dengan Keterbatasan Infrastruktur dan Tenaga Pendidik.....37
2.4 Perubahan Infrastruktur Dasar yang Bersifat Parsial.....39
2.5 Usulan Berulang dan Realisasi Terbatas dalam Pemenuhan Layanan Dasar.....42

RQ 3: PPM/CSR.....43

3.1 Variasi dari Bentuk Dukungan yang Pernah Diterima Menjadi Tolok Ukur.....43
3.2 Pergeseran Model PPM/CSR Muncul Sebagai Akibat dari Transisi Perusahaan.....45
3.3 Partisipasi dan Akses Informasi dalam PPM dan CSR.....46
3.4 Keberlanjutan Program yang Terputus Antar Waktu 48
3.5 Ketidakmerataan dan Aspirasi Tata Kelola Kolaboratif.....49

RQ 4: Pemahaman dan Kesiapan Pascatambang.....51
4.1 Persepsi Dampak Pascatambang Diamati dari Pemahaman dan Pengalaman.....51
4.2 Bayangan Pascatambang Masyarakat.....52
4.3 Hilangnya Lahan dan Hambatan untuk Kembali pada Ekonomi Lama.....53
4.4 Strategi dan Adaptasi Masyarakat Menghadapi Pascatambang.....54
4.5 Pelibatan Perencanaan Ke Depan untuk Mempersiapkan Pascatambang.....55

Pembahasan.....57

RQ 1.....58
Implikasi Respon yang Diperlukan.....62
RQ 2.....63
Implikasi Respon yang Diperlukan.....69
RQ 3.....70
Implikasi Respon yang Diperlukan.....75
RQ 4.....77
Implikasi Respon yang Diperlukan.....81

Penutup.....82
Daftar Pustaka.....90

Pendahuluan

Latar Belakang

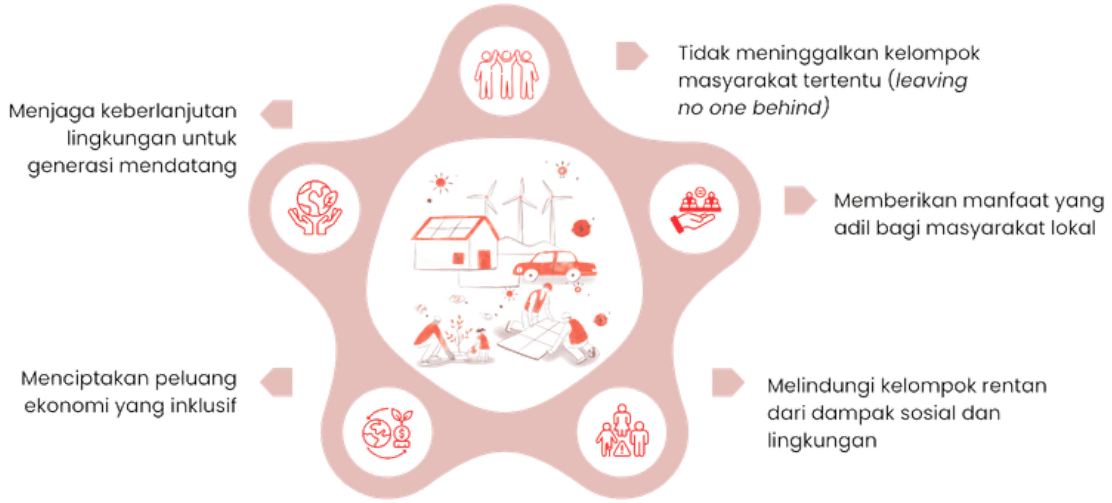
Ekspansi pertambangan nikel dan pembangunan fasilitas pengolahan (smelter) di Provinsi Maluku Utara, khususnya Kabupaten Halmahera Tengah, merupakan bagian dari transformasi ekonomi nasional yang strategis dalam mendukung hilirisasi industri dan transisi energi global. Dengan cadangan nikel yang mencapai 5,3 miliar ton, wilayah ini memiliki posisi penting dalam rantai pasok industri baterai kendaraan listrik dunia. Kebijakan nasional melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2020 telah mendorong percepatan hilirisasi nikel sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas industri nikel belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan bahwa Kabupaten Halmahera Tengah masih mencatatkan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Maluku Utara, dengan sekitar 30 persen penduduk mengalami ketidakcukupan pangan.

Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara manfaat ekonomi makro dari industri nikel dengan dampak sosial-ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di tingkat lokal

Dalam konteks tersebut, pembangunan industri nikel tidak hanya dapat dipahami sebagai isu sektoral pertambangan, tetapi juga sebagai bagian dari tantangan tata kelola pembangunan daerah dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan. Pengalaman di berbagai negara berkembang menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan kerap berkorelasi dengan degradasi lingkungan, persoalan sosial, dan kerentanan kelompok tertentu apabila tidak diiringi dengan kebijakan publik yang responsif, terintegrasi, dan berbasis bukti. Oleh karena itu, pengelolaan dampak industri nikel di Halmahera Tengah menuntut pendekatan kebijakan yang melampaui rutinitas program sektoral dan mendorong pembaruan (inovasi) dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan daerah.

Konsep transisi energi berkeadilan (just energy transition) menjadi kerangka penting dalam menjawab tantangan tersebut. Transisi ini tidak hanya menekankan peralihan sumber energi, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan industri pendukung transisi energi:



Dalam kerangka kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, tantangan-tantangan tersebut membuka ruang bagi lahirnya **inovasi kebijakan, program, kegiatan, maupun pendekatan pelaksanaan** yang lebih adaptif terhadap konteks lokal. Inovasi daerah dalam hal ini dipahami sebagai pembaruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak menimbulkan pembebanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta berpotensi direplikasi oleh perangkat daerah atau wilayah lain.

Inisiatif Penelitian Aksi Partisipatif (Participatory Action Research/PAR) yang telah dilaksanakan bersama pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah menyediakan basis bukti empiris yang kuat untuk mendorong inovasi kebijakan tersebut. Melalui pelibatan aktif aparatur pemerintah daerah dan konsultasi dengan masyarakat—termasuk perempuan dan kelompok yang kurang terwakili—PAR menghasilkan temuan lapangan yang kaya mengenai dampak industri nikel terhadap kehidupan masyarakat serta kebutuhan pembangunan di wilayah terdampak tambang. Berdasarkan temuan tersebut, PAR difokuskan pada pengembangan gagasan kebijakan yang dapat ditindaklanjuti dan diintegrasikan ke dalam program dan kegiatan pemerintah daerah, khususnya pada:



- Perbaikan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat
- Peningkatan efektivitas implementasi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan Corporate Social Responsibility (CSR)
- Perbaikan kualitas dan akses layanan dasar
- Perumusan strategi transisi ekonomi pascatambang yang berperspektif gender dan inklusi sosial.

Pertanyaan Penelitian

Tabel 1. Pertanyaan penelitian berdasarkan kerangka JT

No.	Rumusan masalah	Pertanyaan penelitian berdasarkan kerangka JT
1.	Apa saja bentuk permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat di wilayah terdampak tambang, dan bagaimana perubahan ini terjadi dari sebelum tambang beroperasi hingga saat ini?	**Keadilan distributif:** • Bagaimana kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar tambang dan industri pengolahan? Perubahan apa saja yang terjadi sebelum dan sesudah adanya tambang dan industri pengolahan? Apa manfaat dan masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi? • Bagaimana kebijakan atau rencana daerah untuk meminimalisir dan memitigasi perluasan dampak tambang?
		Keadilan prosedural: • Bagaimana pemahaman dan kekhawatiran masyararat terhadap perluasan tambang yang terjadi? • Apakah masyarakat merasa dilibatkan atau dipersiapkan untuk menghadapi perubahan sosial-ekonomi yang terjadi? Bagaimana mekanisme yang dilakukan? • Apakah tersedia mekanisme pengawasan independen (oleh masyarakat sipil/akademisi/media)?
		Keadilan rekognisi: • Bagaimana dampak manfaat dan masalah dirasakan oleh kelompok rentan (perempuan, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat)? • Bagaimana tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas atau kebijakan untuk mendukung masyarakat rentan ketika terjadi perubahan sosial-ekonomi?

No.	Rumusan masalah	Pertanyaan penelitian berdasarkan kerangka JT
2.	 Bagaimana kondisi terkini dan kesenjangan akses terhadap layanan dasar di wilayah terdampak tambang, serta bagaimana proyeksi kebutuhannya untuk mengatasi kesenjangan tersebut?	 **Keadilan distributif:** • Bagaimana kondisi layanan dasar sebelum 2018 dan saat ini? Bagaimana distribusi dan kesenjangan akses layanan dasar? • - Siapa yang paling diuntungkan dan yang paling dirugikan dalam penyediaan dan akses layanan dasar di daerah tambang? • - Apa saja hambatan utama (regulasi, jarak, kapasitas SDM, biaya, lonjakan penduduk) dalam mengakses layanan dasar?
		 **Keadilan prosedural:** • Apakah ada pembagian peran dalam proses perencanaan antara pemerintah dan pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan dasar di sekitar wilayah tambang? • - Apakah masyarakat pernah dilibatkan dalam diskusi, perencanaan, atau evaluasi terkait pemenuhan layanan dasar di daerah tambang? Apa mekanisme yang tersedia?
		 **Keadilan rekognisi:** • Bagaimana dan sejauh mana kebutuhan dan hak kelompok rentan (perempuan, lansia, disabilitas, masyarakat adat) diakui dan dipenuhi dalam pemenuhan layanan dasar?
		 **Keadilan restoratif:** • Bagaimana upaya pemulihan standar/kualitas hidup atas dampak yang dirasakan masyarakat melalui penyediaan layanan dasar? • Apa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terkait layanan dasar? Bagaimana proyeksi kebutuhan dan kesenjangan ke depan? Apa upaya dan kebijakan untuk memastikan keberlanjutan akses layanan dasar dimana depan?
3	 Sejauh mana efektivitas program PPM dalam memperkuat layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat, serta bagaimana mekanisme evaluasinya selama ini?	 **Keadilan distributif:** • Bagaimana program PPM/CSR memberikan manfaat saat ini dan mengurangi dampak yang ada untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, serta persiapan pascatambang? Bagaimana proses evaluasi terhadap program-programnya?
		 **Keadilan prosedural:** • Bagaimana proses pengembangan program PPM & CSR selama ini dalam pelibatan masyarakat? Siapa saja yang terlibat? Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi PPM?
		 **Keadilan restoratif:** • Apa upaya yang dilakukan dalam program PPM untuk memulihkan kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan?
		 **Keadilan rekognisi:** • Bagaimana upaya penguatan peran kelompok perempuan dan kelompok rentan (disabilitas, lansia, dll) lainnya dalam program pemberdayaan masyarakat dan layanan dasar?
4	 Apa tingkat pemahaman dan kesiapan masyarakat serta pemerintah daerah terhadap fase pasca tambang, termasuk aspirasi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam merumuskan kebijakan pasca tambang yang adil?	 **Keadilan prosedural:** • Sejauh mana masyarakat dan pemerintah daerah memahami bahwa pertambangan adalah penggunaan lahan sementara dan memiliki fase pasca tambang? • Apa pemahaman masyarakat dan pemerintah daerah terkait risiko dan peluang setelah tambang berakhir? Bagaimana peran dalam perencanaan pascatambang? • Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pascatambang? Apa mekanisme yang tersedia? • Bagaimana pemerintah daerah mengatur pembagian peran dengan pemerintah pusat/perusahaan agar distribusi manfaat pasca tambang tidak timpang?

No.	Rumusan masalah	Pertanyaan penelitian berdasarkan kerangka JT
		 **Keadilan distributif:** • Apa peraturan, kebijakan, dan program saat ini yang mendorong transisi pascatambang yang berkeadilan dan berkelanjutan? Bagaimana kebijakan memastikan distribusi manfaat yang adil dan merata?
		 **Keadilan restoratif:** • Apa kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk masa depan wilayah mereka setelah tambang berakhir? Bagaimana kesiapan sosial, ekonomi, dan lingkungan pada fase pascatambang? • Sektor ekonomi apa yang dipandang potensial sebagai pengganti tambang? Apakah ada upaya diversifikasi ekonomi lokal untuk kesiapan pasca tambang? • Apakah tersedia program penjaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok terdampak? • Apakah ada rencana rehabilitasi lingkungan dan pemanfaatan kembali infrastruktur tambang? Bagaimana kebijakan dan regulasi untuk perlindungan dan pemulihan dampak lingkungan khususnya di zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil?
		 **Keadilan rekognisi:** • Bagaimana penguatan peran kelompok rentan (perempuan, pemuda, lansia, disabilitas, masyarakat adat) dalam perencanaan dan kebijakan pasca tambang untuk manfaat jangka panjang?

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus jamak kualitatif untuk menyelidiki dampak sosial ekonomi penambangan dan pengolahan nikel di tiga desa terpilih. Dengan berfokus pada eksplorasi mendalam metode ini memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana aktivitas penambangan bersinggungan dengan akses masyarakat terhadap layanan dasar, efektivitas program

Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat (PPM) dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), kesiapan lokal untuk masa depan pasca-tambang, dan implikasi kebijakan di tingkat regional. Studi kasus kami anggap cocok untuk penyelidikan ini karena memprioritaskan detail kontekstual, perspektif pemangku kepentingan, dan dinamika dunia nyata yang kompleks yang membentuk hasil sosial ekonomi di area yang terdampak penambangan.



Box 1. Metodologi Studi Kasus

Studi kasus adalah metode penelitian empiris yang meneliti fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan lingkungannya tidak didefinisikan dengan jelas (Yin, 2018). Penelitian ini mengandalkan berbagai sumber data—seperti wawancara, observasi, dan dokumen—untuk memberikan gambaran holistik dan terperinci tentang masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, setiap desa menjadi kasus yang berbeda, sehingga memungkinkan analisis komparatif tentang bagaimana penambangan nikel memengaruhi kondisi sosial ekonomi di berbagai lingkungan.

Studi ini mengadopsi desain studi kasus jamak, yang meneliti tiga desa yang sangat terdampak oleh penambangan nikel. Pendekatan kasus jamak memungkinkan:

- Perbandingan lintas kasus untuk mengidentifikasi tema yang berulang atau pengalaman yang berbeda.
- Kedalaman kontekstual dalam menganalisis bagaimana faktor lokal (misalnya, tata kelola, geografi, praktik perusahaan pertambangan) membentuk hasil.

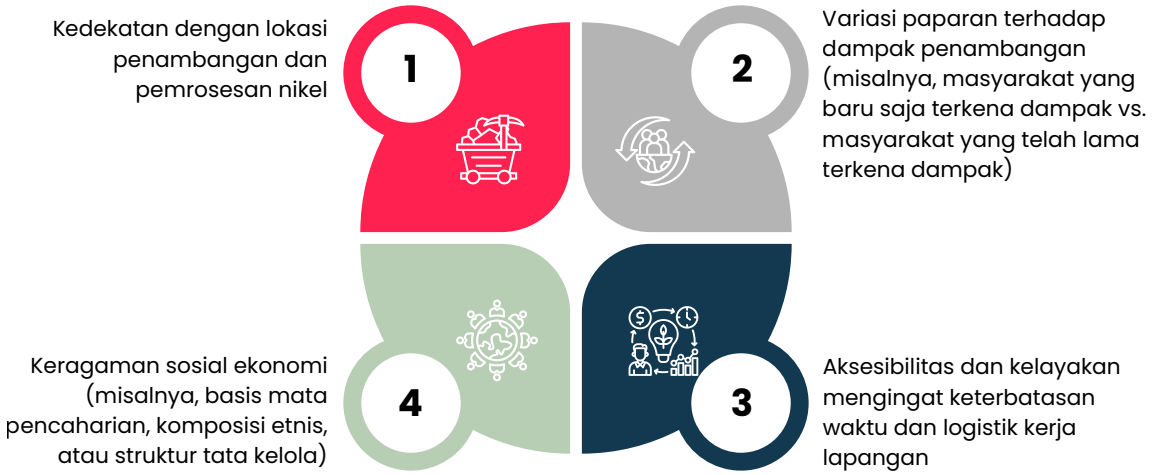
Analisis lintas kasus mengungkap:

- Bagaimana kedekatan geografis dengan pertambangan dan pengolahan nikel membentuk hasil sosial-ekonomi.
- Apakah program PPM dan CSR berkorelasi dengan peningkatan akses layanan atau dianggap sebagai sesuatu yang bersifat simbolis.
- Pandangan yang berbeda tentang masa depan pasca-pertambangan (misalnya, reintegrasi ke dalam ekonomi agraris vs. permintaan untuk pekerjaan industri).

Proses Pemilihan Desa Secara Partisipatif

Pemilihan tiga studi kasus desa dilakukan melalui proses partisipatif bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penelitian tetap berlandaskan konteks, peka terhadap politik, dan relevan dengan prioritas pembangunan daerah.

Proses pemilihan melibatkan konsultasi awal dengan perwakilan pemerintah tingkat kabupate dengan mengidentifikasi desa kandidat berdasarkan kriteria seperti:



Tiga desa dipilih mewakili keberagaman aspek sosial dan ekonomi di Halmahera Tengah. Dengan adanya keberagaman ini, studi kasus dapat mengetahui dampak di konteks-konteks yang berbeda, sebagai contoh desa dengan mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah petani dengan desa dengan mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah pedagang, sehingga didapatkan pemahaman yang lebih meluas dan kaya. Hasil pun dapat lebih digeneralisasi untuk lingkup Halmahera Tengah. Alhasil, studi yang dihasilkan lebih meyakinkan bagi audiens tertentu, karena mencakup berbagai konteks yang berbeda.

Berdasarkan kriteria di atas, Tabel 3 menjelaskan kondisi umum desa terdampak tambang di Halmahera Tengah. Desa yang dijelaskan mengikuti cakupan penerima manfaat PPM berdasarkan Kepmen ESDM No. 1824/2018, dimana:

1. **Ring 1.** Wilayah terdampak langsung oleh operasi pertambangan dan menjadi lokasi fasilitas utama perusahaan. Masyarakat di sini memiliki intensitas hubungan tinggi dengan perusahaan. Cakupan umumnya satu atau beberapa desa yang mengalami dampak sosial dan lingkungan berdasarkan studi baseline dan AMDAL.
2. **Ring 2.** Wilayah terdampak langsung namun dengan intensitas hubungan sedang. Meliputi satu atau beberapa kecamatan yang masih berada dalam kabupaten yang sama dengan Ring 1, dan terdampak sosial-lingkungan sesuai hasil baseline dan AMDAL.
3. **Ring 3.** Wilayah dengan dampak tidak langsung dan frekuensi hubungan rendah. Meliputi satu atau beberapa kabupaten dalam provinsi yang sama (atau lingkup nasional), di mana terdapat kelompok masyarakat yang terdampak secara tidak langsung oleh operasional perusahaan

Untuk menjaga independensi penelitian, keputusan pemilihan akhir menyeimbangkan masukan lokal dengan tujuan analitis studi dan kerangka kerja yang berorientasi pada keadilan. Pertimbangan juga diberikan pada potensi asimetri kekuasaan, untuk menghindari pemberian hak istimewa hanya kepada masyarakat yang lebih terlihat, terhubung, atau patuh pada narasi negara atau perusahaan.

Penjabaran kondisi desa pada bagian ini merupakan gambaran awal dan ditentukan secara kolaboratif dengan interlokutor Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Hal ini penting mengingat analisis menggunakan data Potensi Desa (PODES) 2018 yang kemungkinan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini.

Analisis klaster bertujuan menangkap keberagaman desa berdasarkan empat indeks komposit di bawah ini:

Tabel 2. Indeks komposit dan variabel penyusun

Indeks Komposit	Variabel Penyusun
Indeks Komposit	Variabel Penyusun
Dampak pertambangan	Ring (lokasi relatif desa/kelurahan terhadap kawasan pertambangan)
Sosial-ekonomi (sosek)	Keberadaan produk unggulan/utama desa, Disabilitas, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Industri mikro dan kecil, Sarpras ekonomi, Kejadian tindak kejahatan.
Layanan dasar (ladas)	Jumlah keluarga bukan pengguna listrik (%), Fasilitas buang air besar, Saluran pembuangan limbah cair, Sumber air minum, Sumber air mandi/cuci, Fasilitas pendidikan, Fasilitas kesehatan, Kejadian luar biasa.

Beberapa desa seperti **Gemaf, Lelief Waibulan, dan Lelief Sawai** tidak muncul dengan skor dampak tinggi, padahal secara faktual memiliki keterpaparan yang signifikan. Oleh karena itu, untuk menjaga representativitas analisis, diputuskan hanya menggunakan **variabel ring** sebagai dasar perhitungan indeks dampak.

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa indeks komposit lainnya juga berpotensi menghadapi keterbatasan serupa. Oleh sebab itu, **diskusi verifikasi** dengan interlokutor digunakan untuk memastikan validitas data dan interpretasi.

Dengan mempertimbangkan keberagaman dan akses menuju desa (hanya desa yang dapat diakses yang dipilih), kelompok desa dapat dibagi menjadi tiga klaster:

Tabel 3. Klaster berdasarkan keberagaman dan pilihan desa

Klaster	Karakteristik Desa	Pilihan Desa
1	Dampak tinggi, sosek tinggi, ladas rendah, akses sedang	GEMAF, LELILEF WAIBULAN, LELILEF SAWAI
2	Dampak rendah, sosek rendah, ladas sedang, akses sedang	WERE, NURWEDA, FIDI JAYA, SIDANGA, WEDANA, GOENG, SAGEA, KIYA
3	Dampak sedang, sosek tinggi, ladas tinggi, akses tinggi	KOBE, SAWAI ITEPO, WOEJERANA, WOEKOP, KULO JAYA

Desa yang tidak dimasukkan dalam daftar pemilihan di klaster karena pertimbangan aksesibilitas ke lokasi (semuanya berada di klaster 2): NUSLIKO, FRITU, WALEH, dan UPT WALEH SP3

Adapun diskusi dengan interlokutor Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, memberikan saran perubahan atas susunan desa berdasarkan definisi klaster. Perubahan ini menempatkan Desa Fidi Jaya di Klaster 3 lalu Sawai Itepo dan Kobe di Klaster 2.

Tabel 4. Klaster berdasarkan keberagaman dan pilihan desa yang disepakati bersama

Klaster	Karakteristik Desa	Pilihan Desa
1	Dampak tinggi, sosek tinggi, ladas rendah, akses sedang	GEMAF, LELILEF WAIBULAN, LELILEF SAWAI
2	Dampak rendah, sosek rendah, ladas sedang, akses sedang	WERE, NURWEDA, SIDANGA, WEDANA, GOENG, SAGEA, KIYA, KOBE, SAWAI ITEPO
3	Dampak sedang, sosek tinggi, ladas tinggi, akses tinggi	FIDI JAYA, WOEJERANA, WOEKOP, KULO JAYA

Atas dasar perubahan tersebut, pemilihan desa dilanjutkan dengan voting pemilihan lokasi dan rasionalisasi melalui diskusi bersama dengan interlokutor. Hasil voting akhir menentukan lokasi kegiatan penelitian sebagai berikut:

Klaster 1: Lelilef Waibulan dan Lelilef Sawai
Klaster 2: Kobe dan Sawai Itepo
Klaster 3: Fidi Jaya

Data Primer

Wawancara Mendalam (Semi-Terstruktur)

Pengumpulan data dilakukan selama periode 10 hari di tiga desa terpilih pada November 2025.

Kerja lapangan dilakukan oleh tim yang terdiri dari tiga pengumpul data terlatih, termasuk peneliti utama, bersama dengan 36 interlokutor dalam hal ini perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan Provinsi Maluku Utara

Pendekatan berbasis tim ini memungkinkan pengumpulan data secara simultan atau berurutan di beberapa lokasi, sehingga memungkinkan cakupan yang memadai dalam jangka waktu yang terbatas.

Mengingat kendala logistik dari kunjungan lapangan yang singkat, berbagai upaya dilakukan untuk memprioritaskan kedalaman daripada keluasan dengan menargetkan informan utama dan memfasilitasi diskusi yang mendalam seputar lima dimensi keadilan dari kerangka kerja transisi yang adil.

Wawancara menjadi metode inti untuk mengumpulkan wawasan terperinci dari para pemangku kepentingan utama. Kami melakukan wawancara dengan 41 responden, untuk memastikan representasi gender, usia, status disabilitas, latar belakang mata pencarian, dan pelaku kelembagaan

Tabel di bawah menunjukkan komposisi responden di Klaster 2:

Tabel 5. Distribusi responden berdasarkan mata pencaharian, gender, dan usia

Latar Belakang Mata Pencaharian/Kelembagaan			
Kategori Responden	Jumlah Responden		
	L	P	N
Pekerja Tambang	2	0	2
Industri Pengolahan	1	0	1
Buruh Kasar	2	0	2
Petani	9	2	11
Nelayan	4	0	4
UMKM	5	1	6
Tenaga Pendidik	2	2	4
Tenaga Kesehatan	0	2	2
Tokoh Agama	1	1	2
Tokoh Masyarakat	1	0	1
Ibu Rumah Tangga	0	4	4
N/A	2	0	2
Total	**29**	**12**	**41**

Usia Responden	
Kelompok Usia	Jumlah
Pemuda (<35)	12
Dewasa (36-60)	20
Lansia (>60)	9
Total	**41**

Diskusi Kelompok Terarah (FGD)

Untuk melengkapi wawancara, kami melakukan 3 FGD (masing-masing 8-15 peserta), yang disusun untuk mendorong dialog terbuka tentang berbagai masalah, aspirasi, dan kebutuhan kolektif. FGD yang berhasil kami selenggarakan mencakup :

FGD khusus perempuan (12 orang)

Dampak pertambangan sering kali berdampak secara tidak proporsional pada perempuan (misalnya, hilangnya lahan pertanian, meningkatnya pekerjaan perawatan).



FGD Pemuda (11 Orang)



Kaum muda mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang pekerjaan pertambangan vs. mata pencaharian tradisional.

FGD kelompok campuran (14 orang)

Untuk membahas prioritas dan konflik masyarakat yang lebih luas.



Tinjauan Data Sekunder

Untuk mengontekstualisasikan temuan, kami akan menganalisis lebih lanjut menggunakan tinjauan data sekunder seperti data statistik dari BPS, OPD, dan instansi terkait.

Analisis Data

Analisis data akan mengikuti pendekatan dua fase, yang menggabungkan strategi analisis dalam kasus dan lintas kasus untuk menghasilkan kedalaman kontekstual dan generalisasi tematik. Analisis akan dipandu oleh kerangka transisi yang adil, dengan fokus pada empat dimensi keadilan utama: keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan restoratif, keadilan rekognisi.

Tahap 1: Analisis Dalam Kasus

Masing-masing dari tiga kasus desa akan dianalisis secara independen terlebih dahulu untuk memahami dinamika sosial-ekonomi yang unik dan bagaimana dinamika tersebut dibentuk oleh keberadaan aktivitas penambangan dan pemrosesan nikel. Transkrip wawancara semi-terstruktur dan catatan diskusi kelompok fokus (FGD) akan ditranskripsi dan dikodekan menggunakan kombinasi analisis tematik deduktif dan induktif. Secara deduktif, kerangka pengkodean akan mengacu pada empat dimensi keadilan dari kerangka transisi yang adil. Secara induktif, tema-tema yang muncul yang mencerminkan pengalaman, perhatian, dan realitas sosial-politik setempat juga akan dikodekan untuk menangkap nuansa khusus konteks.

Tahap ini bertujuan untuk membangun narasi terperinci untuk setiap desa, dengan mengkaji:

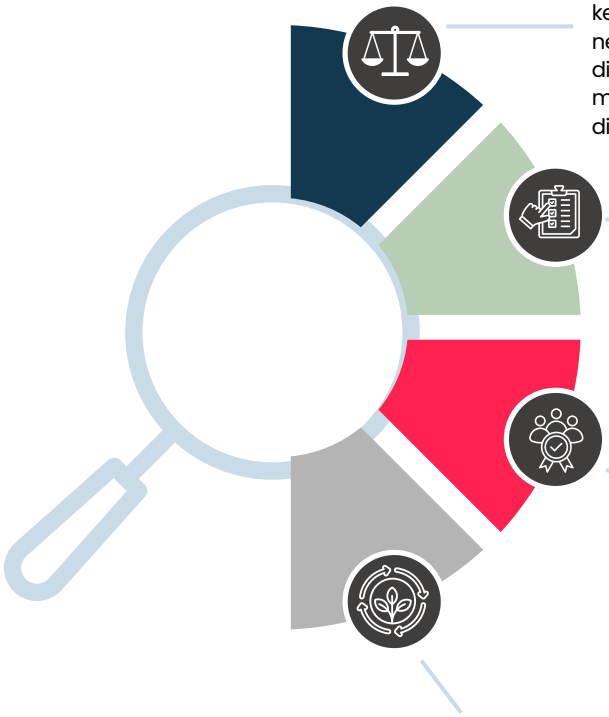
- Distribusi manfaat dan kerugian terkait pertambangan (keadilan distributif);
- Tingkat dan kualitas partisipasi dalam pengambilan keputusan (keadilan prosedural);
- Perspektif terkait pengakuan terhadap hak, identitas budaya, nilai sosial dan kepentingan komunitas lokal (keadilan rekognisi)
- Perspektif lokal tentang ganti rugi dan perbaikan kerusakan sosial-lingkungan (keadilan restoratif);

Tahap 2: Perbandingan Lintas Kasus

Tahap kedua akan melibatkan analisis perbandingan lintas kasus untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, dan perbedaan di ketiga kasus desa. Dengan menggunakan pendekatan berbasis matriks, temuan dari setiap kasus akan dibandingkan secara sistematis di sepanjang lima dimensi keadilan. Perbandingan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana variabel kontekstual—seperti lokasi geografis, sejarah masyarakat, atau struktur sosial—mempengaruhi berbagai pengalaman.

Kerangka Analisis

Kerangka keadilan yang digunakan di dalam studi ini mengadopsi empat dimensi keadilan berikut:



Keadilan Distributif

Mengkaji sejauh mana manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari industri nikel dibagikan secara adil di antara berbagai kelompok masyarakat, serta bagaimana beban dan dampak negatif didistribusikan. Hal ini juga mencakup pertimbangan distribusi manfaat saat ini maupun pascatambang, seperti akses masyarakat terhadap lahan bekas tambang yang telah dipulihkan atau hasil dari program-program rehabilitasi.

Keadilan Prosedural

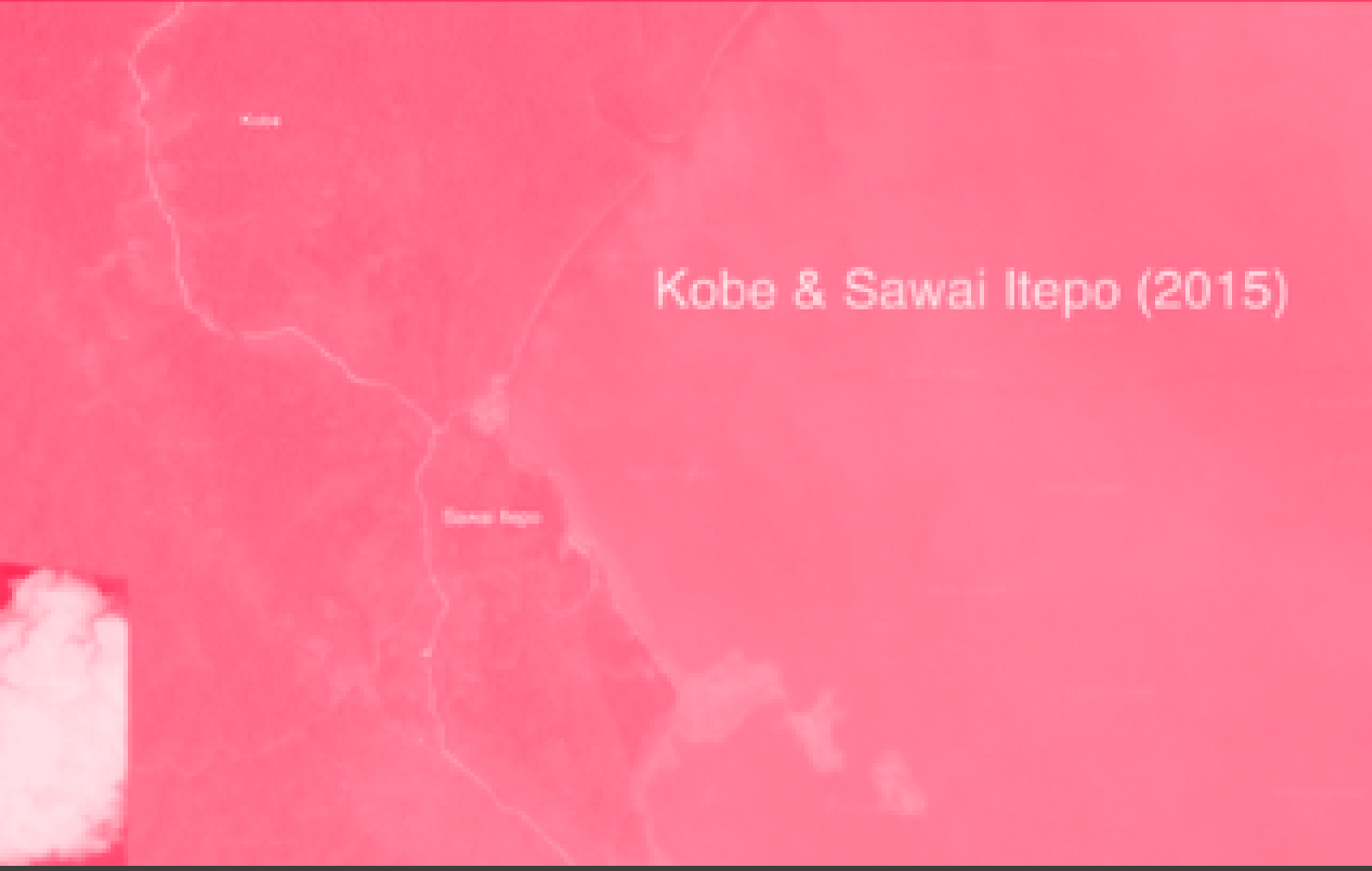
Menilai sejauh mana masyarakat lokal dan kelompok rentan terlibat secara bermakna dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel. Partisipasi atau pelibatan masyarakat dalam diskusi-diskusi terbuka mengenai pengelolaan tambang saat ini termasuk juga scenario pascatambang yang mencakup masa depan ekonomi lokal, rehalibitasi lingkungan dan keberlanjutan sosial.

Keadilan Pengakuan

Mengakui bahwa prinsip keadilan harus berlaku secara luas tanpa diskriminasi, termasuk pengakuan terhadap hak, identitas budaya, nilai sosial, dan kepentingan komunitas lokal, termasuk masyarakat adat, kelompok rentan, dan perempuan dalam konteks pengelolaan tambang dan industri nikel serta persiapan pascatambang.

Keadilan Restoratif

Menilai pentingnya upaya untuk memulihkan kerugian sosial, ekonomi dan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas industri. Selain itu, aspek pasca tambang juga menjadi sangat relevan dengan dimensi ini karena mencakup rehabilitasi lahan bekas tambang, pemulihan atau diversifikasi mata pencaharian masyarakat, program kompensasi dan pemulihan sosial, serta inisiatif pemulihan ekosistem dan layanan dasar yang terdampak akibat kegiatan pertambangan.



Gambaran Umum Klaster 2



Desa Kobe dan Sawai Itepo memiliki karakteristik khas karena posisinya yang berada di dataran tinggi sekaligus dekat dengan pesisir laut. Lokasinya terletak di antara situs tambang, perusahaan industri, dan kantor pemerintahan. Desa Kobe dan Sawai Itepo memiliki jarak sekitar 23,4 Km dari lokasi perusahaan PT IWIP dan sekitar 20,4 km terhadap kantor pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah. Hal ini menempatkan kedua desa ini pada teritori Ring 2 lingkar tambang menurut definisi pada Kepmen ESDM No. 1824/2018.

Kondisi Geografis

Desa Kobe dan Sawai Itepo merupakan **desa yang terpisah namun terletak berdekatan satu sama lain.** Kobe berada sekitar 3 KM lebih dekat dengan pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah dan dikelilingi oleh hutan, selain itu desa ini juga berbatasan dengan taman nasional Aketajawe Lolobata dan berdekatan dengan Weda Resort (resort ekowisata) yang sudah tutup. Pada satu sisi Sawai Itepo lebih dekat dengan pesisir dan perusahaan tambang, lokasinya juga terdiri dari 2 bagian yaitu wilayah perkampungan dan wilayah luar kampung. Luas area desa Kobe adalah 47,09 km² sedangkan Sawai Itepo 63,19 km².

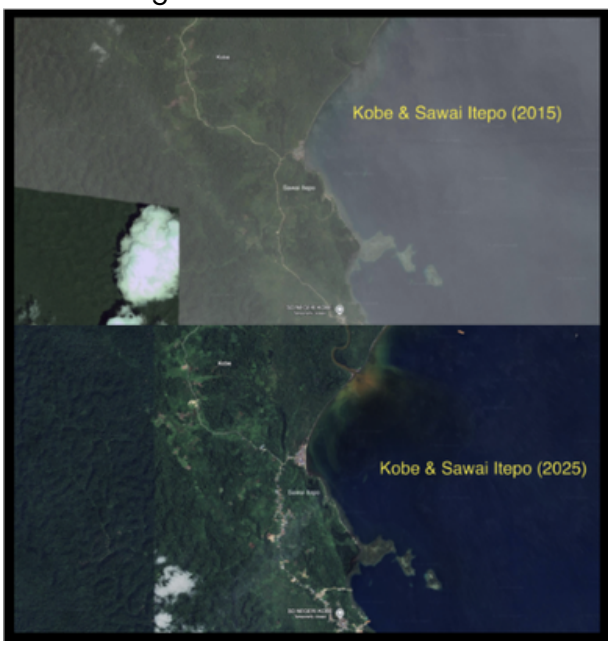
Kobe terletak di dalam wilayah hutan lindung nasional dan dikelilingi oleh kawasan hutan yang sebagian besar telah dibebaskan atau dibeli oleh perusahan. **Kobe dilalui jalur utama menuju kawasan industri dan permukiman pekerja tambang.** Jalan ini menghubungkan Weda dengan Weda Tengah. Akses jalan tersbeut relatif baik dan beraspal meskipun terdapat lubang dibeberapa titik. Lalu lintas padat utamanya pada pagi dan sore hari dikarenakan lalu lintas pekerja, truk pengangkut material bangunan dan logistik industri.



Gambar 1. Jalan penghubung Weda-Weda Tengah yang melintasi desa

Secara topografi, wilayah desa didominasi kebun dan area bekas hutan. Komoditas yang masih bertahan antara lain rica, sagu, dan kelapa, meskipun sebagian besar lahan telah berpindah kepemilikan. Sungai masih menjadi bagian dari sistem ekologis desa, namun debit air dilaporkan semakin berkurang dan kualitasnya menurun saat musim kemarau..

Desa Sawai Itepo terletak di wilayah pesisir dengan karakter geografis yang lebih terbuka ke arah laut dan hutan. Permukiman desa cenderung menjorok ke arah kawasan berhutan, sehingga secara spasial relatif terlindungi dari paparan langsung debu jalan hauling. Namun, kedekatannya dengan laut menjadikan desa ini rentan terhadap perubahan pasang surut dan banjir rob, yang menurut warga semakin sering terjadi sejak aktivitas pertambangan berkembang



Gambar 2. Perubahan lanskap Desa Kobe dan Desa Sawai Itepo 2015-2025 (Sumber: Google Earth)

Kelembagaan dan Relasi Sosial

Desa Kobe dipimpin oleh Kepala Desa yang baru ditunjuk, memiliki 3 Kepala Dusun (Kadus) yang mengelola wilayah yang berbeda. Selain itu, mayoritas pemimpin di desa Kobe merupakan pelayan di gereja. Baik berperan sebagai panatua ataupun diaken.

Kepala Desa Kobe cukup sulit ditemui, selama berkunjung ke Desa Kobe tim peneliti hanya bisa bertemu sebanyak dua kali dalam waktu yang singkat. Meskipun kantor desa dibuka setiap hari senin, tidak menjamin kehadiran kepala desa di kantor tersebut.



Gambar 3. Kantor Desa Kobe

Desa Sawai Itepo juga dipimpin oleh Kepala Desa yang baru namun bukan melalui penunjukkan. Kepala Desa Sawai Itepo merupakan pelaksana tugas (Plt) dari tingkat kecamatan. Sehingga fungsinya sebagai Kepala Desa dalam melakukan penganggaran cukup terbatas. Desa ini juga memiliki 3 Kepala Dusun, tetapi mereka tidak terlalu banyak terlibat di Gereja. Kepala Desa Sawai Itepo sekarang karena bukan berasal dari penunjukkan, kurang memiliki kedekatan dengan masyarakat. Sedikit berbeda dengan kepala desa sebelumnya yang tinggal di luar wilayah kampung Sawai Itepo. Kepala desa sebelumnya sudah menjabat sekitar 9 tahun.

Organisasi lainnya yang berada di dalam kedua desa ini terlihat dalam bentuk semi-informal. Sebagai contoh **lembaga kemasyarakatan desa tidak memegang peranan langsung untuk melakukan peran administratif.** Dalam beberapa wawancara bersama penduduk muda di desa, organisasi karang taruna sudah semakin tidak aktif sejak tambang beroperasi di tahun 2018. Sehingga organisasi kepemudaan hanya beraktivitas saat ada agenda yang berkaitan dengan keagamaan atau adat istiadat.

Secara umum, relasi sosial di Desa Kobe dan Sawai Itepo sama-sama berada dalam situasi transisi akibat perubahan ekonomi dan ekspansi industri di sekitarnya, meskipun dengan dinamika yang berbeda. **Di Desa Kobe, kehidupan sosial masih ditopang oleh tradisi keagamaan dan praktik gotong royong** dalam momen tertentu seperti kedukaan. Namun, partisipasi kolektif cenderung menurun, terutama di kalangan pemuda yang banyak bekerja di tambang atau bermigrasi ke wilayah lain. Relasi sosial juga dipengaruhi oleh dinamika politik desa, di mana muncul polarisasi dan ketegangan pasca pergantian kepala desa, serta kecemburuan sosial terkait distribusi bantuan.

Sementara itu, di **Desa Sawai Itepo, kehidupan sosial masyarakat masih memperlihatkan kohesi budaya yang cukup kuat**, termasuk dalam praktik penyambutan tamu dan ritual adat keagamaan. Masyarakat relatif terbuka dan menunjukkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, relasi sosial di desa ini banyak dipengaruhi oleh persoalan lahan dan transaksi tanah yang semakin intensif.

Demografis

Pada tahun 2017, jumlah penduduk Desa Kobe tercatat sebanyak 500 jiwa, terdiri dari 272 laki-laki dan 228 perempuan, dengan rasio jenis kelamin 119,29 (BPS, 2018). Desa Sawai Itepo memiliki 764 jiwa, terdiri dari 402 laki-laki dan 362 perempuan, dengan rasio jenis kelamin 111,04 (BPS, 2018). **Pada periode ini, kedua desa masih tergolong berpenduduk relatif kecil dengan kepadatan rendah,** yakni 13,42 jiwa/km² untuk Kobe dan 19,92 jiwa/km² untuk Sawai Itepo (BPS, 2018).

Memasuki tahun 2024, terjadi peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Penduduk Desa Kobe meningkat menjadi 926 jiwa (rata-rata pertumbuhan pertahun 9,2%), terdiri dari 536 laki-laki dan 390 perempuan, dengan rasio jenis kelamin 137,44 (BPS, 2025).

Sementara itu, Desa Sawai Itepo meningkat menjadi 1.243 jiwa (rata-rata pertumbuhan pertahun 7,2%), terdiri dari 738 laki-laki dan 505 perempuan, dengan rasio jenis kelamin 146,14 (BPS, 2025). Dalam kurun tujuh tahun, Kobe hampir mengalami pelipatan jumlah penduduk, sedangkan Sawai Itepo bertambah sekitar 479 jiwa. Kenaikan ini juga diikuti dengan **penguatan dominasi penduduk laki-laki** secara signifikan dibandingkan tahun 2017.

Secara spasial, meskipun **jumlah penduduk meningkat, kepadatan kedua desa masih tergolong rendah dibandingkan desa-desa penyangga industri utama di kecamatan**. Namun secara struktural, komposisi penduduk menunjukkan perubahan yang lebih nyata. Peningkatan rasio jenis kelamin yang cukup tajam mengindikasikan arus masuk penduduk laki-laki usia produktif dalam jumlah besar.

Berdasarkan penuturan aparat desa dan warga, pendatang di kedua desa umumnya telah menetap lebih dari satu tahun dan berasal dari berbagai wilayah seperti Flores, Buton, Bugis, Patani, Tobelo, Sulawesi, serta Halmahera Timur. Kehadiran pendatang ini tidak sepenuhnya bersifat sementara, melainkan mulai membentuk struktur sosial yang lebih menetap. Secara keagamaan, **mayoritas penduduk di kedua desa beragama Kristen, yang turut membentuk karakter sosial dan kehidupan komunal desa.**

Secara keseluruhan, periode 2017–2024 menunjukkan bahwa Kobe dan Sawai Itepo mengalami pertumbuhan demografis yang cukup cepat, dengan perubahan komposisi jenis kelamin yang semakin maskulin serta meningkatnya keberagaman asal-usul penduduk. Dinamika ini menandai **pergeseran dari desa berpenduduk kecil dengan struktur relatif stabil menuju desa dengan mobilitas penduduk yang lebih tinggi dan struktur sosial yang semakin beragam.**

Struktur Ekonomi

Pada 2017, struktur ekonomi Desa Kobe dan Sawai Itepo masih didominasi sektor primer dan usaha rumah tangga kecil. Data BPS (2018) menunjukkan bahwa sektor pertanian dan perkebunan merupakan basis ekonomi utama kecamatan, dengan komoditas unggulan seperti kelapa, pala, cengkeh, dan kakao. Luas tanaman kelapa di Kobe tercatat 154 ha dan di Sawai Itepo 171 ha (BPS, 2018). Produksi kelapa pada tahun tersebut mencapai 132 ton di Kobe dan 198 ton di Sawai Itepo (BPS, 2018). Angka ini menunjukkan adanya aktivitas produksi yang cukup berjalan, meskipun tetap dalam skala desa.

Pada periode yang sama, sektor industri pengolahan yang tercatat di kecamatan masih didominasi industri kecil (5–19 tenaga kerja), dengan total 82 unit industri kecil tersebar di tujuh desa (BPS, 2018). Di Kobe dan Sawai Itepo masing-masing tercatat sekitar 10 unit usaha industri rumah tangga (BPS, 2018). Aktivitas ini umumnya berupa usaha kecil dan belum menunjukkan karakter industrialisasi besar di tingkat desa.

Memasuki 2024, meskipun data BPS (2025) tidak secara rinci memisahkan jenis pekerjaan per desa, **observasi lapangan menunjukkan pergeseran struktur ekonomi yang lebih nyata ke arah sektor jasa dan keterkaitan dengan industri.** Pekerjaan yang kini umum ditemukan meliputi pekerja tambang/industri, buruh proyek, pemilik kos, kios/warung, serta usaha pendukung mobilitas tenaga kerja. Sektor perikanan tetap menjadi mata pencaharian penting, terutama di Sawai Itepo, dengan tangkapan utama tuna dan gabus. Namun skala produksi tetap kecil (sekitar 1–2 ton per orang/kelompok kecil), dan belum berkembang menjadi perikanan skala besar.

Berbeda dengan desa penyangga industri utama seperti Lelilef, **Kobe dan Sawai Itepo tidak menunjukkan pertumbuhan fasilitas ekonomi formal yang signifikan.** BPS (2025) mencatat belum tersedia koperasi di Kecamatan Weda Tengah, dan meskipun terdapat dua pasar semi permanen, keduanya tidak berada dalam jangkauan langsung kedua desa tersebut. Hal ini membuat distribusi hasil kebun dan tangkapan ikan tetap bergantung pada jaringan informal dan pasar di wilayah lain.

Jika dibandingkan dengan 2017, **perubahan yang paling menonjol bukan pada munculnya sektor ekonomi baru skala besar, melainkan pada meningkatnya keterhubungan desa dengan ekonomi industri regional.** Pada 2017, struktur ekonomi masih lebih terkonsentrasi pada pertanian dan usaha kecil berbasis lokal. Pada 2024, meskipun sektor primer tetap dominan secara produksi, semakin banyak penduduk yang terserap ke sektor tambang, buruh proyek, dan jasa pendukung industri.

Infrastruktur Dasar

Desa Kobe memiliki 1 gereja yang aktif dan 1 gereja yang sedang dibangun. Desa Sawai Itepo memiliki 2 gereja yang aktif dan 1 gereja yang sedang dibangun.

Dari segi sekolah, Desa Kobe dekat dengan Sekolah Dasar (SD) dan Paud yang tersedia di dalam wilayah perkampungan. Dibandingkan dengan Sawai Itepo desa ini memiliki PAUD yang menggunakan bangunan perusahaan swasta, SD, SMP, dan SMA yang bangunannya menjadi satu dengan bangunan SMP.

Layanan kesehatan di Kobe cukup bergantung dengan kehadiran Puskesmas Pembantu (Pustu) meskipun terletak 1,5 km dari wilayah kampung. Tetapi untuk mengakses layanan kesehatan yang lebih lanjut, warga Desa Kobe harus menuju Rumah Sakit Weda sejauh 20 km. Serupa dengan hal ini, Sawai Itepo juga bergantung dengan Pustu dan cukup terbantu karena lokasinya berada di dalam perkampungan.

Bagi warga kedua desa ini harus mengeluarkan biaya sendiri untuk menempuh perjalanan ke RS Weda karena hanya tersedia satu ambulan yang ditempatkan di Sawai Itepo. Meski tersedia ambulan, fasilitas ini juga belum tersedia supir yang bersiaga dan bahan bakar untuk operasional.

Desa Kobe dan Sawai Itepo dilalui oleh jalan nasional provinsi yang membentang dari kecamatan Weda, Weda Tengah, hingga Weda Utara. Jalan nasional provinsi ini hanya tersedia satu jalur yang masing-masing lebar ruasnya cukup untuk satu mobil. Jalan tersebut dikelilingi hutan dan pada sebagian titik dikelilingi pemukiman sementara alurnya menanjak, berkelok, dan turunan yang cukup curam. Kualitas jalan ini masih relatif baik dengan sebagian kecil jalan memiliki lubang atau kerusakan akibat intensitas kendaraan berat yang melewati.

Jalanan desa di Kobe dan Sawai Itepo sedikit berbeda. Jalan Desa Kobe sebagian masih menggunakan tanah dan juga paving blok. Jalanan ini masih bisa diakses kendaraan mobil maupun motor. Akan tetapi jalanan di Sawai Itepo meskipun sebagian besar menggunakan paving blok, jalanan ini relatif banyak mengalami kerusakan. Sehingga air banyak tergenang ketika hujan dan cukup sulit dilewati oleh kendaraan.

Sumber air di desa Kobe berasal dari mata air yang ditampung. Karena debit air yang kecil dan jumlah tampungan yang terbatas, pemakaian air ini dibatasi. Warga bisa mengakses air ini setiap dua hari sekali terlepas musim hujan atau tidak. Desa Sawai Itepo pada sisi lain mengakses air melalui saluran pipa yang disambungkan ke mata air langsung. Tetapi pada musim hujan, saluran ini terganggu sehingga air tidak bisa keluar.

Tabel 6. Jumlah Infrastruktur Dasar di Kobe (2017-2024)

Sektor	Indikator	2017 (BPS,2018)	2024 (BPS, 2025)
Akomodasi	Hotel/Penginapan	0	5 (kecamatan)
Pendidikan	TK	1	5 (kecamatan)
	SD	2	10 (kecamatan)
	SMP	1	3 (kecamatan)
	SMA/K	0	2 (kecamatan)
Kesehatan	Rumah Sakit	NA	0 (kecamatan)
	Puskesmas	0	9 (kecamatan)
	Apotek	NA	0 (kecamatan)
	Poliklinik/Balai Pengobatan	NA	NA
	Posyandu	1	NA
	Praktik Dokter	0	NA
Keagamaan	Masjid	0	NA
	Surau/Langgar	0	NA
	Gereja Protestan	1	NA
	Gereja Katolik	0	NA

Tabel 7. Jumlah Infrastruktur Dasar di Sawai Itepo (2017-2024)

Sektor	Indikator	2017 (BPS,2018)	2024 (BPS, 2025)
Akomodasi	Hotel/Penginapan	0	5 (kecamatan)
Pendidikan	TK	1	5 (kecamatan)
	SD	0	10 (kecamatan)
	SMP	0	3 (kecamatan)
	SMA/K	0	2 (kecamatan)
Kesehatan	Rumah Sakit	NA	0 (kecamatan)



Temuan Penelitian



RQ 1: Perubahan Sosial-Ekonomi

1.1 Transformasi Ekonomi dan Tantangan Penghidupan Ekonomi Tradisional

Masuknya industri tambang yang tidak jauh dari Desa Kobe dan Desa Sawai Itepo pada 2018 memicu percepatan ekonomi yang terasa nyata di tingkat lokal. Kedatangan tambang membuka peluang baru seperti memperluas permintaan akan hunian, makanan, serta kebutuhan harian melalui kedatangan penduduk dari luar daerah seperti Bugis, Buton, Ternate, dan lainnya (05-18KO2; 05-17KO2). Menurut pengamatan peneliti, sepanjang jalan menuju kampung mulai bermunculan warung makan dan kos-kosan, bahkan dengan menu khas luar seperti coto Makassar dan bakso. Seorang pemilik warung makan di Kobe menyampaikan:

"Setelah ada Perusahaan tambang dan industry IWIP Mulai ada peluang untuk buat usaha seperti usaha warung di sini. Banyak pekerja tambang lewat untuk berangkat atau pulang shift jadi untuk buka warung bisa ramai" (05-18KO2, pemilik warung makan, Laki-Laki, 38 tahun)

Perputaran ekonomi dinilai lebih cepat dibanding sebelumnya. Rumah yang dulu berbahan papan kini banyak yang dibangun permanen dari beton, terutama bagi warga yang menjual lahan atau memiliki anggota keluarga bekerja di perusahaan (05-16SI2; 05-02SI2). Seorang ibu rumah tangga menyebutkan bahwa suaminya yang bekerja di perusahaan membuat mereka lebih mudah mengakses kredit karena memiliki penghasilan tetap (05-16SI2). Kepala sekolah juga mengakui bahwa setelah ada tambang "masyarakat punya penghasilan meningkat, banyak yang buka usaha kontrakan seperti kos-kosan" (05-05KO2).

Namun pertumbuhan ini tidak dirasakan merata. **Perbedaan sosial mulai tampak jelas, terutama berdasarkan usia dan kepemilikan aset.** Kelompok usia produktif lebih mudah terserap sebagai pekerja tambang atau sektor penunjang, sementara kelompok yang lebih tua tetap bergantung pada mata pencaharian lama. Seorang pemilik kios menjelaskan:

"Sangat berbeda, menyangkut dengan kehidupan dari tingkat pemuda maupun yang tua-tua. Dulu berkebun sekarang yang lain kerja di Perusahaan." (05-07KO2, Pemilik Kios, Laki-Laki, 35 tahun).

Sedangkan bagi **warga yang lebih muda (usia di bawah 40-an), peluang kerja mencakup bekerja di sektor domestik, di dalam industri atau penunjang tambang** seperti kios dan buruh. Dalam beberapa kasus, pemuda bahkan meminta surat keterangan lulus sebelum resmi tamat sekolah agar bisa mengikuti rekrutmen security di perusahaan (05-04SI2).

Sebaliknya, lansia dan petani tua mengaku tetap bekerja sebagai penebang pohon atau berkebun karena pilihan pekerjaan terbatas (05-02KO2; 05-11SI2). Hal ini karena kegiatan tradisional seperti menebang pohon yang dilakukan oleh (05-02KO2) lebih banyak dikerjakan oleh penduduk yang lebih tua. Refleksi interlokutor (01-30) juga menyebutkan bahwa perbedaan ini muncul karena keterbatasan pilihan mata pencaharian terutama bagi penduduk yang memiliki usia tidak produktif.

Selain faktor usia, kepemilikan lahan menjadi pembeda utama dalam menikmati peluang ekonomi baru. Misalnya, permintaan terhadap tempat tinggal hanya bisa dipenuhi oleh warga yang memiliki modal besar untuk membuat kos. Bahkan, salah satu pekerja industri (05-12KO2) menyebutkan bahwa pemilik kos lebih banyak dimiliki oleh penduduk dari luar. UMKM lainnya seperti panglong kayu atau warung kelontong juga hadir seperti pernyataan oleh guru muda yang juga mengelola kios sebagai berikut:

"Setelah ada tambang perputaran ekonomi lebih cepat, muncul usaha2 kecil (kios, kos-kosan) untuk memenuhi kebutuhan pendatang" (05-11KO2, guru dan pemilik kios, perempuan, 30 tahun)

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di Klaster 2 bergantung mereka yang memiliki modal awal, jaringan, atau usia produktif.

Pada saat yang sama, **penghidupan tradisional justru mengalami penurunan**. Sebelum tambang beroperasi, masyarakat menggantungkan hidup pada kebun kelapa, pala, coklat, sagu (bahalo), serta perikanan tangkap yang jaraknya relatif dekat dari bibir pantai (05-20SI2; 05-02SI2). Hasil tangkapan ikan melimpah dan bahkan dapat dibarter dengan bahan pangan lain (05-19SI2). Kini nelayan mengaku harus melaut lebih jauh dengan waktu lebih lama, sementara hasil tangkapan menurun. Seorang nelayan paruh baya menjelaskan:

"Perbedaannya sangat signifikan. Dahulu mencari ikan relatif mudah, namun sekarang menjadi sulit. Bahkan pada jarak 5–6 mil dari garis pantai, ikan tetap sulit ditemukan. Dari sisi ekonomi, harga ikan saat ini memang lebih baik, tetapi karena hasil tangkapan menurun, para nelayan membutuhkan modal yang jauh lebih besar.." (05-10SI2, Nelayan, Laki-laki, 64 tahun)

Meskipun demikian, **perubahan ini dirasakan berbeda utamanya oleh kelompok yang menggantungkan hidup pada hasil alam**. Sebelum tambang dan industri pengolahan datang, penghidupan masyarakat bertumpu pada aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya alam seperti perkebunan dan kelautan. Sebagian besar nelayan dan petani mengaitkan perubahan lingkungan dengan menurunnya penghidupan masyarakat (05-09SI2; 05-12SI2; 05-10SI2). Penurunan kualitas lingkungan berpengaruh langsung pada hasil tangkapan dan sumber pangan, sehingga meningkatkan biaya usaha dan mengurangi pendapatan (05-10SI2). Seorang Bapak pada diskusi kelompok yang sehari-harinya bekerja mencari ikan di laut menyampaikan,

"Hidup masyarakat tidak sejahtra karena limbah. Air rusak ikan di laut tidak kami tangkap....Sering terjadi banjir di desa lukulamo dan berdampak sampai ke desa lain... Terjadi kerusakan hutan bahkan kehidupan orang tugutil (pedalaman) pun jadi merasa terancam." (FGD Campuran)

Nelayan mengaitkan kondisi ini dengan pencemaran dan perubahan warna air laut yang menjadi kuning atau kemerahan (05-17SI2; 05-13KO2). Sejumlah responden menyebutkan abrasi pesisir di Sawai Itepo akibat pengambilan pasir untuk pembangunan (05-04SI2), serta sungai dan laut yang tercemar limbah sehingga ikan dan kerang semakin sulit ditemukan (05-20SI2; 05-05SI2).

"Dampak lingkungan. Hidup masyarakat tidak sejahetra karena limbah. Air rusak, ikan di laut tidak kami tangkap" (FGD Campuran).



Petani merasakan dampak serupa. Lahan perkebunan dan sagu berkurang karena dijual atau dibebaskan untuk perusahaan (05-09SI2; 05-02KO2). Petani dan penebang pohon juga menyoroti adanya kerusakan tanaman dan lahan yang sudah habis sehingga tidak bisa mendapatkan penghasilan (05-20SI2; 05-11SI2; 05-24KO2; 05-01KO2; 05-14SI2). Seorang petani lain menceritakan,

"Sebelum perusahaan masuk tanaman bagus, sekarang rusak" (05-11SI2, pemilik kios & petani, Laki-Laki, 63 tahun)

Seorang petani perempuan yang sejak lahir tinggal di desa juga menceritakan lebih lanjut mengenai kekhawatiran ke depan,

"Hanya saja yang pekerja tambang akan merasa senang, sedangkan kami yang petani akan merasa susah karena tanaman/lahan yang sudah digusur" (05-14SI2, Petani, Perempuan, 65 tahun)

Temuan ini menunjukkan bahwa **peningkatan perekonomian membawa dua mata sisi.** Bagi kelompok yang memiliki usia produktif, akses terhadap pekerjaan formal, serta kepemilikan aset seperti lahan atau modal usaha, ekspansi tambang membuka peluang mobilitas ekonomi melalui pekerjaan tetap, usaha kos-kosan, warung, maupun sektor penunjang lainnya. Sedangkan bagi kelompok yang tidak terhubung langsung dengan industri mengalami tekanan. Bahkan beberapa responden menyatakan bahwa yang benar-benar menikmati tambang adalah mereka yang bekerja di dalamnya, sedangkan petani dan nelayan justru merasa semakin sulit (05-03KO2; 05-05SI2).

1.2. Kenaikan Harga Sebagai Dampak Dari Peningkatan Aktivitas Ekonomi Turunan Dari Kegiatan Pertambangan

Kehadiran pekerja tambang mendorong berkembangnya warung, usaha makanan, dan jasa. Meskipun demikian, bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya daya beli sebagian pekerja tambang menciptakan lonjakan permintaan terhadap pangan, hunian, dan layanan dasar. Beberapa responden secara konsisten menyebut bahwa **harga-harga menjadi semakin mahal dan tidak sepenuhnya sebanding dengan pendapatan sebagian masyarakat** (05-12SI2; 05-16SI2; 05-20SI2; 05-19SI2).

Keluhan ini banyak diungkapkan oleh perempuan baik ibu rumah tangga, bidan, ataupun tokoh yang kegiatan sehari-harinya mengelola kebutuhan rumah tangga. Seorang Ibu Rumah Tangga menjelaskan:
"Dampak harga barang meningkat, biaya hidup semakin tinggi terutama makanan. Meski ekonomi meningkat... Bawa uang 1 juta itu langsung habis di Weda hanya untuk beli beras dan minyak kelapa." (05-16SI2, IRT, 25 tahun)

Kenaikan harga juga terlihat pada komoditas ikan. Seorang responden menceritakan harga ikan cakalang yang sebelumnya Rp2.000 sekarang menjadi Rp100.000 per kilonya (05-47KO2).



Sementara itu, nelayan lain menyatakan bahwa meskipun harga ikan meningkat, hasil tangkapan menurun sehingga biaya operasional justru bertambah (05-10SI2). Salah satu petani perempuan (05-06KO2) mengkonfirmasi bagaimana kesejahteraannya sangat dipengaruhi industri tambang. Dengan demikian, kenaikan harga tidak selalu berarti peningkatan kesejahteraan bagi pelaku produksi.

Menariknya, dalam beberapa kasus, **peningkatan ekonomi dan kenaikan harga diekspresikan oleh orang yang sama dalam satu narasi.** Seorang Ibu Rumah Tangga, misalnya, menyampaikan bahwa suaminya yang bekerja di perusahaan membuat kondisi ekonomi keluarga membaik dan memudahkan akses kredit, namun dalam waktu yang sama ia menekankan bahwa biaya hidup meningkat drastis (05-16SI2). Demikian pula perempuan petugas kesehatan dan pemilik kos yang menyebut ekonomi membaik, tetapi harga semakin mahal (05-19SI2).

Beberapa respons terhadap kenaikan harga menunjukkan pola ambivalensi dimana satu sisi mengeluhkan mahalnya harga bahan pokok di sisi lain memaklumi kondisi tersebut sebagai dampak "keramaian" dan pertumbuhan desa. Seorang ibu rumah tangga yang suaminya bekerja di perusahaan menyampaikan:

"Terbukanya lapangan pekerjaan… suami dapat kerja di Perusahaan. Ekonomi saya juga membaik… Tapi dampak harga barang meningkat, biaya hidup semakin tinggi terutama makanan. Bawa uang 1 juta itu langsung habis di Weda hanya untuk beli beras dan minyak kelapa." (05-16SI2, IRT, Perempuan, 25 tahun).

Respons serupa juga muncul dari petugas kesehatan yang merangkap pemilik kos: *"Ekonomi bagus tapi harga juga semakin mahal."* (05-19SI2, Petugas Kesehatan & Pemilik Kos, Perempuan, 35 tahun).

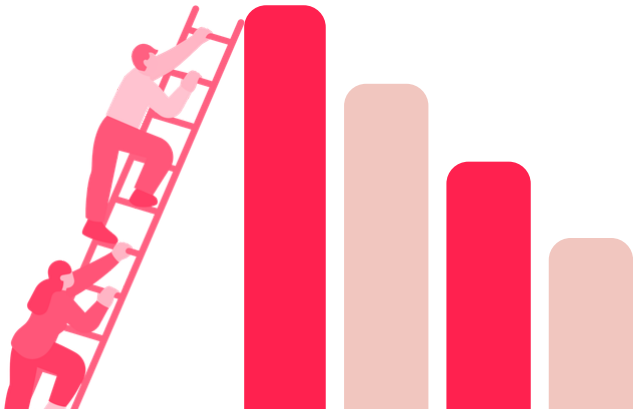
Di satu sisi warga mengakui adanya peluang dan peningkatan ekonomi, di sisi lain mereka merasakan mahalnya harga bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Kenaikan harga sering kali dikaitkan dengan bertambahnya penduduk dan ramainya desa, bukan secara langsung diposisikan sebagai ketidakadilan struktural (05-12SI2).

Namun hal **ini tidak berlaku bagi kelompok yang tidak terhubung langsung dengan industri**—seperti nelayan, petani, dan lansia—kenaikan harga menjadi tekanan yang lebih berat. Mereka menghadapi situasi di mana biaya hidup meningkat, sementara hasil tangkapan dan produksi kebun justru menurun (05-10SI2; 05-11SI2; 05-20SI2).

1.3. Penjualan Lahan dan Lonjakan Kesejahteraan yang Bersifat Sementara

Sejak masuknya industri tambang, Klaster 2 mengalami **lonjakan kesejahteraan yang terlihat secara material.** Aparat desa menyebut bahwa banyak rumah yang sebelumnya berbahan papan kini telah dibangun permanen setelah adanya pembayaran lahan dari perusahaan (05-17SI2). Ia menyampaikan:

"Ketika dari Weda Bay ke IWIP ini taraf hidupnya sudah membaik karena mereka ada lahan yang terbayar… rumahnya dulu papan sekarang beton." (05-17SI2, Guru dan Aparat Desa, Laki-laki, 48 tahun)



Selain pembangunan rumah, sebagian warga membuka usaha kos-kosan dan warung dari hasil penjualan lahan (05-17SI2; 05-20SI2). Seorang petani yang juga terlibat dalam pemerintahan desa menyebut bahwa ia menggunakan hasil penjualan tanah untuk membangun kos-kosan dan usaha kecil sebagai sumber pendapatan baru (05-20SI2). Bagi sebagian rumah tangga, pembayaran lahan menjadi titik awal diversifikasi ekonomi non-pertanian.

Fenomena ini menunjukkan bahwa terjadi **peningkatan likuiditas rumah tangga dalam waktu relatif singkat.** Namun lonjakan kesejahteraan tersebut tidak terutama berasal dari peningkatan produktivitas ekonomi, melainkan dari konversi aset tanah menjadi uang tunai. Sejumlah informan menyebut bahwa penjualan lahan dilakukan ketika kebutuhan ekonomi meningkat, termasuk untuk membangun rumah, membuka usaha, atau memenuhi kebutuhan mendesak (05-09SI2; 05-24KO2). Seorang petani menyampaikan:

"Sekarang selain pekerjaan sudah banyak yang jual lahan jadi bisa dapat uang untuk berusaha... Tapi sekarang sagu dsb itu sudah habis." (05-09SI2; Petani dan Pengusaha Kayu; Laki-Laki, 55 tahun)

Dalam beberapa kasus, lahan warisan keluarga dibagi dan dijual bersama sehingga setiap anggota keluarga menerima pembayaran satu kali (05-22KO2). Mantan kepala desa juga menyebut bahwa tekanan kebutuhan rumah tangga, termasuk menjelang hari besar keagamaan, mendorong warga menjual tanah (05-24KO2).

Gambar 4. Kantor Desa Sawai Itepo



Meskipun demikian, **dampak ekonomi penjualan lahan sangat dipengaruhi oleh kapasitas pengelolaan di tingkat rumah tangga.** Sebagian warga mampu mereinvestasikan hasil penjualan menjadi sumber pendapatan jangka panjang. Seorang anggota lembaga kemasyarakatan desa menyatakan bahwa setelah lahannya dibeli perusahaan, ia berencana membeli tanah di luar lingkar tambang dan mengembangkan usaha di lokasi baru (05-12SI2). Demikian pula, beberapa warga membangun kos-kosan sebagai strategi adaptasi terhadap meningkatnya permintaan hunian (05-17SI2; 05-20SI2).

Namun tidak semua rumah tangga mengalami manfaat yang berkelanjutan. Seorang tokoh agama perempuan mengungkapkan bahwa terdapat warga yang menerima pembayaran lahan dalam jumlah besar, tetapi dana tersebut habis dalam waktu relatif singkat karena tidak dikelola secara produktif:

"Sekarang sudah banyak yang kerja di tambang kemudian menjual tanah dengan hasil yang banyak. Tapi di sini banyak yang dapat habis dan dapat habis..." (05-03SI2, Tokoh Agama, Perempuan, 42 tahun)

Ia menambahkan bahwa setelah dana habis, sebagian warga kembali mengeluh dan berharap pada bantuan pemerintah. Guru setempat juga menilai bahwa sebagian warga lebih memilih menjual tanah untuk memperoleh uang cepat dibandingkan mempertahankan atau mengelolanya untuk jangka panjang (05-04SI2). Variasi ini menunjukkan bahwa **penjualan lahan dapat menjadi pintu masuk mobilitas ekonomi bagi sebagian rumah tangga, tetapi juga berisiko mengurangi aset** tanpa membangun sumber pendapatan baru bagi yang lain.

Terlepas dari variasi tersebut, **secara kolektif desa mengalami penyusutan aset produktif berbasis lahan.** Beberapa informan menyebut bahwa lahan sagu dan kebun semakin berkurang karena dijual (05-09SI2; 05-20SI2). Dalam diskusi kelompok, peserta menyampaikan bahwa ketika kebun yang jauh telah dilepas, lahan yang lebih dekat pun akhirnya ikut dijual sehingga tidak ada lagi basis produksi yang tersisa. Seorang warga lansia menyampaikan kekhawatirannya bahwa semakin luas tambang berkembang, semakin tidak berdaya masyarakat karena tanah warisan yang menjadi sumber penghidupan telah dilepas (05-18SI2).

Dengan demikian, meskipun penjualan lahan membawa lonjakan kesejahteraan yang nyata dalam jangka pendek, dalam jangka panjang praktik ini berpotensi mengurangi aset produktif keluarga dan mempersempit pilihan penghidupan non-tambang.

Selain faktor kebutuhan ekonomi, beberapa informan juga menyoroti bahwa **interaksi awal dengan perusahaan lebih banyak berkaitan dengan pembebasan lahan dibandingkan dengan sosialisasi mengenai dampak tambang secara menyeluruh**. Seorang pemilik UMKM menyampaikan bahwa tidak terdapat sosialisasi khusus mengenai dampak tambang, melainkan pertemuan yang difokuskan pada proses pembebasan lahan (05-09SI2). Pernyataan serupa juga muncul dari aparat desa yang menyebut bahwa diskusi dengan perusahaan lebih sering terkait kebutuhan atau permintaan tertentu dibandingkan dampak jangka panjang terhadap ekonomi masyarakat (05-17SI2).

1.4 Bertambahnya Penduduk dan Perubahan Kohesi Sosial

Kehadiran tambang dan industri diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya mobilitas masuk ke desa. Sejumlah informan menyebut bahwa suasana kampung kini menjadi lebih ramai dibandingkan sebelumnya. Seorang tokoh agama menyampaikan bahwa jumlah jemaat gereja bertambah sejak banyak pendatang masuk (05-13KO2). Seorang petani juga menyatakan bahwa kampung menjadi lebih hidup dengan hadirnya warga dari luar daerah (05-02KO2). Bagi sebagian pelaku usaha lokal, kondisi ini tidak sepenuhnya dipandang negatif. Seorang pemilik warung makan menyebut lingkungan sosial tetap aman dan usaha tetap berjalan baik meskipun jumlah penduduk meningkat (05-18KO2).

Gambar 5. Salah Satu Gereja di Desa Kobe yang Sedang Dibangun



Namun **pertambahan penduduk tersebut juga dirasakan secara fisik dalam keseharian warga** seperti kepadatan lalu lintas dan meningkatnya kendaraan di jalan desa. Seorang buruh reparasi ban menggambarkan kondisi jalan yang semakin macet dan ramai (05-20KO2). Seorang bidan juga mengaitkan bertambahnya penduduk dengan meningkatnya kejadian kecelakaan (05-21KO2). Gambaran ini menunjukkan bahwa pertambahan penduduk dirasakan secara fisik dalam keseharian warga. Dalam diskusi kelompok campuran, peserta juga menyebut peningkatan volume sampah yang belum sepenuhnya tertangani, terutama di sekitar kos-kosan yang terus bertambah. Perangkat desa menegaskan bahwa pengelolaan sampah menjadi tantangan baru karena belum tersedia tempat pembuangan yang memadai sementara hunian sewa meningkat (05-14KO2).

Terkait **relasi antara warga lokal dan pendatang, pandangan informan beragam**. Beberapa aparat desa dan nelayan menyatakan tidak terdapat konflik berarti dengan pendatang dan situasi sosial relatif aman. Seorang aparat desa menyebut, *"Untuk aspek sosial, tidak terdapat konflik dengan para pendatang"* (05-01SI2). Sejumlah nelayan juga menyatakan bahwa sejauh ini tidak ada keributan besar di desa, dan persoalan lebih sering terjadi di luar wilayah mereka.

Meski demikian, sebagian informan lain melihat adanya perubahan sosial secara perlahan. Seorang pemilik usaha menyampaikan:
"Pendatang ini juga lebih banyak sejak ada perusahaan... Perkelahian itu juga beberapa kali terjadi di sini sejak banyak orang pindahan." (05-09SI2, Petani dan Pengusaha Kayu, Laki-Laki, 55 tahun)

Seorang tokoh adat perempuan menyebut bahwa **kondisi masih tergolong aman, tetapi kadang muncul pemicu konflik yang berkaitan dengan minuman keras** (05-01KO2). Dalam beberapa keterangan, pendatang juga dikaitkan dengan meningkatnya kasus perselingkuhan, penipuan, atau pencurian, meskipun tidak seluruh informan menguatkan pandangan tersebut.

Selain relasi dengan pendatang, **perubahan kohesi sosial juga terlihat pada praktik gotong royong dan kebersamaan warga**. Beberapa informan menyatakan bahwa kegiatan bersama semakin jarang dilakukan dibandingkan sebelum ada tambang. Seorang warga yang sejak lahir tinggal di desa menyampaikan:

"Kebersamaan seperti gotong royong itu menghilang sekarang, semua-semua dilakukan sendiri." (05-02KO2, Petani, Laki-Laki, 75 tahun)

Seorang mantan pekerja tambang menyebut bahwa hubungan sosial berkurang karena masing-masing sibuk bekerja (05-20KO2). Seorang kader posyandu juga menyampaikan bahwa diskusi atau kumpul bersama menjadi lebih jarang karena kesibukan pribadi (05-15SI2).

Aparat desa dan warga lain mengaitkan **berkurangnya partisipasi gotong royong dengan meningkatnya keterikatan kerja di sektor tambang.** Seorang pekerja industri menyebut bahwa pekerja tambang khawatir terkena sanksi apabila tidak masuk kerja, sehingga kegiatan desa sering diambil alih oleh pemerintah desa (05-12KO2). Seorang mantan aparat desa juga menyebut bahwa kepedulian masyarakat cenderung menurun dibandingkan sebelumnya (05-24KO2).



Perubahan juga dirasakan dalam praktik ekonomi sosial sehari-hari. Seorang bidan menyebut bahwa dahulu masyarakat masih saling berbagi hasil panen atau melakukan barter, sementara kini hampir semua kebutuhan dibeli (05-19SI2).

Dinamika perubahan turut terlihat pada generasi muda. Seorang guru menyampaikan bahwa minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi relatif rendah karena sebagian lulusan SMA lebih memilih bekerja di tambang (05-04SI2). Bahkan terdapat siswa yang meminta surat keterangan lulus lebih awal untuk mengikuti rekrutmen perusahaan.

"Biasanya kalau yang lulus SMA ini pasti maunya kerja di tambang... murid belum lulus sudah minta dibuatkan surat keterangan lulus karena ada perekrutan security di perusahaan." (05-04SI2, Guru, Laki-Laki, 39 tahun)

Tokoh agama dan aparat desa juga menyebut adanya **kekhawatiran terhadap perubahan perilaku remaja**, termasuk kasus menghirup lem, perkelahian, dan pengaruh pergaulan luar (05-03KO2; 05-47KO2). Seorang bidan bahkan menyampaikan bahwa ia mulai menangani kasus penyakit menular seksual seperti sifilis dan juga permintaan aborsi janin (05-21KO2). Namun demikian, terdapat pula informan yang menekankan bahwa sebagian besar anak usia sekolah tetap bersekolah dan perubahan tersebut tidak terjadi secara merata.

1.5 Perbedaan Pandangan terhadap dampak tambang dipahami melalui pengalaman sehari-hari

Pemahaman masyarakat terhadap dampak tambang di Klaster 2 lebih banyak dibentuk oleh pengalaman sehari-hari dibandingkan melalui informasi yang sistematis. Sebagian besar rumah tangga merasakan perubahan drastis termasuk dampak yang tidak langsung. Misalnya salah satu nelayan lansia menyebutkan, "Sekarang merasa lebih panas dari dulu. Panas bumi ini sudah beda, keluar rumah sedikit sudah basuar." (05-10KO2). Hal ini juga terlihat pada bagaimana pemilik kos, pekerja tambang dan mantan pekerja tambang yang meskipun diuntungkan, tetapi juga mengkritisi kerugian yang ada. Misalnya mantan pekerja tambang menyatakan munculnya peluang pendapatan yang lebih menentu tetapi tidak ada perubahan dalam kesejahteraan (05-22KO2).

"Sejak adanya perusahaan menurut saya itu lebih meningkatkan, mendukung secara ekonomi keluarga saya." (05-13SI2, Pegiat Budaya, Laki-laki, 57 Tahun)

Sementara itu, salah satu tenaga kesehatan cukup kesulitan menyebutkan perbedaan kondisi sebelum dan setelah ada tambang, menunjukkan ketidakpahamannya soal perubahan yang terjadi (05-15SI2). Hal ini menunjukkan bahwa **pemahaman terhadap dampak tambang berkembang secara fragmentaris dan berbasis pengalaman personal** daripada melalui kerangka informasi yang terstruktur mengenai perubahan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam jangka panjang.



Di tingkat formal, **pemerintah desa menyebutkan bahwa musyawarah desa (musdes) dan musyawarah dusun (musdus) rutin dilakukan**, termasuk membahas isu-isu terkait tambang (05-17SI2; 05-12SI2). Beberapa warga juga mengingat adanya undangan diskusi dari pemerintah kabupaten atau pihak luar seperti kampus (05-07KO2; 05-21KO2). **Sedangkan dari perspektif warga, menegaskan bahwa pembahasan ini sifatnya masih terbatas pada topik umum di masyarakat** seperti kesehatan, kebutuhan air, bantuan atau program pemerintah daerah (05-07KO2; 05-10KO2; 05-18SI2).

"Pernah ada sosialisasi, bukan mengenai dampak tambang tapi mengenai bantuan, itupun tidak ada realisasi" (05-10KO2, Nelayan, Laki-Laki, 68 tahun)

"hanya diundang rapat desa tapi pertemuan biasa, belum ada tentang dampak-dampak tambang ini." (05-03SI2, Tokoh Agama, Perempuan, 42 tahun)

Berdasarkan observasi lapangan, dan wawancara, terlihat adanya **keterbatasan partisipasi dalam musyawarah terkait dampak tambang** selama PT IWIP beroperasi sampai saat ini. Seorang petani dan pengusaha kayu ketika ditanya apakah pernah mendapat sosialisasi terkait dampak tambang menjawab:

"Tidak ada, hanya ada sosialisasi untuk pembebasan lahan saja." (05-09SI2, Petani, Laki-laki, 55 tahun)

Pernyataan serupa juga muncul dari mantan aparat desa:

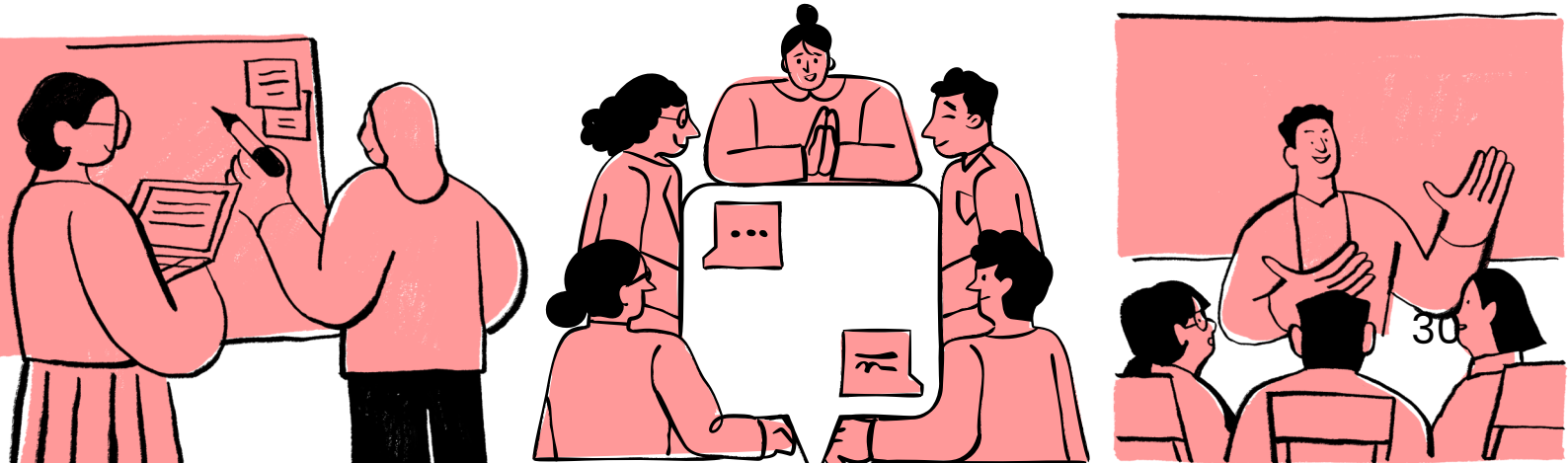
"Dari IWIP tidak ada sosialisasi. Hanya ada nego harga." (05-24KO2, Warga, Laki-Laki, 52 tahun)

Bahkan beberapa warga menyebut tidak pernah mengetahui adanya sosialisasi sama sekali (05-02SI2; 05-11KO2; 05-17KO2). Ketiadaan sosialisasi ini sering disandingkan dengan keberadaan sosialisasi yang pernah diselenggarakan oleh Weda Bay Nickel (WBN).

Salah satu lansia yang tidak memiliki keluarga mengungkapkan, *"tidak pernah ikut sosialisasi, orang tua jarang dipanggil...tapi kalau dipanggil akan datang"* (05-16KO2). Pemuda dengan disabilitas yang ditemui juga menyampaikan hal serupa bahwa dirinya belum dilibatkan dalam musdes ataupun musdus (05-19KO2).

Meskipun demikian, terdapat beberapa **faktor yang membatasi partisipasi.** Faktor seperti kesibukan warga yang bekerja sebagai sopir, guru atau buruh menyebabkan warga terbatas tidak dapat menghadiri kegiatan pada waktu yang telah ditentukan (05-15KO2;05-20KO2). Faktor lain yang menjadi alasan termasuk masyarakat yang tidak tahu keberadaan musyawarah, atau tidak mendapatkan undangan (05-01KO2; 05-02SI2;05-04SI2; 05-11SI2), misalnya karena statusnya pendatang atau karena dianggap terlalu vokal.

"Saya sering dilibatkan dalam kegiatan musyawarah desa, tapi tidak bisa hadir karena ada urusan di sekolah" (05-05KO2, Guru, Perempuan; 44 Tahun).



Dengan demikian, **pemahaman masyarakat terhadap dampak tambang berkembang dalam situasi asimetri informasi dan partisipasi yang terbatas.** Dalam kondisi minim pengetahuan mengenai dampak tambang secara menyeluruh, masyarakat belum mendapatkan sosialisasi dari pihak perusahaan. Baik perangkat desa maupun warga mengungkapkan selama ini sosialisasi hanya didapatkan dari Pemerintah Daerah atau kampus UI (05-21KO2; 05-01SI2). Para pemuda dalam FGD juga menyampaikan bahwa mereka belum pernah dilibatkan dalam pertemuan atau konsultasi apapun dengan pihak perusahaan. Perangkat desa menyatakan:

"*tidak ada (sosialisasi dari perusahaan), diskusi juga tidak ada, Kobe ini seperti anak tiri jadi tidak terlalu diperhatikan*" (05-14KO2, Perangkat Desa, Laki-Laki, 30 tahun)

1.6 Pengaduan dilakukan untuk menangani masalah mendesak tapi proses tidak pasti

Berbagai bentuk penanganan dampak tambang dan industri telah dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun perusahaan. Bantuan tunai menjadi salah satu bentuk intervensi yang paling sering disebut, terutama oleh kelompok rentan. Seorang buruh penyandang disabilitas menjelaskan:
"BLT. Uang tunai Rp 1.800.000 tiga bulan sekali. Pemberian bantuan melalui desa. Ada sumbangan dari desa ketika mengalami kecelakaan. Yang menabrak tidak bertanggung jawab." (05-19KO2, Buruh dengan disabilitas, Laki-laki, 20 tahun)

Seorang petani lansia juga menjelaskan adanya pembangunan rumah dari pemerintah daerah serta bantuan tunai rutin untuk kelompok rentan (05-02SI2).

Di tingkat desa, perangkat desa menyebutkan adanya insentif bagi lansia dan ibu hamil, pembentukan kelompok nelayan dan kelompok tani, serta pengembangan peternakan ayam dan tambak ikan nila (05-17SI2).

Program ketahanan pangan, pembentukan 20 kelompok nelayan, serta bantuan perumahan sebanyak 5 unit dari Dinas Perkim turut disebut sebagai bagian dari upaya yang berjalan. Seorang nelayan juga menyampaikan adanya program penanaman mangrove oleh perusahaan bersama pemerintah provinsi (05-04KO2).

Keberadaan berbagai program menunjukkan adanya respons formal terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi **pengalaman masyarakat terhadap program tersebut tidak sepenuhnya seragam**. Sejumlah nelayan yang menggantungkan penghidupan pada laut menyatakan bahwa perubahan kondisi perairan belum diikuti dengan penanganan yang dirasakan langsung. Seorang nelayan menyampaikan:

"*Tidak ada upaya dari pemerintah maupun perusahaan untuk menangani dampak lingkungan akibat tambang yang meluas.*" (05-04KO2, Nelayan, Laki-Laki, 34 tahun)

Pandangan serupa juga muncul dari pekerja tambang dan petani yang merasa belum melihat upaya yang secara spesifik menyasar dampak lingkungan.

Dalam FGD perempuan, peserta menyebut bantuan bibit tanaman tidak selalu berkualitas baik dan sebagian tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Seorang warga lansia juga mengingat adanya program keberlanjutan seperti rencana pendirian politeknik yang tidak terealisasi (05-18SI2). Variasi pengalaman ini menunjukkan bahwa **keberadaan program belum selalu dipahami sebagai solusi atas dampak yang dirasakan sehari-hari.**

Ketika persoalan dianggap mendesak—seperti banjir akibat air pasang atau penurunan hasil tangkapan ikan—pengaduan menjadi langkah yang ditempuh masyarakat. Aparat desa menyebut adanya usulan pembangunan talud sepanjang 200 meter untuk mencegah banjir (05-01SI2). Namun **jalur pengaduan yang tersedia tidak dipahami secara seragam oleh warga**. Seorang pemilik kios lansia menyebut pernah mengadu ke badan pengurus tanpa memperoleh respons (05-11SI2). Mantan pekerja tambang menyampaikan bahwa ia pernah menyampaikan persoalan melalui musrenbang, tetapi tidak melihat keterhubungan langsung dengan perusahaan(05-22KO2).

"Sekarang orang kalau sengsara tidak bisa mengadu. Tapi pernah mengadu ke musrenbang. Kalau perusahaan tidak ada hubungan." (05-22KO2, Petani, Laki-Laki, 60 Tahun)

Beberapa warga bahkan **memilih melapor ke tingkat yang lebih tinggi karena merasa persoalan tidak terselesaikan di tingkat desa** (05-24KO2; refleksi 01-36). Beberapa warga menilai bahwa respons terhadap laporan belum konsisten dan kepala desa dinilai sulit ditemui (05-24KO2).

Di sisi lain, perangkat desa menjelaskan bahwa bantuan pemerintah daerah umumnya turun melalui peraturan bupati dan desa berperan sebagai perpanjangan tangan sosialisasi (05-17SI2).

Ia juga menyebutkan bahwa tidak terdapat sosialisasi khusus mengenai skema pengaduan dari perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa jalur pengaduan lebih banyak bertumpu pada struktur pemerintahan desa, sementara akses langsung ke perusahaan tidak banyak disebut sebagai kanal yang tersedia. Seorang petugas kesehatan menyampaikan harapannya agar kepala desa lebih proaktif:

"Harusnya kepala desa itu walaupun masalah di sini tidak masuk di usulan musyawarah tapi kan bisa lihat langsung juga kondisi masyarakat atau dengarkan masukan-masukan warga." (05-19SI2, Petugas Kesehatan, Perempuan, 35 tahun)

Dalam proses tersebut, **muncul perhatian terhadap tata kelola bantuan di tingkat desa.** Seorang perempuan tokoh adat menyampaikan bahwa pengelolaan program lebih banyak dilakukan oleh pihak tertentu tanpa pelibatan masyarakat luas, termasuk dugaan penggunaan bantuan yang tidak sesuai peruntukan (05-12SI2). Tokoh adat lain mengamati bahwa perusahaan lebih sering berdiskusi dengan aparat desa dibandingkan dengan masyarakat secara langsung (05-01KO2). Beberapa informan, termasuk pekerja industri, mengusulkan agar perusahaan membuka ruang aspirasi yang lebih langsung, misalnya misalnya melalui kehadiran humas di desa atau forum terbuka tanpa perantara (05-12KO2).



RQ 2: Perubahan Akses Layanan Dasar

2.1 Air Bersih sebagai Layanan Mendesak dengan Pengalaman yang Beragam

Air bersih menjadi layanan dasar yang paling sering disebut dalam wawancara dan diskusi kelompok. Pengalaman warga menunjukkan **variasi persepsi mengenai perubahan kondisi air sejak sebelum dan setelah kehadiran tambang.** Sebagian informan menilai terdapat perbaikan dibandingkan masa sebelumnya. Seorang petani perempuan menyebut bahwa dahulu mengambil air harus berjalan cukup jauh, sedangkan kini sudah tersedia kran dan sumur (05-14SI2). Seorang tokoh agama juga menyampaikan bahwa kebutuhan air masyarakat terpenuhi meskipun menggunakan sistem giliran (05-03KO2). Seorang tenaga kesehatan menyebut air kini menggunakan jaringan PAM dan relatif jernih, meskipun debitnya berkurang saat musim kemarau (05-06KO2).

Namun tidak semua informan merasakan perbaikan. Dalam FGD pemuda, peserta menyampaikan bahwa kondisi sumber air tidak mengalami perubahan berarti dibandingkan sebelum 2018. Hal ini juga dikonfirmasi dalam observasi dan catatan refleksi peneliti bahwa kondisi air di desa belum banyak berubah sejak periode sebelum tambang beroperasi.

Pada saat yang sama, **beberapa warga yang lain justru merasakan adanya penurunan kualitas maupun akses terhadap air.** Seorang pekerja industri juga menyebut bahwa debit air sejak sebelum tambang relatif sama dan tetap terbatas (05-12KO2). Di sisi lain, beberapa warga justru menilai kondisi air memburuk atau lebih sulit diakses. Seorang nelayan menyatakan bahwa sebelum ada tambang akses air lebih mudah (05-04KO2). Perangkat desa menyebut bahwa terjadi perubahan sumber mata air yang digunakan (05-14KO2).

"Air bersih lebih bagus sebelum 2018. Sejak ada tambang agak memburuk dan juga lebih sulit diakses. Mata airnya berubah dari mata air besar (babuyaelo) berubah menjadi mata air yang ditadah/hujan." (05-14KO2, Tokoh Agama, Laki-laki, 32 Tahun)

Di luar perbedaan persepsi mengenai perubahan kualitas, persoalan distribusi dan akses juga diakui. Beberapa informan menyampaikan bahwa tidak semua rumah terjangkau jaringan pipa (05-12SI2; 05-16SI2). Salah satu petugas kesehatan menyinggung bahwa sanitasi belum sepenuhnya baik dan air di rumah tangga seringkali tidak stabil meskipun fasilitas di pustu relatif lebih terjamin karena sudah tersedia PAM beberapa bulan yang lalu (05-19SI2). Sistem distribusi bergiliran membuat sebagian warga harus menunggu atau mengambil air secara manual ketika aliran tersendat (05-07KO2; 05-21KO2).



Seorang guru menyebut bahwa **bertambahnya jumlah penduduk memperbesar tekanan terhadap ketersediaan air** karena warga harus menunggu giliran lebih lama (05-01KO2). Selain itu, seorang pemilik warung lansia menjelaskan bahwa pipa air hanya ditanam sekitar 5 cm, padahal seharusnya lebih dalam agar aman dan tidak mudah rusak (05-07SI2). Kondisi sambungan pipa yang kerap lepas juga membuat air tidak mengalir stabil ke rumah-rumah warga (05-16SI2).

Selain menyangkut kebutuhan domestik, **air juga dipahami sebagai isu yang berdampak langsung pada layanan kesehatan dan juga pekerjaan sehari-hari.** Hal ini sempat dikeluhkan oleh lansia pemilik kos yang menurutnya sejak sulitnya mengakses air bersih, dirinya tidak bisa bahalo (melakukan pembuatan sagu) lagi. Seorang petugas kesehatan menyampaikan bahwa ketersediaan air sangat krusial terutama ketika menangani persalinan.

"Air ini juga harusnya bisa lebih baik, kalau ada yang melahirkan ini kan setengah mati airnya." (05-21KO2, Petugas Kesehatan, Perempuan, 40 Tahun)

Keterbatasan dalam mengakses air yang dirasakan mendorong berbagai bentuk adaptasi di tingkat rumah tangga. Seorang petani lansia menyampaikan bahwa ia menggunakan mesin pompa sendiri yang baru dipasang sekitar satu bulan terakhir, namun tetap harus mengantre karena sumber air terbatas (05-02SI2).

Warga lain menyebut bahwa saat musim kering mereka mengambil air dari sungai dengan membawa 10 hingga 25 liter galon sekali angkut (05-09SI2). Seorang tokoh agama perempuan juga menarik pipa sendiri ke rumahnya karena distribusi awal hanya menjangkau satu lorong dan satu tangki (05-03SI2). Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan air sebagian bergantung pada inisiatif dan biaya tambahan yang ditanggung warga.

Warga melihat adanya upaya perbaikan yang sudah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Informan menyebut adanya penanganan melalui pemasangan pipa langsung dari mata air ke kali, namun tanpa penataan yang baik sehingga ketika banjir air menjadi keruh (05-12SI2). Pengeboran air juga pernah dicoba, tetapi tidak efektif dan akhirnya warga kembali menggunakan sumber lama, yaitu mata air Babuyalo (05-02KO2). Beberapa informan menilai bahwa persoalan air telah berulang kali disampaikan dalam musdes dan musdus (05-12KO2), namun tindak lanjut masih bergantung pada ketersediaan anggaran dan belum sepenuhnya terealisasi (05-18SI2).

2.2 Pelayanan Kesehatan Meningkat, Namun Terbatas oleh SDM dan Operasional

Dibandingkan dengan isu air yang dirasakan beragam, layanan kesehatan relatif lebih banyak dinilai mengalami perbaikan dibandingkan periode sebelumnya, baik dari segi infrastruktur maupun akses layanan. Seorang pemilik UMKM menyampaikan bahwa sebelum 2018 tenaga kesehatan masih sangat terbatas, sementara kini bangunan sudah lebih baik dan pelayanan lebih mudah diakses (05-09SI2). Warga lansia juga menyebut bahwa akses kesehatan kini lebih mudah dibandingkan sebelumnya (05-11SI2). Kader posyandu menilai pelayanan berjalan baik dan rutin, terutama untuk ibu hamil dan lansia (05-15SI2; 05-04SI2).



Fasilitas di pustu turut disebut mengalami penambahan. Aparat desa menyampaikan bahwa tersedia mobil ambulans serta dua tenaga bidan yang melayani masyarakat (05-17SI2). Program pencegahan stunting menjadi prioritas, termasuk intervensi pada ibu hamil sebagai langkah preventif (05-23KO2; 05-17SI2). Sosialisasi kesehatan juga disebut cukup rutin dilakukan di tingkat desa (05-05KO2).

Namun, di balik penilaian positif tersebut, **sejumlah keterbatasan operasional masih dirasakan secara langsung oleh warga dan tenaga kesehatan.** Seorang tenaga kesehatan menyampaikan bahwa jumlah tenaga medis belum sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk sehingga beban pelayanan meningkat.
"Pustu masih sangat membutuhkan SDM, kewalahan karena kenaikan jumlah penduduk." (05-21KO2, Petugas Kesehatan, Perempuan, 40 Tahun)

Selain persoalan tenaga, ketersediaan obat, fasilitas penunjang, dan alat kesehatan juga belum sepenuhnya stabil. Seorang guru perempuan menyebut bahwa ketika hendak melakukan layanan KB atau pemasangan implan, alat terkadang tidak tersedia (05-05KO2; 05-11KO2;).

Keterangan dari perangkat desa juga menyatakan bahwa pustu membutuhkan tabung oksigen (05-17SI2). Dari segi infrastruktur, drainase untuk pembuangan limbah medis belum tersedia sehingga penanganannya masih dilakukan secara manual (05-21KO2).

Keterbatasan ini berdampak pada situasi darurat. Beberapa warga menyebut bahwa ketika bidan tidak berada di pustu, mereka harus mendatangi rumah bidan yang berada di luar kampung (05-12SI2; 05-15KO2). Dalam kondisi gawat darurat, jarak dan waktu menjadi persoalan tersendiri.

"Kalau emergency ini repot membawa ke pustu atau bertemu bidan karena rumahnya bidan ada di luar kampung." (05-12SI2, Pegawai Industri, Laki-laki, 35 Tahun)

Sedangkan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut juga dilihat sebagai satu persoalan terhadap akses. **Meskipun layanan di RSUD disebut gratis, warga tetap harus menanggung biaya transportasi yang cukup besar untuk menuju ke Weda** (05-03KO2; 05-15KO2).

"Kalau di RSUD itu gratis, tapi bayar otonya yang mahal 300 ribu." (05-12SI2, Pegawai Industri, Laki-laki, 35 Tahun)

Gambar 6. Bangunan Pustu di Desa Kobe





Gambar 7. Bangunan Pustu Sawai Itepo (Sumber: Google Maps)

Sementara keterangan beberapa informan menyampaikan bahwa ambulans tidak selalu siap digunakan atau tidak ada petugas yang merawatnya secara khusus (05-19SI2). Salah satu penjual makanan ringan bahkan menyebutkan bahwa dirinya tidak mengetahui keberadaan ambulan (05-01KO2). Dengan demikian, biaya dan akses transportasi menjadi faktor tambahan yang memengaruhi pengalaman masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.

Di sisi lain, **terdapat upaya pemenuhan layanan melalui koordinasi antara desa dan puskesmas.** Operasional pustu sebagian ditopang oleh alokasi dana desa, sementara kasus tertentu dilaporkan ke tingkat puskesmas untuk penanganan lanjutan (05-21KO2). Petugas kesehatan kemudian menjelaskan bahwa permintaan sepuluh jenis obat ke puskesmas terkadang hanya dipenuhi setengahnya, sehingga kekurangan harus ditutupi melalui dana desa (05-19SI2). Bantuan obat dan alat kesehatan disebut hanya diberikan satu hingga dua kali dalam setahun dalam bentuk uang tunai untuk dibelanjakan sendiri (05-21KO2). Meskipun dinas kesehatan disebut telah melakukan kunjungan lapangan dengan melakukan dokumentasi kondisi pustu, beberapa informan menilai bahwa tindak lanjut belum sepenuhnya terlihat (05-21KO2; 05-10KO2).

Menghadapi situasi ini, **masyarakat mengungkapkan kebutuhan perbaikan lebih lanjut untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan.** Beberapa warga menekankan penyediaan tambahan ambulan mengingat tingginya intensitas kecelakaan dan kondisi kesehatan darurat (05-15KO2; 05-01KO2; 05-12SI2). Petugas kesehatan juga menambahkan kebutuhan sopir dan anggaran untuk merawat kendaraan agar pengguna tidak perlu menanggung biaya operasional (05-19SI2). Dari segi pemenuhan infrastruktur, petugas kesehatan dan perangkat desa mengusulkan agar pustu bisa ditambah alokasi anggaran operasional yang lebih fleksibel agar bisa membeli kebutuhan obat sesuai kebutuhan masyarakat dan memastikan listrik di pustu bisa terus berjalan (05-19SI2; 05-21KO2; 05-20SI2). Kemudian penambahan SDM dan peningkatan kapasitas juga dirasa mendesak, salah satu warga mengungkapkan:

"Usul agar ada penambahan nakes, karena masyarakat ini semakin banyak dan juga ada yang kerja di perusahaan....Sekarang ini ada 400 KK mungkin di sini" (05-10KO2, Nelayan, Laki-laki, 68 tahun)

Di luar dari persoalan fasilitas, catatan refleksi peneliti mengamati masih minimnya upaya preventif dari tenaga kesehatan. Hal ini beresonansi dengan kemunculan gejala penularan penyakit sejak meningkatnya penduduk. Tindakan preventif yang bisa dilakukan termasuk melakukan sosialisasi penyebaran penyakit dan skrining yang lebih komprehensif.

2.3 Pendidikan Gratis dengan Keterbatasan Infrastruktur dan Tenaga Pendidik

Dalam sektor pendidikan, perubahan yang paling banyak disebut adalah kebijakan pendidikan gratis yang dirasakan setelah kehadiran tambang. Kebijakan ini dipahami sebagai **kemudahan yang signifikan bagi rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan lebih dari satu anak usia sekolah**. Sejumlah informan menyampaikan bahwa saat ini sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi tidak lagi memungut biaya SPP. Seorang petani menyebut bahwa program pembebasan biaya sekolah diumumkan oleh pemerintah daerah dan dirasakan langsung oleh keluarga (05-06KO2).

Seorang tokoh masyarakat menyampaikan bahwa cucunya di tingkat SMA telah merasakan pendidikan gratis (05-12SI2). Pandangan serupa muncul dari pekerja industri yang menilai bahwa pendidikan kini lebih terjangkau (05-12KO2). Keterjangkauan pendidikan juga diakui oleh salah satu peserta FGD campuran. Seorang nelayan yang anaknya tengah menempuh pendidikan menyatakan:
"Program pemerintah baru dirasakan oleh masyarakat setelah ada tambang seperti sekolah gratis sampai perguruan tinggi." (05-04KO2, Nelayan, Laki-laki, 34 Tahun).

Namun, di balik akses yang lebih terjangkau, **kualitas layanan pendidikan juga dinilai belum merata.** Dalam FGD pemuda, peserta menyampaikan bahwa pendidikan dahulu belum tertangani dengan baik, dan meskipun kini terdapat renovasi sekolah, kualitas pengajaran masih perlu ditingkatkan. Bantuan yang diterima sekolah sebagian berupa kursi, meja, seragam, serta perangkat seperti smart TV dari perusahaan (05-05KO2; 05-11KO2). Namun, kebutuhan ruang belajar tambahan, status sekolah swasta menjadi negeri, serta penambahan tenaga pengajar masih menjadi usulan yang sering disampaikan (05-17SI2; 05-05KO2).

"SMA juga sudah ada di Sawai Itepo karena tidak ada bangunan. Jadi pakai bangunan SMP sementara… Anak-anaknya jadi banyak yang keluar karena sekolahnya kurang berkualitas." (05-10KO2, Nelayan, Laki-laki, 68 tahun)



Gambar 8. Bantuan Smart TV di SMPN 17 Halteng yang tidak digunakan karena keterbatasan pemakaian

Hal ini dirasakan langsung oleh seorang guru yang menyampaikan bahwa ruang belajar di sekolahnya hanya lima, sehingga ada kelas yang harus dibagi menjadi dua dalam satu ruangan (05-05KO2). Situasi serupa juga dirasakan oleh guru lain karena sekolah harus membagi ruang perpustakaan dengan ruang guru. Pada tingkat SMA, kondisi dinilai lebih terbatas. Informan menyebut bahwa SMA masih menggunakan bangunan SMP secara bergantian karena belum memiliki gedung sendiri (05-20KO2; 05-12SI2). Kekurangan lahan menjadi salah satu kendala pengembangan sekolah, sehingga rencana pembangunan gedung baru belum terealisasi (05-17SI2).

"Untuk tingkat SMA, jumlah guru masih sangat terbatas, hanya ada dua orang saja." (05-07SI2, Pemilik Warung, Perempuan, 65 tahun)

Di satu sisi, bangunan pendidikan belum sepenuhnya tersedia untuk seluruh jenjang pendidikan. Bangunan untuk TK dan PAUD hanya tersedia di Desa Kobe, sementara di Sawai Itepo mengandalkan bangunan dari aset yayasan ekowisata yang pernah dibangun (05-16SI2). Beberapa perangkat desa juga mengkonfirmasi bahwa bangunan ini masih membutuhkan pembangunan infrastruktur (05-17SI2; 05-20SI2)

"PAUD juga prihatin sekali, itu PAUD yang bangunannya dibuat Mr. Robb. Karena pendidikan di tingkat dini ini sangat penting." (05-16SI2, Perempuan, IRT, 25 Tahun)

Keterbatasan jumlah guru menjadi persoalan yang berulang disebut. Beberapa informan menyampaikan bahwa di SMA Insan Kharisma (satu-satunya SMA di desa) hanya terdapat dua hingga tiga tenaga pengajar (05-04SI2; 05-07SI2). Menurut keterangan salah satu guru, pertambahan jumlah siswa termasuk siswa pindahan dari luar daerah telah memperbesar kebutuhan ruang kelas dan tenaga pengajar (05-11KO2). Sedangkan catatan refleksi dan observasi juga menunjukkan bahwa kondisi keterbatasan guru belum banyak berubah sejak 2019 terakhir berkunjung untuk mendata sekolah. Selain jumlah yang minim, sebagian guru berdomisili di luar desa sehingga sering terlambat atau tidak hadir ketika terjadi kendala transportasi (05-03SI2; 05-17SI2). Ketiadaan rumah dinas guru disebut sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kehadiran dan stabilitas pengajaran.

Gambar 9. Bangunan PAUD di Sawai Itepo yang dimiliki oleh Yayasan Ekowisata





Gambar 10. Area Lapangan SMPN 17 Halteng yang dikelilingi lahan milik warga

Akses transportasi sekolah juga mengalami perubahan. Beberapa informan mengingat bahwa sebelumnya terdapat bus antar-jemput sekolah yang disediakan perusahaan, namun layanan tersebut kini tidak lagi tersedia (05-05KO2; 05-24KO2; 05-20KO2). Ketiadaan transportasi ini dinilai menyulitkan sebagian siswa, terutama yang harus menempuh jarak lebih jauh.

2.4 Perubahan Infrastruktur Dasar yang Bersifat Parsial

Warga juga menyinggung perubahan pada infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, jaringan komunikasi, serta pengelolaan sampah. Pengalaman masyarakat menunjukkan adanya perbaikan yang dirasakan dibandingkan periode sebelumnya.

Perbaikan paling sering disebut berkaitan dengan kondisi jalan. Beberapa informan menyampaikan bahwa sebelum 2018 jalan utama masih berupa sirtu atau berbatu dan kurang nyaman dilalui kendaraan (05-16SI2; 05-12KO2). Seorang petani perempuan lansia menyebut bahwa dahulu naik motor tidak nyaman, sedangkan kini kondisi jalan lebih baik (05-14SI2). Guru perempuan juga menyampaikan bahwa jalan sekarang lebih bagus dibandingkan sebelumnya (05-11KO2).

Namun demikian, perbaikan tersebut tidak dirasakan seragam. Di beberapa lokasi, jalan perkampungan masih dalam kondisi rusak atau tergenang air akibat drainase yang belum memadai (05-20SI2; 05-24KO2). Selain itu, sering dengan peningkatan aktivitas kendaraan, terutama operasional industri dianggap berkaitan dengan meningkatnya risiko kecelakaan (05-04KO2; 05;-11KO2; 05-18SI2; 05-06KO2; 05-07KO2).

"Jalan sekarang sudah lebih bagus tapi banyak orang kecelakaan." (05-11KO2, Guru, Perempuan, 30 tahun)

Akses pendukung aktivitas ekonomi seperti jalan tani dan fasilitas pasar juga disebut membutuhkan perhatian. Seorang perempuan tokoh masyarakat menyampaikan bahwa jalan tani belum tersedia sehingga menyulitkan aktivitas pertanian (05-12SI2).

Pada saat yang sama, **masyarakat juga mengapresiasi bantuan rumah layak huni yang diberikan pemerintah melalui dana desa.** Seorang kader posyandu mengakui bahwa program bantuan rumah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyedian hunian yang layak (05-15SI2). Seorang aparat desa juga menyatakan bantuan rumah layak dari pemerintah kabupaten sebanyak 5 unit yang pengelolaannya diserahkan pada kontraktor (05-20SI2). Meskipun bantuan ini diterima dengan baik oleh masyarakat, akan tetapi proses penyalurannya turut menimbulkan gejolak sosial. Salah satunya, pengelolaan bantuan rumah dilakukan oleh pihak ketiga untuk mencegah adanya penjualan bantuan material yang diberikan (05-20SI2). Salah satu aparat desa juga menjelaskan:

"*Ada kecemburuan sosial, persoalan rumah layak huni. Akar permasalahan dari desa, karena ada kecurigaan nepotisme"* (05-24KO2, Mantan Aparat Desa, Laki-laki, 52 tahun)

Pada sektor listrik, sebagian besar informan menyampaikan adanya peningkatan signifikan karena sebelumnya sebagian besar warga desa masih menggunakan mesin diesel. Seorang petugas kesehatan menggambarkan kondisi sebelumnya ketika listrik hanya menyala pada jam tertentu (05-19SI2). Saat ini, listrik dinilai lebih stabil dan tersedia sepanjang hari. Beberapa warga juga menyebut adanya program listrik gratis bagi keluarga kurang mampu (05-24KO2).

Meski demikian, gangguan listrik masih terjadi, terutama saat cuaca buruk atau ketika terdapat pohon tumbang menimpa jaringan (05-09SI2; 05-12SI2). Seorang pemilik warung makan bahkan menyebut bahwa listrik sering padam pada waktu tertentu, termasuk saat periode pembayaran gaji pekerja tambang (05-18KO2).

"Listrik sudah bagus tapi kadang-kadang mati kalau cuaca tidak bagus" (05-11KO2, Guru, Perempuan, 30 tahun)



Gambar 12. Kondisi jalan desa Kobe

Pada aspek jaringan komunikasi, FGD pemuda menyampaikan bahwa kualitas jaringan internet kini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Informan lain mengingat bahwa dahulu untuk memperoleh sinyal telepon harus menggantung telepon atau pergi ke lokasi tertentu (05-19SI2). Hal ini dikonfirmasi oleh aparat desa dan petugas kesehatan bahwa jaringan internet merupakan bantuan dari pemerintah yang dibangun sejak 2 tahun lalu (05-18SI2; 05-20SI2; 05-19SI2). Namun, beberapa warga termasuk lansia, dan buruhmenilai jaringan internet belum sepenuhnya stabil (05-11SI2; 05-20KO2), beberapa titik lokasi masih belum terjangkau oleh sinyal telpon.

Berbeda dengan sektor jalan dan listrik yang menunjukkan kecenderungan perbaikan, **pengelolaan sampah menjadi isu yang relatif konsisten disebut sebagai belum tertangani secara sistematis.** Beberapa informan menyampaikan bahwa hingga kini belum terdapat sistem pengelolaan sampah yang terstruktur dan warga masih membuang atau membakar sampah secara mandiri (05-17KO2; 05-18KO2). Seorang warga lansia menyebut bahwa sampah sering dibuang di jalan atau kali, dan persoalan ini semakin terlihat dengan bertambahnya jumlah penduduk (05-22KO2). Menambahkan bahwa jalanan sepanjang Weda ke Lelilef yang melewati Kobe berserakan sampah sepanjang 15-30 kilometer.

Hal ini juga ditunjukkan pada catatan observasi dan sejumlah FGD yang memperlihatkan banyaknya sampah rumah tangga di tepi ruas jalan utama. Beberapa informan termasuk kader posyandu dan pemilik UMKM menyoroti pengelolaan sampah masih belum maksimal karena ketiadaan tempat pembuangan sampah dan juga mobil untuk mengangkut sampah (05-15SI2; 05-09SI2; 05-12SI2).

"Di sini sampah ini juga belum ada tempat. Jadi sering banyak taruh karung lalu taruh di jalan-jalan. Karena banyak kos-kosan perlu ada pemerintah daerah yang mensosiliasikan juga supaya jangan buang sampah di jalan....." (05-09SI2, Pedagang, Laki-laki, 55 tahun)

Meski demikian, salah satu tokoh pemuda mengungkapkan bahwa mobil angkutan untuk sampah pernah tersedia, namun sudah tidak berfungsi.

"Sebenarnya sudah ada oto sampah lalu mobilnya rusak karena kecelakaan." (05-13KO2, Tokoh pemuda, Laki-laki, 30 tahun)



Gambar 13. Sampah Berserakan di Jalan Utama Weda-Lelilef (Kawasan sekitar Kobe dan Sawai Itepo)

2.5 Usulan Berulang dan Realisasi Terbatas dalam Pemenuhan Layanan Dasar

Selain kondisi sektoral layanan dasar, **pengalaman warga juga memperlihatkan pola kemacetan dalam proses pengusulan dan realisasi program.** Secara formal, sejumlah informan menyebut bahwa kebutuhan layanan dasar telah dibahas melalui forum musdus, musdes, dan musrenbang. Seorang aparat desa menyampaikan bahwa usulan terkait air bersih, perumahan, hingga perbaikan tikungan jalan yang rawan telah diajukan secara rutin dalam forum tersebut (05-01SI2; 05-07KO2). Proposal juga disebut telah dibuat dan disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Namun demikian, **realisasi program dinilai tidak selalu sebanding dengan jumlah usulan yang diajukan.** Seorang aparat desa menyebut bahwa dari sekitar sepuluh program yang diusulkan, biasanya hanya satu atau dua yang disetujui atau direalisasikan (05-01SI2). Informan lain menyampaikan pengalaman serupa, bahwa usulan telah disampaikan tetapi belum seluruhnya mendapatkan tindak lanjut (05-07KO2). Petugas kesehatan juga telah menyampaikan keluhan perbaikan pustu yang sudah bocor, akan tetapi menurutnya kepala desa tidak kunjung memberikan realisasi (05-19SI2).

"Dari sepuluh program yang diajukan, hanya satu atau dua yang disetujui." (05-01SI2, Pedagang, Perempuan, 58 Tahun)

Keterbatasan anggaran disebut sebagai salah satu kendala utama. Seorang tokoh agama menyampaikan bahwa realisasi sering terhambat karena kapasitas anggaran desa yang terbatas (05-03KO2). Selain itu, perubahan mekanisme pembangunan—misalnya dari swakelola desa menjadi sistem tender—juga dianggap memengaruhi proses pelaksanaan program (05-16SI2).

Meski begitu, salah satu interlokutor lebih melihat adanya masalah dalam plotting anggaran dana desa (Refleksi Harian). Hal ini diamati dari bagaimana dana yang sudah disalurkan oleh pemerintah daerah ke desa belum teralokasikan secara transparan (05-24KO2; Refleksi Harian). Akibatnya banyak warga yang tidak tahu mengapa bantuannya dihentikan secara tiba-tiba dan menimbulkan sentimen kecurigaan pada perangkat desa.

Di sisi lain, **tidak semua warga merasa terlibat atau mengetahui proses pengusulan tersebut.** Seorang pemilik UMKM menyampaikan kebingungannya mengenai kepada siapa harus menyampaikan kebutuhan layanan dasar, serta belum pernah diundang dalam sosialisasi tertentu (05-09SI2). Seorang buruh penyandang disabilitas juga menyebut bahwa dirinya hanya dipanggil untuk menerima bantuan (05-19KO2).

"Tidak pernah (diajak diskusi). Dipanggil ke desa hanya untuk terima bantuan." (05-19KO2, Penyedia Jasa dengan Disabilitas; Laki-laki; 20 tahun)

Selain mekanisme desa, beberapa informan menyebut bahwa tidak terdapat diskusi khusus dari pihak perusahaan terkait kebutuhan layanan dasar masyarakat. Bantuan yang ada dinilai lebih bersifat respons terhadap permintaan tertentu dibandingkan hasil perencanaan bersama (05-20SI2).

Proses usulan dan realisasi ini meninggalkan sejumlah ruang untuk perbaikan. Sebagian warga mengharapkan agar penggunaan dana desa bisa lebih tepat sasaran (05-24KO2; FGD Pemuda; 05-01KO2; 05-03KO2). Salah satu interlokutor mengusulkan harus ada pembinaan terhadap penganggaran dan transparansi komunikasi dari pemerintah kepada perangkat desa (Refleksi Harian). Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan tahapan yang lebih dari sekadar mendata, tapi juga memberikan evaluasi dan mengawal khususnya kelompok rentan (Refleksi Harian).

RQ 3: PPM/CSR

3.1 Variasi dari Bentuk Dukungan yang Pernah Diterima Menjadi Tolok Ukur

Beroperasinya tambang memberi keuntungan di luar akses ke pekerjaan untuk sebagian masyarakat. Khususnya dalam bentuk dukungan melalui bantuan PPM/CSR dari perusahaan. Pengamatan warga terhadap praktik PPM/CSR tidak lepas dari perbandingan periode perusahaan sebelumnya dengan kondisi yang berjalan saat ini.

Pada masa operasional Tekindo dan Weda Bay, bantuan dinilai lebih bersifat rutin dan langsung menyasar rumah tangga. Beberapa warga menyebut distribusi sembako secara berkala, insentif bagi lansia, pencegahan stunting, dan insentif tunai langsung (05-14SI2; 05-21KO2; 05-16SI2; 05-04KO2; 05-05SI2; 05-05KO2; 05-17SI2). Bantuan sembako banyak disebutkan dalam bentuk Beras 5 kg, Minyak Kelapa 2 liter, dan Gula 1 kg. Petugas kesehatan juga menyebutkan bahwa bantuan ini termasuk pencegahan stunting berupa telor, vitamin, kacang hijau, gula merah, susu ibu hamil (05-21KO2). Sedangkan uang tunai pada lansia diberikan sebesar Rp300.000 per orang (05-22KO2).

Frekuensi bantuan langsung pada periode Tekindo dan Weda Bay diamati memiliki pola waktu yang lebih beragam. Salah satu petani lansia menyebutkan sembako hanya diterima satu kali dalam setahun saat perayaan natal (05-14SI2). Petani yang lain menyebutkan bantuan ini diterima dari tahun 2023 sampai 2025 (05-02KO2).

Sedangkan salah satu aparat desa menyebutkan bahwa bantuan ada sejak tahun 2022 dan diberikan setiap bulan (05-01SI2). Kemudian salah satu peserta dari FGD campuran dan mantan pekerja tambang menyebutkan bahwa insentif tunai diterima oleh seluruh warga dibagi setiap KK yang diterima dua kali dalam setahun (FGD campuran; 05-22KO2). Seorang tokoh adat perempuan hanya mengingat CSR berupa sembako dan uang tunai bagi masyarakat lingkar tambang sebelum tahun 2025 (05-01KO2).

"Dulu ada Fee CSR berdasarkan kapal tongkang yang masuk (Bagi per KK) sebanyak 146 KK" (05-03KO2, Tokoh Agama, Laki-laki, 43 tahun)

Penyaluran bantuan pada periode sebelumnya dianggap tidak hanya mengandalkan bantuan langsung, tetapi mencakup hingga program yang lebih terstruktur. Seorang pengurus lembaga kemasyarakatan desa menjelaskan adanya program agribisnis di mana hasil sayur masyarakat dibeli langsung oleh perusahaan dengan pendampingan (05-12SI2). Mantan aparat desa menyebut masyarakat menerima pelatihan kerajinan selama satu bulan yang hasilnya dipasarkan kembali melalui perusahaan hingga mendapatkan keuntungan (05-24KO2).





Gambar 12. Salah Satu Bangunan Sekolah SDN Kobe
(Sumber: Instagram @btn_aketajawelolobata)

Salah satu mantan pekerja tambang juga menambahkan informasi tentang pengelolaan bantuan pelatihan, "Ada yayasan saloi tapi sepertinya sudah tidak hidup lagi. Dikelola oleh desa, ada manajer, ada pengurusnya. Tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat. Dibiayai oleh eramet (weda bay)" (05-22KO2). Dirinya juga mengingat bahwa perusahaan menyediakan dokter kontrak, tenaga guru honor sebanyak 4 orang, serta dukungan bus sekolah yang digunakan oleh dua desa (05-22KO2). Di sisi lain, peserta FGD Pemuda menyebutkan adanya bantuan pendidikan dan bantuan usaha budidaya perikanan dari program CSR Wedabay dan Tekindo (FGD Pemuda).

"Sebelumnya tekindo buat program kelompok ibu-ibu. Dua desa ini dalam 1 minggu 2 hari orang kobe berjualan ke sana, 2 hari dari sawai itepo berjualan ke sana. Jadi buat kelompok 10 orang maksimal. Jadi hasil bumi bisa terserap karena langsung diambil di sana, yang penting kasih catatan hasil bumi ini berapa banyak. Sekarang sudah tidak ada, setelah IWIP ini mereka tidak pakai supplier dari lokal seperti kami." (05-12SI2, Perempuan, Petani & Tokoh Masyarakat, Perempuan, 55 tahun)

Bantuan lainnya yang pernah diterima masyarakat juga termasuk bantuan melalui proposal. Salah satu testimoninya mengatakan bahwa pengajuan proposal dari desa ke perusahaan menghasilkan program pemberdayaan berupa kandang ayam dan pembuatan pagar desa di tahun 2016-2017 (05-22KO2).

3.2 Pergeseran Model PPM/CSR Muncul Sebagai Akibat dari Transisi Perusahaan

Warga desa mengakui telah menerima bantuan pada saat IWIP beroperasi. **Sebagian besar bantuan pada periode IWIP disebut berbentuk material fisik**, seperti semen, pasir, batu kerikil, paving blok, AC, komputer, serta material untuk rumah ibadah dan sekolah (05-12SI2; 05-17SI2; 05-20SI2). Seorang guru menyebut sekolah menerima AC dan komputer masing masing sebanyak 2 unit untuk SD dan 12 unit untuk SMP, sementara bidan desa menyampaikan pustu juga memperoleh AC dan perangkat pendukung (05-04SI2; 05-21SI2).

Namun dalam praktiknya, pemanfaatan bantuan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Seorang petugas kesehatan menjelaskan bahwa komputer yang diterima tidak dapat langsung digunakan:

"Baru-baru saja buat proposal lalu dikasih AC lalu komputer. Tapi komputer ini tidak bisa dipakai, bahasa Cina semua." (05-21KO2, Petugas Kesehatan, Perempuan, 40 tahun)

Pengalaman serupa muncul dalam jumlah bantuan yang diterima. Seorang pendeta menyebut pernah mengajukan empat unit AC, tetapi yang datang hanya dua unit tanpa penjelasan rinci selain permintaan maaf dari pihak eksternal perusahaan (05-03SI2).

Di sisi lain bantuan material bangunan justru terlihat pada masyarakat tertentu. Salah satu perangkat desa yang juga petani mengakui adanya bantuan berupa seng, semen, dan batu bata dari IWIP (05-20SI2). Pernyataan lain dari pemilik UMKM juga mengonfirmasi hal ini, namun belum diketahui secara jelas sasaran dari bantuan material yang ditujukan pada rumah tangga secara langsung (05-09SI2).

"Pernah dengar bantuan perusahaan dari IWIP. Kalau lahannya dibayar mereka dapat jatah semen sekitar 2 ton dan material pasir serta batu kerikil, serta paving blok" (05-09SI2, Pedagang, Laki-laki, 55 Tahun)

Di luar itu, variasi lain juga menujukkan **pola bantuan yang diberikan oleh IWIP lebih menyasar pada kebutuhan umum.** Warga menerima dukungan lingkungan, pendidikan, dan infrastruktur. Dukungan terhadap pendidikan yang dinyatakan oleh salah satu peserta FGD perempuan berupa seragam sekolah gratis (FGD Perempuan).

Salah satu mantan aparat desa menyebutkan "Jalan bagus IWIP yang buat, dan ada pembuatan pagar beton di pinggir jalan 50 meter" (05-24KO2). Bantuan untuk kesenian daerah diberikan dalam bentuk uang pembinaan terhadap sanggar kesenian, pakaian adat, hingga alat musik tradisional (05-13SI2; 05-24KO2; 05-12KO2)

Penanaman mangrove sebanyak 1000 pohon di pantai kobe melalui program persemaian juga dilakukan dan didukung langsung oleh gubernur (05-13SI2). Program mangrove juga dikonfirmasi oleh mantan aparat desa:

"Penanaman pohon pernah ada dari IWIP langsung datang mengatur penanaman. Masyarakat lokal yang bekerja. Setiap hari penanaman. Target 100 pohon. Biaya atau upah ditanggung oleh IWIP setiap bulan." (05-24KO2, Mantan Aparat Desa, Laki-laki, 52 tahun)



Dari segi frekuensi, bantuan dari IWIP diberikan terlihat dalam pola tahunan yang berbeda-beda. Salah satu pekerja industri mengungkapkan bahwa bantuan saat ini lebih sering muncul pada momentum tertentu, seperti hari raya keagamaan (05-12KO2), atau dalam bentuk satu kali distribusi tahunan. Sedangkan bantuan yang diterima oleh gereja didapatkan sebanyak dua kali dalam setahun (05-03SI2). Keterangan dari petugas kesehatan dan guru juga menyatakan bahwa bantuan diberikan satu tahun sekali selama ada rekomendasi dari dinas atau puskesmas terlepas dari hari raya keagamaan (05-19SI2; 05-21KO2; 05-47KO2).

3.3 Partisipasi dan Akses Informasi dalam PPM dan CSR

Selain bentuk dan keberlanjutan program, temuan juga menunjukkan bahwa **persoalan partisipasi dan akses informasi menjadi isu tersendiri dalam pelaksanaan PPM/CSR**. Seorang guru menyatakan pernah dilakukan sosialisasi dari perusahaan namun hanya berkaitan dengan penanganan sampah dan tidak menyediakan bantuan apapun terkait CSR dan PPM (05-04SI2). Sejumlah informan lain menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam diskusi atau konsultasi terkait program perusahaan. Dalam FGD pemuda disebutkan bahwa mereka *"belum pernah dilibatkan dalam diskusi, pertemuan, atau konsultasi apa pun yang diadakan oleh perusahaan."* Pernyataan serupa juga muncul dari nelayan lansia yang menyebut belum pernah mendengar penjelasan jelas mengenai CSR maupun menerima bantuan (05-10SI2).

Bahkan di beberapa FGD disebutkan bahwa masyarakat hanya mengetahui adanya CSR secara umum, tetapi tidak memahami jenis kegiatan maupun mekanisme penyalurannya (FGD Perempuan; FGD Pemuda). Beberapa informan juga menyampaikan bahwa tidak terdapat sosialisasi khusus mengenai delapan area PPM/CSR pada periode saat ini (05-20SI2).

Sejumlah informan juga menyinggung pola sosialisasi dan komunikasi pada periode sebelumnya. Seorang perangkat desa menyebut bahwa CSR era Weda Bay dan Tekindo mencakup rumah ibadah, pendidikan, dan kesehatan dengan penyampaian langsung ke desa (05-20SI2). Informan lain mengingat adanya konsultan yang datang melakukan survei dan koordinasi untuk program PPM tanam bibit dan perikanan sebelum program dijalankan (05-22KO2). Dalam beberapa kasus, pengajuan surat atau kebutuhan desa disebut dapat segera ditindaklanjuti dalam waktu relatif cepat yaitu sekitar satu minggu sejak proposal diterima (05-24KO2).

"Dulu Tekindo datang ke sini sosialisasi dan kasih CSR... sampai antar jemput sekolah berupa bis itu juga diberikan dulu" (05-12KO2, Pekerja Industri, Laki-laki, 32 Tahun)

Di sisi lain, terdapat pengakuan bahwa pada periode sebelumnya, perusahaan datang langsung melakukan sosialisasi atau survei kebutuhan, serta koordinasi dengan desa (05-12KO2; 05-22KO2; 05-47KO2). Walaupun pengalaman tersebut juga beragam di antara masyarakat, salah satu IRT menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah mendapat sosialisasi dari Tekindo Maupun WBN tentang CSR tetapi hanya menerima bantuan saja (05-16SI2).

Hal serupa juga terjadi pada nelayan lansia yang tidak dilibatkan musyawarah, menurut keterangannya pihak perusahaan hanya mengambil data langsung dari pemerintah desa (05-04KO2).



Informasi tentang program saat ini dinilai sering berhenti di tingkat desa. Dibandingkan dengan proses sosialisasi pada era perusahaan Weda Bay dan tekindo, seorang kader posyandu (05-15SI2) menyatakan bahwa "IWIP hanya sampai ke desa, informasi tidak sampai ke masyarakat." Dalam praktiknya, bantuan lebih sering berbasis proposal yang diajukan oleh desa, gereja, atau institusi tertentu (05-12SI2; 05-11SI2; 05-04SI2). Guru sekaligus perangkat desa menyebut bahwa bantuan biasanya diberikan setelah ada pengajuan resmi, bukan dalam bentuk program rutin (05-17SI2). Mekanisme ini dipahami sebagai prosedur administratif, tetapi tidak selalu disertai ruang dialog terbuka mengenai kebutuhan prioritas masyarakat.

"Ini sifatnya proposal, mengajukan. Berbeda dari Tekindo, kalau mereka ini langsung setiap bulan kirim sembako… sekarang lewat proposal." (05-17SI2, Aparat Desa, Laki-laki, 31 Tahun)

Pemberian bantuan tanpa adanya diskusi bersama juga tercermin pada beberapa program yang pernah dilakukan. Pada penanaman mangrove, salah satu nelayan menyatakan "Reboisasi mangrove kita tidak dilibatkan dalam perencanaan, langsung ada saja programnya" (05-04KO2).

Sementara itu, **metode penyaluran atau aktor penghubung bantuan dari perusahaan kepada masyarakat juga diduga berpengaruh pada kecepatan penerimaan bantuan.**

Seorang tokoh agama menyampaikan pengalamannya di desa lain yaitu Transkobe yang sangat lambat mendapatkan realisasi bantuan dari IWIP dibandingkan Sawai Itepo (05-03SI2).

"Ada sedikit perbedaan saat realisasi CSR, misalnya di sini bisa cepat tapi di Transkobe itu sangat lama…Di sini mengajukannya 6 bulan sekali kemudian akan dipenuhi 1 bulan setelahnya." (05-03SI2, Tokoh Agama, Perempuan, 42 Tahun)

Salah satu keterangan perangkat desa menyebutkan bahwa pengaduan proposal membutuhkan "jalur belakang" untuk mendapatkan respon terhadap usulan program (05-14KO2). Tetapi ia juga menambahkan bahwa keterbatasan SDM di desa membatasi mereka memiliki kedudukan yang berpengaruh di dalam perusahaan (05-14KO2). Hal ini dikonfirmasi oleh petugas kesehatan yang menerima bantuan dari perusahaan di luar dari jalur yang umum,

"Proposal bisa dari pustu langsung, kalau dari desa ribet nanti lama lagi. Sampai kemarin orang-orang lain bertanya-tanya, bagaimana bisa dapat bantuan. Lalu saya jawab buat proposal saja….kepala desa bilang, sudah yang penting datang dulu barangnya nanti kita cari tukangnya…saya kasih karena ada orang dalam, bukan lewat humas." (05-19SI2, Petugas Kesehatan, Perempuan, 35 Tahun)



Peran humas sebagai penghubung desa dan perusahaan juga menjadi bagian dari dinamika ini. Beberapa informan menyebut keberadaan humas sebagai penghubung formal, tetapi efektivitasnya dipertanyakan. Seorang pekerja industri (05-12KO2) menyatakan bahwa humas "tidak pernah ada rapat besar dengan masyarakat" dan dinilai kurang menyampaikan perkembangan proposal atau aspirasi warga. Informan lain (05-22KO2) bahkan menyebut humas tidak tinggal di desa sehingga tidak mengetahui kondisi sosial sehari-hari. Sementara itu, seorang aparat desa (05-01SI2) menyatakan bahwa sudah ada penghubung atau perwakilan perusahaan, tetapi proposal yang diajukan belum memperoleh tindak lanjut yang jelas. Walaupun keterangan lain dari seorang guru menyebutkan bahwa meskipun sebelumnya pernah ada humas pada era Tekindo tapi perusahaan juga tidak melakukan sosialisasi (04-04SI2).

3.4 Keberlanjutan Program yang Terputus Antar Waktu

Perubahan perusahaan atau manajemen membawa konsekuensi pada keberlanjutan program. Beberapa program yang sebelumnya berjalan secara rutin disebut berhenti tanpa kejelasan kelanjutan. Program sembako menjadi salah satu contoh yang paling sering disebut. Seorang tokoh adat (05-12SI2) menyampaikan bahwa bantuan sembako yang sebelumnya diterima tidak lagi terlihat dalam dua bulan terakhir. Informan lain menyebut bahwa bantuan bulanan yang dahulu diterima secara rutin kini tidak lagi berjalan (05-18KO2; 05-04KO2).

Dalam FGD perempuan, disebutkan bahwa bantuan bagi lansia dari Tekindo pernah diberikan setiap bulan, namun tidak lagi berlanjut pada periode berikutnya. Salah satu pemilik warung juga menegaskan "Dulu ada bantuan sembako dari Tekindo setiap bulan... sekarang sudah tidak ada lagi" (05-18KO2).

Dalam FGD campuran, peserta menyebut pernah menerima bantuan pendidikan dan kesehatan dua kali dalam setahun, namun tidak lagi merasakan pola yang sama pada periode saat ini.

Situasi serupa muncul pada program transportasi sekolah. Seorang guru menjelaskan bahwa ketika bus sekolah dihentikan, jam masuk siswa berubah dan sebagian harus berjalan kaki (05-04SI2). Hal ini juga dinyatakan oleh pekerja industri "....Ketika Tekindo ini berhenti, pelayanan bus ini hilang" (05-12KO2).

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, seorang pengurus lembaga kemasyarakatan desa menyampaikan bahwa program agribisnis yang sebelumnya menyerap hasil bumi masyarakat kini sudah tidak berjalan. Hasil panen yang dahulu dibeli langsung oleh perusahaan tidak lagi terserap, dan masyarakat kesulitan menjual ke pasar lain (di Weda atau Lelilef) karena persaingan dengan pedagang dari luar (05-12SI2). Mantan aparat desa juga menyebut bahwa kelompok pengrajin sudah tidak berjalan karena ketiadaan modal lanjutan (05-24KO2).



Selain penghentian pada program, **kemacetan juga terjadi pada pengusulan program baik untuk meneruskan keberlanjutan program maupun usulan bantuan yang baru.** Dalam kasus lain, proposal yang telah diajukan untuk infrastruktur desa dan lapangan olahraga belum memperoleh tanggapan hingga saat ini (05-17SI2; 05-20KO2). Infrastruktur berupa jalan desa disebut akan dibangun sejak tahun 2024, akan tetapi hal tersebut tidak pernah diproses (05-17SI2).

"Pernah ada bantuan lapangan bola dan voli. Sudah disiapkan lahan tapi tidak lanjut. Desa sudah bayar lahan. Perusahaan menyediakan alat berat, inisiatif dari pemuda melapor ke desa. Desa mengajukan ke perusahaan. Tidak ada tanggapan" (05-20KO2, Buruh, Laki-Laki, 24 tahun)

Salah satu mantan aparat desa menyatakan bahwa IWIP pernah memodali pembuatan jembatan senilai Rp 1 Milyar tetapi belum berjalan (05-24KO2). Seorang guru menyebut bahwa usulan untuk melanjutkan dukungan transportasi telah diajukan kembali, tetapi belum terlihat tindak lanjut (05-04SI2). Bahkan kader posyandu juga turut menyebutkan bahwa perusahaan memiliki rencana memberikan bantuan air bersih namun belum terealisasi hingga kini (05-06KO2).

"Sudah menyurat ke IWIP untuk bis sekolah tapi tidak tahu apakah sudah diproses… harusnya berlanjut seperti yang sebelumnya." (05-17SI2, Guru dan Aparat Desa, Laki-Laki, 48 tahun)

3.5 Ketidakmerataan dan Aspirasi Tata Kelola Kolaboratif

Pengalaman masyarakat terhadap distribusi bantuan saat ini menunjukkan variasi yang cukup lebar. Beberapa informan menyebut bantuan tersedia, tetapi tidak merata atau tidak tepat sasaran. Seorang perangkat desa menyampaikan bahwa bantuan yang disalurkan melalui desa kerap menimbulkan persoalan di tingkat penerima (05-14KO2).

"Bantuan yang tidak tepat sasaran itu juga perlu diperbaiki. Karena kalau lewat pemerintah desa habis." (05-14KO2, Aparat Desa, Laki-laki, 32 Tahun)

Beberapa informan menyebut adanya insentif khusus bagi kepala desa dari perusahaan. Seorang nelayan menyampaikan bahwa kepala desa menerima sekitar Rp750.000 per bulan dari perusahaan, sementara perangkat lain tidak memperoleh skema serupa (05-04KO2). Salah satu pekerja tambang mengaitkan informasi ini dengan situasi humas desa yang ditunjuk oleh kepala desa dan digaji oleh perusahaan (05-12KO2).

Masalah pada pemanfaatan bantuan juga terjadi dalam bentuk penyelewengan. Seorang pemilik UMKM lansia menjelaskan bahwa bantuan material seperti semen dan paving blok kadang dijual kembali oleh penerima (05-09SI2). Pandangan serupa muncul dari seorang petani yang juga aparat desa, yang menyinggung adanya praktik penyalahgunaan bantuan di tingkat masyarakat sehingga distribusi berikutnya menjadi terbatas (05-20SI2).

"Penyakit jual bantuan ini juga terjadi di Sawai Itepo sehingga ada beberapa orang yang tidak lagi diberikan." (05-20SI2, Petani dan Pemerintah desa, Laki-laki, 50 tahun)

Di tengah pengalaman distribusi yang dinilai belum merata, **masyarakat juga menyampaikan bantuan yang dianggap belum tersedia atau belum menjawab kondisi aktual.** Seorang pekerja industri menyatakan bahwa perusahaan belum pernah memberikan bantuan air bersih meskipun sudah disampaikan melalui pemerintah (05-12KO2). Salah satu perangkat desa juga menyinggung sejauh ini belum ada bantuan sebagai upaya mengembalikan kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi (05-20SI2).

"Perusahaan tidak pernah kasih bantuan air di Kobe. Pemerintah sudah pernah disampaikan ke mereka tapi tidak ada respon." (05-12KO2, laki-laki, Pekerja industri, 35 tahun)

Seorang petani menyampaikan bahwa masyarakat lingkar tambang seharusnya memperoleh insentif tambahan karena biaya hidup meningkat (05-02KO2). Sementara itu, seorang guru menilai bahwa sekolah belum menerima dukungan langsung dalam bentuk uang tunai maupun bantuan bangunan (05-05KO2). Salah satu perangkat desa bahkan mengusulkan agar pola bantuan seperti masa sebelumnya dikembalikan (05-14KO2) .

"Kembalikan fee desa, menggaji masyarakat lingkar tambang. CSR-nya disamakan dengan Tekindo... Kasih kembali bis sekolah." (05-14KO2, Aparat desa, Laki-laki, 32 Tahun)

Selain tuntutan pada level desa, muncul pula aspirasi tata kelola yang lebih sistematis. Seorang pekerja industri yang memiliki pengalaman di daerah lain menyampaikan pentingnya forum CSR di tingkat provinsi dan penyusunan blueprint PPM yang terintegrasi dengan RIPPM perusahaan (05-23KO2). Ia juga menekankan perlunya social mapping sebelum program dijalankan sebagai berikut,

"Setiap perusahaan itu harus social mapping dulu sebelum melakukan apa-apa. Supaya dia tahu potensi apa yang bisa kita gali dari masyarakat." (05-23KO2, Pekerja Industri, Laki-laki, 48 Tahun)

Lebih lanjut, salah satu aparat desa yang juga merupakan petani menegaskan bahwa seharusnya kepala dinas **mendorong pihak perusahaan agar memberikan pembaruan informasi mengenai proposal yang sudah diajukan** (05-01SI2). Hal ini juga disuarakan oleh salah satu nelayan dan juga pemilik UMKM bahwa harus ada komunikasi antara desa, perusahaan, dan pemerintah. Bagi mereka, komunikasi tidak bisa jika hanya mengandalkan perwakilan (05-09SI2; 05-04KO2).



RQ 4: Pemahaman dan Kesiapan Pascatambang

4.1 Persepsi Dampak Pascatambang Diamati dari Pemahaman dan Pengalaman

Pemahaman terhadap pasca tambang dan pengalaman hidup sehari-hari, menunjukkan bagaimana sejumlah informan menggambarkan **pascatambang sebagai kondisi yang tidak sepenuhnya dipahami sebagai krisis.** Kelompok masyarakat ini terlihat dalam dua bentuk, yaitu kelompok yang membayangkan adanya dampak tetapi masih dapat dijalani, serta kelompok yang merasa tidak terlalu terdampak secara langsung.

Sebagian informan mengakui bahwa **ketika tambang berhenti akan terjadi perubahan ekonomi, namun mereka tidak menggambarkannya sebagai tantangan besar.** Seorang Guru menyebut bahwa jika tambang berhenti, usaha kos-kosan kemungkinan menurun, tetapi masyarakat masih bisa kembali berkebun atau melaut seperti sebelumnya (05-04SI2). Dalam FGD pemuda, peserta juga menyatakan bahwa sebagian warga kemungkinan kembali ke mata pencaharian lama, meskipun pendapatan mungkin tidak sebesar saat tambang aktif. Pemilik kios menyebut bahwa sebelum tambang hadir, masyarakat sudah memiliki pola hidup tertentu dan kemungkinan akan kembali ke pola tersebut (05-07KO2).

Menurut saya kalau tambang ini ditutup, tidak terlalu jadi masalah… tapi berbeda sekali dengan kemarin-kemarin." (05-07KO2, Pemilik kios dan Tokoh Agama, Laki-laki, 35 tahun)

Sebagian informan lain menyatakan bahwa pascatambang tidak akan terlalu memengaruhi kehidupan mereka secara langsung. Persepsi ini terutama muncul dari nelayan dan petani yang masih memiliki akses terhadap sumber penghidupan non-tambang.

"Karena kami nelayan jadi setelah pascatambang itupun kami akan tetap menjadi nelayan. Tidak terlalu berpengaruh…" (05-04KO2, Laki-laki, Nelayan, 34 Tahun)

Nelayan lain yang merupakan lansia juga menyebut bahwa yang paling terdampak adalah pegawai tambang dan kontraktor, sementara masyarakat yang tetap bekerja di laut tidak banyak berubah (05-08KO2). Perempuan petani menyatakan bahwa kebutuhan hidupnya tidak bergantung pada perusahaan karena masih memiliki kebun (05-12SI2). Seorang informan dari tokoh agama juga menilai bahwa dampak terutama dirasakan oleh pekerja tambang, bukan seluruh masyarakat (05-03KO2).

Gambar 14. Perahu nelayan bersandar di pesisir Desa Sawai Itepo



4.2 Bayangan Pascatambang Masyarakat

Di samping pandangan yang memisahkan dampak pascatambang dengan penghidupan, sebagian masyarakat juga melihat **pascatambang sebagai potensi melemahnya perekonomian desa secara menyeluruh yang dekat dengan kehidupan mereka.** Kekhawatiran ini tidak hanya merujuk pada hilangnya pekerjaan di sektor tambang, tetapi juga pada efek berantai terhadap usaha-usaha yang tumbuh mengikuti aktivitas perusahaan. Guru sekaligus pemilik kios menyebut bahwa kos-kosan dan kios akan kehilangan penyewa dan pembeli utama ketika pekerja pergi (05-11KO2).

Salah satu pemilik UMKM juga menggambarkan kondisi serupa, menurutnya usaha kayu yang sedang dikerjakan akan sangat terdampak karena menurunnya permintaan (05-09SI2). Seorang perwakilan perangkat desa menilai dampak paling besar akan dirasakan di wilayah ring satu, tempat konsentrasi aktivitas pekerja dan usaha pendukung lebih tinggi (05-14KO2). Dalam FGD pemuda, peserta menyebut bahwa penurunan pendapatan masyarakat dan melemahnya ekonomi lokal akan menjadi dampak utama ketika tambang berhenti.

"Kalau tambang tutup, kita jadi susah. Mata pencaharian terputus. Tingkat pencurian meningkat demi kebutuhan" (05-24KO2, Mantan Aparat Desa, Laki-laki, 52 Tahun)

Pekerja industri bahkan mengaku takut membayangkan situasi tersebut karena ketergantungan ekonomi yang telah terbentuk, termasuk kekhawatiran terhadap hilangnya pendapatan pribadi (05-12KO2).

"Mau dapat doi dari mana? Sengsara. Lapangan pekerjaan ini akan kosong. Saya tidak sadar ni bisa terjadi juga ya. Penghasilan saya akan drop pasti. Kebutuhan dalam desa ini kalau terlalu manja dengan perusahaan akan susah. Bahkan sebelum membayangkan perusahaan tutup, untuk resign saja saya takut. Pertanyaan ini saya tidak bisa jawab. Ini akan bahaya." (05-12KO2, Pekerja Industri, Laki-Laki, 35 tahun)

Kekhawatiran ini sering dikaitkan dengan pengalaman Pulau Gebe. Nelayan lansia dan aparat desa sama-sama merujuk pada Pulau Gebe sebagai gambaran ketika perusahaan berhenti dan perekonomian lokal menurun drastis setelah sebelumnya berkembang pesat (05-10KO2 ; 05-17SI2). Salah satu tokoh adat juga menyatakan bahwa ada penduduk desa yang pernah tinggal di Gebe dan sudah terbayang betapa akan sengsaranya jika tambang berhenti (05-12SI2). Salah satu IRT yang baru menikah juga mengkhawatirkan apa yang terjadi di Gebe karena suaminya berasal dari sana (05-16SI2).

"Hancur ini pasti... Kita bisa contoh Gebe, gebe itu dulu orang senang mobil rumah semua ada. Tapi saat perusahaan pergi ini semua hancur." (05-10KO2, Nelayan, Laki-Laki, 68 tahun)

Di sisi lain, terdapat pandangan yang lebih ambivalen. Guru menyebut bahwa dari sisi lingkungan, penghentian tambang mungkin membawa perbaikan kualitas air dan hutan, namun dari sisi ekonomi dampaknya akan "plus minus" karena nilai tanah dan usaha kos-kosan bisa merosot tajam (05-04SI2). Dalam FGD pemuda, peserta juga menyebut potensi banjir akibat perubahan tata lahan jika tidak ada pengelolaan yang baik setelah tambang berhenti.



4.3 Hilangnya Lahan dan Hambatan untuk Kembali pada Ekonomi Lama

Tantangan yang terjadi pada pascatambang banyak dikaitkan dengan kondisi lahan yang sudah terjual. Salah satu lansia pemilik warung juga menjelaskan bahwa Seorang petani dan kader posyandu menekankan bahwa kondisi pascatambang akan membawa pada kehancuran dan kesengsaraan.

"Kalau tambang ramai-ramai cabut ini palakabebe (kepala katak), sengsara karena tanah sudah dijual semua. Tidak mungkin mereka kembalikan tanahnya juga. Jadi kita akan hidup miskin dan menderita. Karena uang 1 kontainer tidak akan menjamin seumur hidup juga." (05-06KO2, Petani, Perempuan, 47 tahun)

Guru bahasa merupakan perangkat desa menyebut kemungkinan desa menjadi sepi dan perekonomian mati (05-47KO2). Mantan pegawai tambang mengkhawatirkan potensi konflik ketika masyarakat mulai menagih kembali lahan yang telah dijual (05-22KO2). Kekhawatiran terhadap generasi berikutnya turut muncul. Lansia pemilik warung menyatakan bahwa tanah yang telah banyak dijual membuat mereka khawatir keturunan tidak memiliki cadangan aset di masa depan (05-07SI2).

"Kalau tambang tutup sekarang mungkin akan perang. Masyarakat akan menagih lahan-lahan yang sudah dijual." (05-22KO2, Petani, Laki-Laki, 60 tahun)

Sementara pandangan seorang guru menyebut **kekhawatiran terhadap kemungkinan penggusuran di masa depan** ketika kepemilikan lahan telah berpindah tangan (05-04SI2). Sementara itu, guru bahasa yang juga mantan aparat desa menilai bahwa semakin luas wilayah tambang, semakin kecil ruang masyarakat untuk bertahan di atas lahan sendiri (05-18SI2).

"Kekhawatiran saya kalau tanah di hutan ini sudah dibeli semua, suatu saat tanah di sekolah ini akan diusir." (05-04SI2; laki-laki; guru; 39 tahun)

Salah satu informan membedakan sistem jual beli lahan saat ini dengan pola kontrak (05-17SI2). Seorang perempuan petani menilai bahwa uang hasil penjualan lahan tidak menjamin keberlangsungan hidup jangka panjang jika suatu saat tambang ditutup (05-06KO2).

"Ini akan jadi kota mati nantinya, karena ini sistemnya bukan tanahnya dikontrak tapi jual mati begitu." (05-17SI2, Tenaga Pendidik, Laki-Laki, 48 tahun)

Selain kekhawatiran terhadap melemahnya ekonomi desa, sejumlah informan menyoroti persoalan yang lebih struktural berupa **ketiadaan lahan sebagai modal untuk kembali ke pola ekonomi lama setelah tambang berhenti.** Dalam banyak wawancara, penjualan lahan disebut sebagai keputusan yang kini membatasi pilihan mata pencaharian di masa depan.

Petani sekaligus aparat desa menyampaikan bahwa masyarakat telah menjual sebagian besar lahan, sementara wilayah belakang desa berbatasan dengan taman nasional sehingga tidak mudah untuk kembali membuka kebun (05-20SI2). Nelayan lansia juga menyebut bahwa tanah sudah tidak tersedia lagi untuk digarap ketika tambang berhenti (05-10SI2).

"Masyarakat akan mengalami kesulitan jika tambang sudah tidak ada, karena tanah sudah habis dan tidak tersedia lagi lahan untuk digarap." (05-10SI2, Nelayan, Laki-Laki, 64 tahun)

Pandangan serupa muncul dari nelayan lain yang menyatakan bahwa petani akan lebih kesulitan karena tidak lagi memiliki lahan (05-04KO2).

4.4 Strategi dan Adaptasi Masyarakat Menghadapi Pascatambang

Di tengah berbagai bayangan mengenai pascatambang, sejumlah informan juga menyampaikan upaya yang mereka pikirkan atau sudah mulai lakukan untuk menghadapi kemungkinan tambang berhenti beroperasi. **Sebagian informan menyebut kemungkinan kembali pada mata pencaharian sebelum tambang hadir.** Petani menyatakan bahwa jika tambang berhenti, ia akan kembali berkebun atau melaut (05-02KO2). Seorang sopir menyebut bahwa ia mungkin kembali bekerja sebagai tukang kayu (05-15KO2).

Seorang nelayan lansia juga menyatakan akan tetap melaut, **dengan catatan diperlukan peningkatan peralatan dan keterampilan agar tetap produktif** (05-10SI2). Perempuan petani menyebut bahwa jika lahan telah dibayar perusahaan, ia berencana membeli tanah di luar lingkar tambang untuk tetap dapat berkebun (05-12SI2). Pernyataan serupa muncul dari beberapa informan yang masih melihat sektor pertanian dan perikanan sebagai cadangan utama ketika tambang tidak lagi beroperasi.

"Kalau tambang berhenti tidak masalah saya hidup selama-lamanya di sini, beraktifitas apa adanya." (05-14SI2, Perempuan, Petani, 65 tahun)

Sebagian informan menyebut **perlunya mempersiapkan usaha alternatif sebelum perusahaan berhenti.** IRT muda menyatakan kemungkinan membangun usaha lebih dahulu, meskipun ia mengakui bahwa usaha kos-kosan saat ini masih bergantung pada keberadaan perusahaan (05-16SI2). Pemilik UMKM menyebut bahwa hasil penjualan lahan seharusnya tidak langsung dihabiskan, melainkan digunakan untuk membangun kebun atau usaha lain sebagai cadangan masa depan (05-09SI2). Ia juga menyebut bahwa beberapa warga menerima uang dalam jumlah besar tetapi tidak semuanya mengelolanya untuk jangka panjang.

Strategi lain yang muncul adalah menabung atau mengelola uang hasil tambang dengan lebih hati-hati. Pekerja industri menyatakan bahwa ia bekerja sambil berupaya menabung agar anak dapat sekolah tinggi dan memiliki pilihan pekerjaan di luar tambang (05-12KO2). Pemilik UMKM juga menyebut pentingnya tidak menghabiskan uang hasil penjualan lahan dalam waktu singkat (05-09SI2). Pemilik kost yang juga mantan aparat desa menyebut bahwa penjualan tanah seharusnya disertai perencanaan membeli lahan pengganti untuk menjaga keberlanjutan keluarga (05-18SI2). Beberapa informan secara eksplisit menyebut bahwa uang hasil penjualan tanah harus dipikirkan untuk jangka panjang karena tidak ada jaminan pendapatan setelah tambang berhenti. Sejumlah informan menyebut pendidikan sebagai bentuk persiapan menghadapi pascatambang. Penerjemah kitab menyatakan bahwa anak harus disekolahkan tinggi agar tidak bergantung pada sektor tambang (05-03KO2).

Strategi berbeda muncul dari informan yang berstatus pendatang. Mantan pekerja resort yang kini bekerja di tambang menyatakan bahwa jika perusahaan berhenti, ia kemungkinan kembali ke kampung halaman (05-17KO2). Pemilik warung makan juga menyebut kemungkinan yang sama karena niat awalnya datang untuk mengumpulkan melakukan usaha (05-18KO2).

"Masa depan pasca tambang itu masalahnya, mungkin saya akan kembali ke kampung halaman karena saya pendatang." (05-17KO2, Pekerja Tambang, Laki-Laki, 31 tahun)



Berbeda dengan warga lokal yang menyatakan akan tetap tinggal dan mencari cara bertahan, **sebagian pendatang melihat kepulangan sebagai opsi yang realistis ketika aktivitas tambang berakhir.** Hal ini juga diungkapkan oleh beberapa warga lokal yang meyakini bahwa pendatang akan jauh lebih mudah menghadapi pascatambang karena bisa pulang kampung atau mencari lokasi lain (FGD Pemuda; 05-07KO2). Menurut salah satu tokoh pemuda agama "Mereka yang sudah terbiasa hidup di tambang ini pasti lari ke tempat lain kalau tambang tutup" (05-07KO2). Pendapat lain juga disampaikan oleh seorang petani,

"Kalau orang luar ini datang kerja di tambang bisa dapat sukses lalu setelah sukses bisa pulang lagi. Tapi kalau orang sini dan generasi selanjutnya akan selamanya di sini. Kalau sudah tidak ada tambang dan sudah tidak ada pekerjaan lagi, bagaimana nasibnya?" (05-06KO2, Perempuan, Petani dan Kader Posyandu, 47 tahun)

4.5 Pelibatan Perencanaan Ke Depan untuk Mempersiapkan Pascatambang

Dalam aspek tertentu, **pemerintah disebut telah memiliki program yang berguna untuk menghadapi pascatambang.** Seorang guru perempuan menyebutkan bahwa dengan adanya program sekolah gratis saat ini merupakan persiapan bagi anak-anak yang bersekolah agar bisa mendapatkan pekerjaan di luar tambang (05-05KO2).

Akan tetapi, pembahasan mengenai pascatambang belum menjadi agenda yang terstruktur di tingkat desa maupun perusahaan.

Dalam hal ini pelaksanaan program atau pemberian dukungan tidak dilaksanakan dengan kacamata persiapan pascatambang. Sejumlah informan menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam diskusi khusus terkait rencana pascatambang, seperti yang diungkapkan oleh bidan desa bahwa dirinya tidak dilibatkan dalam diskusi tersebut (05-19SI2). Beberapa informan secara eksplisit menyebut tidak pernah mendengar adanya sosialisasi atau pembahasan formal mengenai pascatambang. Pernyataan serupa muncul dari mantan pekerja resort yang kini bekerja di tambang yang menyebut tidak pernah mendengar diskusi terkait hal tersebut (05-17KO2).

"Tidak pernah ada diskusi terkait pasca tambang." (05-17SI2, Guru dan Aparat Pemerintah, Laki-Laki, 48 tahun)

Seorang guru juga menyebut bahwa pembahasan pascatambang belum pernah dilakukan secara terbuka (05-47KO2). Dalam beberapa wawancara, pembicaraan mengenai pascatambang lebih banyak terjadi secara informal antarwarga, namun tidak dalam forum resmi (05-18SI2). Seorang tokoh agama menyatakan bahwa perangkat desa sebenarnya sudah memahami potensi dampak pascatambang, namun belum ada sosialisasi kepada masyarakat luas (05-03KO2).

Gambar 15. Resort Ekowisata di dekat Taman Nasional yang Sudah Terbengkalai



Hal ini menunjukkan adanya jarak antara pengetahuan di tingkat aparat dan keterlibatan warga.

"Perangkat desa sudah tau dampaknya, tidak ada sosialisasi di masyarakat." (05-03KO2, Laki-laki, Tokoh Agama dan Penerjemah kitab, 43 tahun)

Di tengah ketiadaan diskusi formal, **muncul sejumlah aspirasi mengenai bentuk dukungan ketika tambang berhenti.** Seorang nelayan menyebut harapan adanya jaminan sosial pada masa pascatambang (05-04KO2). Salah satu guru menyatakan bahwa tunjangan profesi guru sebaiknya tetap berjalan meskipun perusahaan berhenti, karena biaya hidup sudah meningkat (05-05KO2).

Dalam FGD campuran, peserta menyebut kebutuhan bantuan yang lebih luas seperti pengadaan air bersih, pasar desa, peralatan nelayan, pelatihan UMKM, dan infrastruktur dasar. Aspirasi ini menggambarkan harapan agar keberlanjutan ekonomi desa tidak terhenti ketika aktivitas tambang berakhir.

Sejumlah informan menekankan **pentingnya penguatan usaha lokal sebagai persiapan pascatambang.** Perempuan dari institusi adat yang juga pelaku UMKM menyebut perlunya pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha bagi rumah tangga (05-01KO2).

Seorang tokoh agama menyampaikan bahwa pemerintah desa dan daerah dapat mendata warga yang menganggur dan memberikan pelatihan seperti kerajinan, bengkel, atau usaha agar memiliki keterampilan baru (05-03SI2).

"Harus ada kolaborasi bangun pasar desa seputar jalan trans Halmahera. Pembinaan pelaku usaha muda dan Perempuan. Peningkatan kapasitas dan perlindungan budaya sawai" (05-20SI2, Petani dan Aparat Desa, Laki-Laki 50 Tahun)

Aspirasi terkait lahan pertanian juga muncul dalam beberapa wawancara. Seorang guru menyebut bahwa pemerintah perlu menyediakan lahan pertanian ketika tambang berhenti (05-05KO2). Nelayan lansia juga menyatakan harapan agar masyarakat diberikan lahan pengganti karena sebagian besar tanah telah diambil alih perusahaan (05-10KO2).

Selain lahan, isu lingkungan turut disebut sebagai bagian dari persiapan pascatambang. Salah satu petani menyebut perlunya penanaman kembali pohon dan pengembangan pariwisata berbasis lingkungan (05-02KO2). Pegiat budaya menekankan pentingnya pembinaan kelompok mangrove agar tetap berjalan meskipun perusahaan tutup (05-13SI2).

Sejumlah informan menilai bahwa **persiapan pascatambang memerlukan kerja sama antara pemerintah dan perusahaan.** Salah satu hal yang dianggap penting untuk segera dimulai adalah diskusi dan sosialisasi mengenai pascatmbang (05-11SI2; 05-09SI2; 05-12KO2). Pemilik kios menyatakan bahwa pemerintah dan perusahaan perlu bergerak bersama agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga (05-07KO2). Perangkat desa menyebut bahwa desa dan kecamatan memiliki peran penting dalam mempersiapkan masyarakat sebelum pascatambang terjadi (05-22KO2). Pekerja industri mengusulkan adanya forum CSR di tingkat provinsi dan penyusunan blueprint PPM yang terintegrasi dengan rencana jangka panjang perusahaan (05-23KO2).

"Jika program CSR/PPM dengan model pemberdayaan tepat sasaran maka Masyarakat tidak akan ketergantungan pada perusahaan" (05-23KO2, Pekerja Industri, Laki-Laki 48 tahun)



Pembahasan



RQ 1: Apa saja bentuk permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat di wilayah terdampak tambang, dan bagaimana perubahan ini terjadi dari sebelum tambang beroperasi hingga saat ini?

Temuan menunjukkan bagaimana Desa Kobe dan Desa Sawai Itepo mengalami perubahan dalam kurun 10 tahun terakhir. Sejak 2000-an kedua desa yang bersebelahan ini telah menjadi penyanggah bagi industri pertambangan yang terletak tidak jauh dari desa. Keduanya menjadi lokus pemukiman dan jalur lintas yang menghubungkan Kota Weda dan Weda Tengah. Namun sejak 2018 (PT IWIP beroperasi), perubahan dirasakan semakin nyata oleh masyarakat yang tercermin dari migrasi pendatang secara masif. Pada 2018-2024, jumlah penduduk di Kobe dan Sawai Itepo masing-masing melonjak sebesar 85% dan 62% yang membawa berbagai bentuk perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan di desa (BPS 2017, 2023). Temuan menunjukkan bagaimana perubahan tersebut dirasakan berbeda oleh masyarakat bergantung pada usia, pekerjaan, kepemilikan aset produktif, dan ketergantungan pada sumber daya alam. Meski "belum" menjadi lokus pertambangan, kedekatannya dengan pusat tambang dan industri pengolahan menyebabkan perubahan sosial dan ekonomi yang tidak bisa dihindari.

1) Boom ekonomi dan migrasi serta tekanan penghidupan tradisional

Perubahan utama yang dirasakan merata hampir seluruh responden ialah **peningkatan aktivitas ekonomi dari banyaknya pendatang yang masuk ke desa.** Banyaknya pendatang meningkatkan peluang ekonomi dari kebutuhan yang meningkat akan tempat tinggal, makanan, dan pertokoan. Menurut pengamatan warga, jumlah UMKM di kedua desa ini meningkat sejak 2018. Bagi warga yang memiliki aset produktif dan modal, peningkatan ini membawa peluang untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar melalui pembangunan usaha kecil utamanya kos-kosan, kios dan warung makan. Di saat yang bersamaan, peningkatan jumlah permintaan ini belum diiringi dengan pasokan lokal sehingga mengerek harga-harga naik. Hal ini banyak diutarakan utamanya oleh perempuan baik ibu rumah tangga, bidan, ataupun tokoh yang kegiatan sehari-harinya mengelola kebutuhan rumah tangga. Sebagai contoh, responden yang merupakan warga lokal yang sejak lahir tinggal di desa menyebut bahwa uang Rp 1 juta dapat habis hanya untuk membeli kebutuhan dasar seperti beras dan minyak kelapa, sementara harga ikan cakalang yang sebelumnya sekitar Rp2.000 meningkat hingga mencapai Rp100.000 per kilogram[2].

[2] Data hasil wawancara.

Lebih lanjut, pola menunjukkan bahwa **tekanan biaya hidup turut mendorong konversi lahan,** yang sudah masif sejak 2018, menjadi uang tunai untuk digunakan membuka usaha kecil, memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau menutupi kebutuhan ekonomi yang meningkat. Bagi sebagian rumah tangga, penjualan lahan menjadi salah satu strategi yang tersedia untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi yang berlangsung cepat. Namun demikian, masyarakat Desa Kobe dan Sawai Itepo yang selama ini menggantungkan penghidupan pada perkebunan kelapa, pala, kakao, sagu, serta perikanan tangkap mengalami penyusutan aset produksi berbasis lahan. Pada saat yang sama, penurunan kualitas lingkungan dan berkurangnya lahan produktif turut menekan hasil perkebunan dan perikanan yang semakin memperburuk kemampuan memproduksi pasokan lokal dan meningkatkan ketergantungan kepada tambang. Meskipun penelitian ini tidak menguji hipotesis keberadaan resource curse, namun pola ini menjadi signal akan pelemahan sektor ekonomi tradisional akibat pertumbuhan ekonomi ekstraksi (Auty 2002).

Pola ini menunjukkan **persoalan keadilan distributif,** di mana manfaat ekonomi yang muncul dari masuknya pendatang lebih banyak dinikmati oleh penduduk yang memiliki modal dan aset produktif, sementara beban berupa kenaikan biaya hidup, penyusutan aset lahan, dan menurunnya produktivitas penghidupan tradisional lebih banyak ditanggung oleh rumah tangga yang bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Temuan ini juga menyoroti **tantangan keadilan restoratif** dimana terjadi penyusutan aset produksi berbasis lahan dan melemahnya kapasitas produksi lokal menunjukkan bahwa transformasi ekonomi yang berlangsung belum diiringi dengan strategi pemulihan maupun diversifikasi penghidupan yang memadai.

Dalam jangka pendek, perekonomian di Desa Kobe dan Desa Sawai Itepo masih dapat ditunjang oleh ekonomi tambang dan turunannya. Namun demikian, perubahan sosial-ekonomi-lingkungan **jika tidak tertangani dalam jangka panjang akan menyebabkan ketergantungan pada tambang dan industri pengolahan.** Hal ini disebabkan dominasi yang terlalu pada satu sektor (dan industri turunan) melemahkan keunggulan sektor lain melalui peningkatan orientasi masyarakat pada sektor dominan seperti tercermin dalam aspirasi pemuda kedua desa ini saat ini, penyusutan aset produktif berbasis lahan yang sudah dialami secara masif sejak 2018, serta peralihan arus tenaga kerja dan modal terhadap pekerjaan tambang yang mempersempit pilihan penghidupan masyarakat dan meningkatkan kerentanan di masa depan.

Dalam hal ini wilayah mengalami apa yang disebut dengan **penguncian ekonomi** (*economic lock-in*) (Martin and Sunley 2006; Grabher, 1993) dimana suatu wilayah menjadi terlalu bergantung pada satu sektor dominan sehingga sulit beradaptasi ketika kondisi berubah. Di dunia, kondisi ini terjadi di beberapa daerah seperti Ruhr, Germany, Alberta, Kanada, dan Latrobe Valley Australia yang menghadapi tantangan besar ketika industri utama mereka mengalami penurunan (Eriksen and Frivold 2023; Lestari dan Inayah 2023). Tidak jauh dari Weda Tengah, Pulau Gebe juga mengalami hal yang serupa ketika operasi pertambangan nikel PT ANTAM berakhir pada 2004–2005 setelah hampir 30 tahun menjadi pusat aktivitas pertambangan (Wibowo 2018).



2) Peningkatan ekonomi dan ancaman kohesi sosial

Di samping peningkatan jumlah penduduk, kenaikan harga-harga, masuknya industri tambang juga menunjukkan **melemahnya kohesi sosial** yang digambarkan dengan semakin berkurangnya praktik gotong royong, menurunnya partisipasi dalam kegiatan kolektif, melemahnya praktik berbagi dan barter, serta munculnya kekhawatiran terhadap perubahan perilaku sosial di kalangan generasi muda. Hal ini disebabkan oleh akses dan peluang ekonomi yang tidak merata dan mendorong kesenjangan sosial dan ekonomi tumbuh. Penduduk lokal yang memiliki aset produktif atau modal serta keterampilan untuk membuka usaha dapat mengambil peluang dengan membuka kios atau kelontong. Nelayan, petani, lansia, dan rumah tangga yang tidak terhubung langsung dengan industri menghadapi tekanan yang lebih berat karena harus menanggung kenaikan biaya hidup, penyusutan aset produktif, di sisi lain penurunan hasil penghidupan tradisional. Sovacool (2021) menyebut dinamika ini sebagai bentuk *entrenchment* (penguatan), yaitu ketika perubahan ekonomi yang dihasilkan oleh proyek pembangunan atau transisi justru memperkuat ketimpangan yang telah ada sebelumnya. Di sisi lain, kerja di tambang dianggap sebagai jalur sukses utama (pendapatan tinggi) yang menggeser aspirasi generasi muda dan lagi, mendorong ketergantungan pada ekonomi tambang yang menjadi **tantangan pada keadilan restoratif** karena keberlanjutan penghidupan masyarakat pascatambang menjadi semakin rentan ketika pilihan ekonomi di luar sektor tambang terus menyusut.

Pada saat yang sama, meningkatnya keterikatan masyarakat pada pekerjaan formal dan aktivitas ekonomi individual turut mengurangi ruang-ruang interaksi sosial yang sebelumnya menjadi perekat komunitas. Beberapa responden menyebut bahwa praktik gotong royong dan kebersamaan semakin jarang dilakukan karena masyarakat lebih sibuk bekerja, terutama mereka yang terikat pada jadwal kerja industri. Aktivitas yang dahulu dilakukan secara kolektif, seperti kerja bakti, berkumpul, atau saling membantu dalam kegiatan ekonomi dan sosial, perlahan berkurang.

Perubahan juga terlihat pada praktik berbagi hasil panen dan barter yang sebelumnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Meskipun konflik terbuka antara warga lokal dan pendatang belum menjadi persoalan yang dominan, sejumlah responden mengamati meningkatnya perkelahian, persoalan yang berkaitan dengan minuman keras, serta kekhawatiran terhadap perubahan perilaku sosial di kalangan generasi muda. Ekspresi kekhawatiran ini menunjukkan tantangan pada keadilan rekognisi dimana masyarakat masih menaruh perhatian dan penghargaan pada nilai-nilai sosial seperti kerukunan dan gotong royong yang tergerus seiring dengan pertumbuhan ekonomi tambang. Di Desa Kobe dan Sawai Itepo, kohesi sosial secara historis dibangun melalui relasi keagamaan, gotong royong, organisasi kepemudaan, ritual adat, serta berbagai praktik saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Namun, meningkatnya keterikatan masyarakat pada pekerjaan tambang, berkurangnya partisipasi pemuda dalam kegiatan komunitas, melemahnya organisasi kepemudaan, serta tumbuhnya kecemburuan sosial terkait distribusi manfaat tambang menunjukkan bahwa institusi dan nilai-nilai sosial tersebut semakin terpinggirkan.



3) Penanganan dampak yang belum menjawab kebutuhan dan terbatasnya ruang partisipasi

Di tengah desa yang berubah, warga mengakui bahwa berbagai bentuk penanganan dampak tambang dan industri telah dilakukan dengan bantuan tunai sebagai bentuk yang paling sering disebut. Meskipun demikian, **ketepatan bentuk, sasaran, maupun model distribusinya masih dirasa belum sepenuhnya tepat.** Dari sisi bentuk program, beberapa warga menilai bantuan yang diberikan belum menjawab persoalan utama yang mereka hadapi, terutama terkait penurunan kualitas lingkungan dan penghidupan nelayan maupun petani. Misalnya, nelayan menyatakan bahwa perubahan kondisi perairan dan menurunnya hasil tangkapan belum diikuti dengan upaya penanganan yang dirasakan secara langsung. Dari sisi sasaran, terdapat keluhan bahwa sebagian kelompok rentan atau warga yang terdampak tidak selalu terlibat maupun memperoleh manfaat secara proporsional. Sementara dari sisi distribusi dan tata kelola, beberapa informan menyoroti bahwa pengelolaan bantuan dan program lebih banyak dilakukan melalui aktor atau kelompok tertentu, sehingga masyarakat luas tidak selalu mengetahui proses penentuan penerima maupun penggunaan bantuan tersebut.

Untuk merespons ketidaktepatan yang dijelaskan sebelumnya, masyarakat menyampaikan berbagai masukan dan keluhan melalui musyawarah desa, musyawarah dusun, maupun jalur informal lainnya. Namun, temuan menunjukkan bahwa **ruang partisipasi masyarakat dalam membahas dampak pertambangan masih terbatas yang menunjukkan tantangan pada aspek keadilan prosedural.** Sebagian warga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam diskusi mengenai dampak tambang, sementara yang lain menyebut bahwa forum yang tersedia lebih banyak membahas bantuan atau kebutuhan pembangunan desa secara umum dibandingkan persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mereka hadapi. Pengaduan yang disampaikan kepada pemerintah desa maupun pemerintah daerah mengenai persoalan lingkungan, penurunan penghidupan, dan kebutuhan dasar masyarakat sering kali menghadapi fragmentasi jalur komunikasi, ketidakjelasan kewenangan, serta tindak lanjut yang tidak pasti. Sebagian warga bahkan merasa tidak mengetahui ke mana harus menyampaikan keluhan atau tidak memperoleh respons yang memadai setelah menyampaikan aspirasi. Sebagaimana dikemukakan Schlosberg (2007), keadilan prosedural mensyaratkan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) serta kemampuan kelompok terdampak untuk memperoleh pengakuan dan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Alhasil, kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian masalah cenderung menurun dan berbagai persoalan yang dirasakan sehari-hari tetap berlarut tanpa penyelesaian yang jelas.



Tantangan dan persoalan tersebut seharusnya dapat dimitigasi apabila masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai manfaat, risiko, dan dampak jangka panjang aktivitas pertambangan, serta memiliki ruang yang bermakna untuk menyampaikan aspirasi dan memengaruhi keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Namun, temuan menunjukkan bahwa baik dalam tahap persiapan maupun penanganan dampak pertambangan, pelibatan masyarakat masih terbatas dan belum menjangkau berbagai kelompok secara setara.

Sosialisasi lebih banyak berfokus pada pembebasan lahan atau program bantuan, sementara ruang diskusi mengenai dampak sosial, ekonomi, lingkungan, maupun masa depan pascatambang masih minim. Kondisi ini menunjukkan **adanya kesenjangan pada aspek keadilan prosedural,** di mana akses terhadap informasi, partisipasi, dan mekanisme penyampaian aspirasi belum sepenuhnya tersedia secara inklusif dan bermakna bagi masyarakat.

Implikasi Respon yang Diperlukan

Untuk merespon perubahan yang diuraikan sebelumnya, beberapa gagasan dan aspirasi muncul dari diskusi dan pertemuan yang dilakukan dengan masyarakat dan peneliti dari perwakilan organisasi perangkat daerah. Gagasan dan aspirasi tersebut mencakup



1. **Penguatan ketahanan ekonomi rumah tangga, melalui:**
   - Pelatihan manajemen keuangan dan aset produktif agar dapat mengambil keputusan dan mengelola aset serta pendapatan secara lebih produktif.
   - Dukungan bagi pengembangan usaha non-tambang dan diversifikasi sumber pendapatan.



2. **Perbaikan tata kelola partisipasi dan pengaduan**
   - Pembaharuan atau penguatan metode forum dan dialog di tingkat desa agar lebih transparan dan inklusif dengan mempertimbangkan efisiensi biaya.
   - Kejelasan mekanisme pengaduan di tingkat desa dan kabupaten, termasuk tindak lanjut dan umpan balik atas aspirasi yang telah disampaikan masyarakat.
   - Penglibatan ahli, akademisi atau organisasi masyarakat sipil dalam forum dan dialog untuk memberikan masukan dan pandangan terkait proses dan substansi pertemuan.



3. **Pengurangan dampak lingkungan dan penghidupan tradisional**
   - Penanganan yang lebih nyata terhadap dampak lingkungan yang memengaruhi hasil perikanan, pertanian, dan sumber penghidupan tradisional.
   - Perlindungan serta penguatan aset produktif masyarakat seperti lahan, kebun, sagu, dan sumber daya perairan.

RQ 2: Bagaimana kondisi terkini dan kesenjangan akses terhadap layanan dasar di wilayah terdampak tambang, serta bagaimana proyeksi kebutuhannya untuk mengatasi kesenjangan tersebut?

Kehadiran industri tambang nikel sejak 2018 tidak menciptakan masalah layanan dasar di Desa Kobe dan Desa Sawai Itepo dari ketiadaan, tetapi memperparah keadaan yang sudah rentan sebelumnya. Temuan lapangan menunjukkan bahwa persoalan mendasar seperti keterbatasan air bersih, minimnya tenaga kesehatan, dan kekurangan infrastruktur pendidikan telah ada jauh sebelum industrialisasi dimulai. Namun, lonjakan populasi yang terjadi secara cepat menciptakan tekanan tambahan yang tidak diimbangi oleh peningkatan kapasitas layanan yang proporsional. Pada saat yang sama, sebagian perbaikan infrastruktur yang dirasakan warga lebih banyak ditopang oleh pembangunan jalan strategis nasional Weda-Sagea dibandingkan intervensi langsung dari pemerintah daerah maupun perusahaan tambang.

Temuan di Desa Kobe dan Sawai Itepo memperlihatkan setidaknya empat pola besar yang saling terkait: (1) krisis air yang bersifat struktural; (2) peningkatan beban layanan kesehatan yang tidak sebanding dengan kapasitas operasional; (3) penurunan kualitas pendidikan akibat keterbatasan infrastruktur dan tenaga pendidik; serta (4) ketergantungan parsial pada perusahaan tambang dalam pemenuhan fasilitas publik. Pola-pola ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat dalam sebuah dinamika yang membuat masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan seperti lansia, petugas kesehatan, guru dan anak sekolah, terjebak dalam siklus adaptasi mandiri yang mahal dan tidak berkelanjutan.

1) Krisis Air, Masalah Lama yang Memburuk

Persoalan air bersih di Kobe dan Sawai Itepo merupakan isu yang paling konsisten disebut oleh warga lintas kelompok usia, gender, dan mata pencaharian. Namun, **pola yang muncul menunjukkan persoalan berulang dalam menyelesaikan masalah yang sudah diketahui sejak lama.** Keluhan soal air di Desa Kobe telah tercatat sejak 2013, lima tahun sebelum PT IWIP beroperasi. Upaya pengeboran pernah dilakukan pada tahun 2022 oleh Satuan Komando Kewilayahan dari KODIM 1512/WEDA dengan anggaran ratusan juta rupiah[3], tetapi belum berhasil mendapatkan sumber air yang mencukupi kebutuhan karena dilakukan tanpa kajian hidrogeologi yang memadai. **Adanya tantangan prosedural**, di mana masyarakat memiliki ruang formal melalui musdes dan musdus untuk menyampaikan kebutuhan layanan dasar, tetapi **efektivitas mekanisme ini sangat terbatas.** Usulan berulang tentang air bersih yang belum tuntas menunjukkan bahwa penanganan masalah belum ditindaklanjuti secara efektif.

Ketika PT IWIP mulai beroperasi dan populasi melonjak hampir dua kali lipat dalam kurun tujuh tahun, tekanan terhadap sumber air yang sudah terbatas semakin besar. Warga yang sebelumnya menggunakan mata air *Babuyalo* kini harus berbagi dengan penduduk yang jauh lebih banyak, sementara sistem distribusi pipa yang ada tidak menjangkau seluruh rumah tangga. Adapun persepsi terhadap **kondisi air tidak seragam meski berada di dalam desa yang sama.**

[3] Hanya tersedia data proposal kegiatan, anggaran biaya perlu dikonfirmasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Halteng

Tokoh agama, anggota Badan Perwakilan Desa, dan tenaga kesehatan cenderung menilai air 'cukup baik' atau bahkan 'lancar' sementara guru, nelayan, dan petani yang tinggal bersebelahan dengan mereka justru mengeluhkan kesulitan yang signifikan. Variasi ini tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh lokasi geografis, misalnya tokoh agama di Sawai Itepo yang merasa airnya aman tinggal tidak jauh dari penduduk lain yang merasakan kesulitan air; di Desa Kobe, guru yang mengeluhkan air tinggal berseberangan dengan tokoh agama yang merasa sumber airnya bagus. Pola ini **mengindikasikan bahwa akses terhadap air bersih kemungkinan juga dipengaruhi oleh faktor lain,** seperti prioritas distribusi, kedekatan dengan pengambil keputusan di tingkat desa, atau kemampuan finansial untuk memasang instalasi secara mandiri. Mempertimbangan aspek **distribusi dan pengakuan**, terdapat kesenjangan di antara penerima manfaat air bersih setelah masalah berusaha ditangani. Kelompok paling rentan seperti ibu hamil dan lansia menanggung risiko lebih besar ketika menghadapi krisis air, karena keterbatasan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri.

Dinamika krisis air di Kobe dan Sawai Itepo juga dapat dipahami dengan *infrastructure deficit trap*, situasi di mana ketiadaan infrastruktur dasar yang memadai sebelum terjadinya perubahan ekonomi besar menyebabkan masyarakat terjebak dalam siklus kekurangan yang terus memperkuat dirinya sendiri (*self-reinforcing*).

Beberapa ahli pembangunan telah menunjukkan bahwa di wilayah ekstraktif, pertumbuhan penduduk yang dipicu oleh industri sering kali melampaui kapasitas adaptasi infrastruktur lokal, terutama ketika baseline infrastruktur sudah lemah sebelumnya (Bebbington et al., 2018; Kim, 2021).

Di Kobe dan Sawai Itepo, siklus ini bekerja melalui tiga mekanisme yang saling terkait. **Pertama,** kapasitas perencanaan teknis di tingkat desa tidak memadai untuk mengatasi kompleksitas masalah air, sebagaimana ditunjukkan oleh kegagalan pengeboran yang menghabiskan anggaran tanpa hasil. **Kedua,** ketika masyarakat berhasil beradaptasi secara mandiri, menarik pipa sendiri, membeli air galon, atau mengambil air dari sungai, tekanan terhadap pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah secara sistemis justru berkurang. Adaptasi mandiri yang dilakukan dari kebutuhan (*necessity*) ini secara tidak sengaja mengurangi urgensi politik untuk solusi struktural. **Ketiga**, terbatasnya anggaran desa dan belum adanya mekanisme koordinasi yang jelas dengan pemerintah daerah maupun perusahaan untuk penanganan air bersih membuat masalah ini terus berputar sebagai usulan berulang dalam musyawarah desa tanpa realisasi yang memadai.



2) Peningkatan Risiko Kesehatan

Pada sektor kesehatan, terlihat kontradiksi antara persepsi perbaikan layanan dan realitas operasional yang semakin tertekan. Secara fisik, layanan kesehatan menunjukkan kemajuan di mana bidan kini tersedia 24 jam, pengecekan rutin untuk ibu hamil dan lansia telah berjalan, hingga program pencegahan stunting melalui pemberian MPASI telah dilaksanakan. Desa Kobe dilayani oleh 1 bidan, sementara Sawai Itepo memiliki 2 bidan. Padahal berdasarkan data SatuSehat Kemenkes (2026), Pustu Kobe tercatat seharusnya memiliki 3 bidan yang terdiri dari 2 ASN dan 1 tenaga kontrak. Akan tetapi meski terdapat ambivalensi antara data dan aktual, keberadaan bidan tetap terasa signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya ketika bidan hanya hadir tiga bulan sekali.

Di balik penilaian positif dari masyarakat, **kapasitas operasional pustu tidak dirancang untuk melayani populasi yang melonjak hampir dua kali lipat.** Tenaga kesehatan menyatakan kewalahan menghadapi beban pelayanan yang meningkat. Ketersediaan obat tidak stabil, sehingga bidan harus menanggung sendiri kekurangan dari dana pribadi atau dana desa. Dari segi fasilitas, tabung oksigen, drainase limbah medis, dan kasur medis masih menjadi kebutuhan yang belum terpenuhi. Lebih mendasar lagi, **persepsi 'perbaikan' layanan kesehatan perlu diperiksa secara kritis.** Kemudahan akses ke fasilitas kesehatan rujukan (RSUD) ditopang oleh pembangunan jalan strategis nasional Weda-Sagea yang dibangun pada tahun 2016-2017 oleh KemenPUPR (Kompas, 2017). Secara tidak langsung, perbaikan terjadi karena peningkatan aksesibilitas geografis dibandingkan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan.

Hal ini nampak karena ambulans yang tersedia tidak selalu dapat digunakan untuk penanganan darurat karena ketiadaan anggaran operasional bensin dan sopir. Pada akhirnya, biaya yang harus ditanggung pasien relatif sama dengan menggunakan kendaraan pribadi. Kondisi ini menciptakan situasi di mana ketersediaan fasilitas secara fisik tidak otomatis berarti akses yang bermakna (*meaningful access*).

Selain itu, masyarakat tidak mengetahui program pencegahan stunting yang menjadi prioritas pustu merupakan **dorongan dari program nasional.** Pada saat yang sama, inisiatif ini juga dilanjutkan oleh pemerintah daerah melalui insentif BLT yang diberikan kepada ibu hamil dan menyusui. Hal ini menjelaskan bahwa perbedaan atribusi di antara keduanya menunjukkan bahwa **perbaikan yang dirasakan warga tidak selalu berasal dari respons terhadap kebutuhan lokal yang spesifik,** melainkan juga dari program *top-down* yang kebetulan berjalan bersamaan dengan periode industrialisasi.

Kontradiksi antara persepsi perbaikan dan realitas operasional ini disebut sebagai ***access paradox*** dalam konteks *boomtown*, di mana pertumbuhan ekonomi cepat yang dipicu industri ekstraktif meningkatkan beban layanan dasar (termasuk kesehatan) lebih cepat daripada kapasitas sistem untuk merespons (Murillo & Sardon, 2024). Fenomena ini juga terjadi pada kasus Afrika Selatan di daerah Emalahleni (Van der & Matebesi, 2021) dan dan Fort McMurray di Kanada (Deacon & Lamanes, 2015), ketika layanan dasar sangat dipengaruhi oleh retensi jumlah penduduk. Bahkan masalah dapat menjadi semakin kompleks ketika peningkatan terlihat menutupi kerentanan sistemik yang tidak kasat mata oleh masyarakat umum.



Sehingga apabila program pencegahan stunting maupun perbaikan akses jalan tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas operasional dasar, obat, tenaga, anggaran, **akan mengarahkan pada perbaikan yang superfisial dan rentan terhadap tekanan yang terus meningkat.** Risiko ini cukup jelas jika disandingkan dengan temuan mengenai kasus penyakit menular seksual, keterbatasan air di pustu saat menangani persalinan, dan permintaan aborsi yang mulai ditangani bidan, indikasi bahwa profil kesehatan masyarakat sedang berubah seiring perubahan demografis, tetapi kapasitas preventif dan kuratif pustu belum mampu mengikuti.

3) Pendidikan Gratis dengan Kualitas Terbatas

Kebijakan pendidikan gratis dari SD hingga SMA yang diberlakukan oleh pemerintah daerah menjadi salah satu intervensi yang paling diakui manfaatnya oleh warga Kobe dan Sawai Itepo. Bagi keluarga dengan lebih dari satu anak usia sekolah, kebijakan ini mengurangi beban finansial secara nyata. Namun, keterjangkauan biaya tidak menyelesaikan persoalan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendidikan. Temuan menunjukkan bahwa di Kobe dan Sawai Itepo, satu-satunya SMA (Insan Kharisma) hanya memiliki 2–3 tenaga pengajar. SMA ini berbagi bangunan dengan SMP karena belum memiliki gedung sendiri. Ruang kelas yang tersedia hanya lima untuk SMP, sehingga beberapa kelas harus digabung dalam satu ruangan. PAUD di Sawai Itepo juga mengandalkan bangunan bekas yayasan ekowisata yang sudah tidak terawat, sementara Kobe memiliki 1 unit PAUD yang masih berjalan.

Tabel 8. Data Sarpras dan Rasio Guru-Murid di Desa Kobe dan Sawai Itepo

Sekolah	Lokasi Desa	Jumlah Ruang Kelas	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Guru dan Murid
PAUD Ekowisata	Sawai Itepo	2	3	18	1:6
TK Negeri Sinar Aktif	Kobe	3	9	27	1:3
SD Negeri Kobe	Kobe	6	11	95	1:9
SMP N 17	Sawai Itepo	3	14	89	1:6
SMA Insan Kharisma	Sawai Itepo	3	2	65	1:33

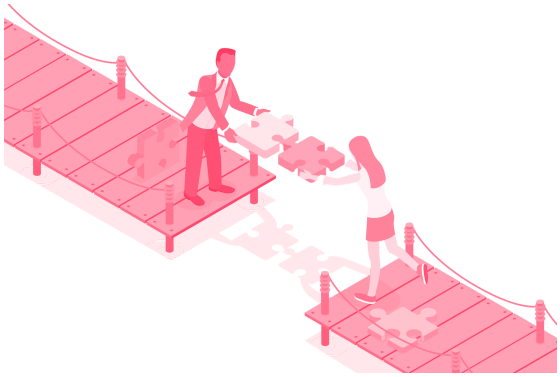
Sumber: Observasi langsung dan Rekapitulasi Dapodik Kemendikdasmen (2026)

Persoalan yang lebih jarang terungkap namun sangat signifikan adalah **konflik pertanahan yang mengancam keberlangsungan fisik sekolah.** Izin pertanahan bangunan sekolah masih berupa tanah warisan yang belum memiliki status hukum yang jelas. Akibatnya, warga telah melakukan klaim tanah terhadap area sekolah sebanyak 2–3 kali, termasuk penyegelan laboratorium sekolah yang membuat fasilitas tersebut tidak bisa digunakan. Pihak sekolah terpaksa menggunakan dana operasional pendidikan untuk membayar klaim tersebut, pengalihan anggaran yang langsung berdampak pada kualitas pembelajaran. Fenomena ini tidak terpisah dari maraknya penjualan tanah yang dipicu industrialisasi tambang di mana **aset publik yang masih berstatus ambigu menjadi sangat rentan** terhadap klaim individual.

Akumulasi faktor tersebut mengindikasikan pola ***access-quality gap*** atau kesenjangan antara kemampuan mengakses layanan (biaya gratis dan sekolah tersedia) dengan kualitas layanan yang diterima (guru minim dan bangunan tidak memadai) yang umum terjadi di daerah pedesaan (Wang et al, 2025). Dalam konteks wilayah tambang, gap ini sering kali diperparah oleh dua faktor. **Pertama,** orientasi pemuda terhadap pekerjaan tambang yang menawarkan gaji lebih tinggi (2-3 kali lipat pendapatan pekerjaan non-tambang)[4] menciptakan disinsentif untuk profesi pendidik, sehingga suplai tenaga pengajar di desa tambang semakin terbatas. Di sisi lain, struktur ekonomi pertambangan telah mengubah struktur ketenagakerjaan lokal, tenaga yang semula berpotensi masuk ke sektor publik terserap ke industri tambang. **Kedua**, sebagian guru berdomisili di luar desa dan sering terlambat atau tidak hadir ketika ada kendala transportasi, sementara rumah dinas guru tidak tersedia. Meskipun rehabilitasi sekolah sudah masuk dalam rencana strategis dan 18,65% APBD telah dialokasikan untuk pendidikan, tetapi prioritas implementasi saat ini masih berada di kecamatan lain dan belum menjangkau Kobe serta Sawai Itepo.[5]

Konflik pertanahan di area sekolah juga mencerminkan kondisi industrialisasi tambang yang mendorong komodifikasi lahan secara masif. Sementara aset-aset publik di atas lahan berstatus informal tidak memiliki mekanisme perlindungan yang pasti dari upaya klaim sepihak. Tanpa penyelesaian status pertanahan sekolah, klaim warga terhadap lahan kemungkinan akan terus terjadi seiring dengan meningkatnya nilai tanah. **Dalam skenario terburuk, area sekolah akan terus menyusut hingga operasional pendidikan tidak lagi dapat berjalan di lokasi tersebut.** Jika situasi ini terjadi bersamaan dengan minimnya tenaga pengajar dan fasilitas, akan mendorong lebih banyak siswa pindah ke luar desa atau putus sekolah untuk bekerja di sektor tambang yang akan memperkuat siklus ketergantungan pada industri tambang bagi generasi berikutnya.

Secara distributif, manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang dipicu tambang tidak diterjemahkan secara proporsional ke dalam peningkatan kapasitas layanan dasar bagi masyarakat terdampak langsung. Di tengah populasi meningkat drastis, tenaga layanan (guru dan bidan) harus menanggung risiko. Sementara itu, pekerja tambang dari luar memiliki akses terhadap fasilitas yang lebih baik di area perusahaan atau kos-kosan yang lebih terlayani. Minimnya perhatian kepada aspirasi dan aksesibilitas layanan bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan perempuan juga perlu menjadi penekanan dalam mengatasi tantangan soal **pengakuan.**



[4] Data wawancara
[5] Sumber sementara LKPD Halteng 2024

4) Ketergantungan Parsial pada Perusahaan dan Fragmentasi Penyediaan Layanan

Temuan di Kobe dan Sawai Itepo menunjukkan bahwa **pemenuhan layanan dasar ditopang oleh lebih dari satu pihak yang terfragmentasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa,** dan perusahaan tambang, dengan batas tanggung jawab yang kabur dan kurang terkoordinasi. Sebelum 2018, perusahaan sebelumnya (PT Weda Bay Nickel dan PT Tekindo) menyediakan bus antar-jemput sekolah yang melayani dua desa. Tetapi setelah PT IWIP beroperasi, layanan ini dihentikan tanpa mekanisme transisi, sehingga jam masuk sekolah berubah dan sebagian siswa harus berjalan kaki. Pada saat yang sama, PT IWIP memberikan bantuan dalam bentuk yang berbeda, yaitu AC, material bangunan, dan komputer untuk pustu, gereja dan sekolah, lalu secara spesifik Smart TV untuk sekolah. Namun, bantuan ini tidak selalu fungsional, komputer yang diterima pustu berbahasa Mandarin sehingga tidak bisa digunakan, sedangkan Smart TV di sekolah tidak dimanfaatkan karena keterbatasan penggunaan.

Pola ini menunjukkan dinamika tata kelola di daerah intensif tambang, ketika **kebutuhan layanan dasar yang meningkat dipenuhi secara *ad-hoc* oleh berbagai pihak tanpa perencanaan terpadu.** Hal ini ditunjukkan pernah ditunjukkan pada kasus New South Wales dan Queensland, Australia bahwa perusahaan tambang dan pemerintah lokal memiliki kewajiban menyediakan infrastruktur dasar seperti fasilitas rekreasi, kesehatan, bahkan perumahan secara tidak terencana (Cheshire et al, 2014). Dalam kasus Kobe dan Sawai Itepo, Pemerintah daerah memberikan program pendidikan gratis dan bantuan rumah layak huni. Perusahaan menyalurkan bantuan material melalui mekanisme proposal. Pemerintah desa mengelola dana desa untuk operasional pustu dan kegiatan posyandu. Tetapi tidak ada mekanisme yang memastikan ketiga sumber ini saling melengkapi dan tidak tumpang tindih.

Dengan kondisi **data bantuan perusahaan ke desa tidak dibuka kepada pemerintah daerah,** kabupaten tidak mengetahui apa yang sudah dan belum diberikan perusahaan dan sebaliknya. Nampak adanya **tantangan pada keadilan prosedural**, terutama dengan minimnya akses terhadap informasi mengenai bantuan perusahaan kepada desa juga membuat masyarakat tidak dapat menilai apakah sumber daya yang tersedia sudah dialokasikan secara optimal. **Dari kerangka restoratif,** belum tersedia upaya terstruktur dari segi layanan dasar yang sepadan untuk mengimbangi dinamika akibat tambang. **Peningkatan biaya dan keharusan adaptasi mandiri telah memicu transfer beban yang belum berkeadilan terhadap masyarakat yang paling tidak mampu menanggungnya.**

Fragmentasi ini merupakan *governance gap* dalam pengelolaan wilayah ekstraktif, di mana kehadiran aktor ekonomi besar (perusahaan tambang) menciptakan ekspektasi masyarakat terhadap penyediaan layanan publik, namun tanpa kerangka kelembagaan yang mengatur pembagian peran secara jelas (Baker & Ayala-Orozco, 2020; Mononen et al, 2023). Dalam konteks Kobe dan Sawai Itepo, celah ini diperparah oleh kenyataan bahwa dokumen informasi pemberian bantuan PT IWIP tidak dapat diakses atau diawasi oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten. Akibatnya, pemerintah daerah tidak memiliki basis informasi untuk mengoordinasikan bantuan perusahaan dengan program pembangunan daerah.

Sementara itu, dukungan dari perusahaan sebelumnya (bus sekolah, sembako, insentif langsung) telah menciptakan pola relasi *path-dependent* ketika masyarakat dan institusi desa telah terbiasa menerima bantuan, sehingga pergeseran model dari distribusi langsung ke mekanisme proposal yang birokratis dirasakan sebagai penurunan perhatian, meskipun secara total nilai bantuan mungkin tidak berkurang secara signifikan.

Implikasi Respon yang Diperlukan

Mempertimbangkan kesenjangan dan ruang perbaikan terhadap layanan dasar di Desa Kobe dan Sawai Itepo, berikut ini adalah rekomendasi respons yang berdasarkan masukan dari diskusi bersama dengan masyarakat dan rekan interlokutor:



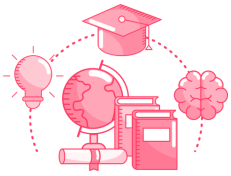
Air bersih:

- Pelibatan tenaga ahli hidrogeologi untuk melakukan survei dan pemetaan titik air di wilayah Kobe dan Sawai Itepo sebelum alokasi anggaran pengeboran berikutnya
- Penyusunan rencana induk (*masterplan*) air bersih desa yang memperhitungkan proyeksi pertumbuhan penduduk
- Audit distribusi akses air bersih per rumah tangga untuk mengidentifikasi ketidakmerataan yang selama ini tersembunyi di balik persepsi umum



Kesehatan:

- Penambahan minimal 1 tenaga kesehatan per pustu dan penyediaan anggaran operasional yang fleksibel untuk kebutuhan obat darurat.
- Normalisasi anggaran operasional ambulans (sopir dan bensin) dalam APBDes agar tidak menjadi beban pasien
- Penguatan layanan preventif, termasuk sosialisasi penyakit menular dan skrining berkala. mengingat perubahan profil kesehatan masyarakat akibat pertambahan penduduk



Pendidikan:

- Penyelesaian status hukum pertanahan bangunan sekolah melalui sertifikasi tanah sebagai aset publik/desa agar tidak rentan terhadap klaim individual
- Pembangunan gedung SMA mandiri yang tidak lagi berbagi dengan SMP



Tata kelola lintas sektor:

- Pembukaan data bantuan perusahaan ke desa kepada pemerintah daerah agar alokasi bantuan pemerintah dan perusahaan tidak tumpang tindih
- Penguatan kapasitas perangkat desa dalam perencanaan berbasis data — termasuk kemampuan menyusun RAB yang realistis dan memprioritaskan kebutuhan berdasarkan urgensi, ketersediaan anggaran, dan manfaat
- Pembentukan mekanisme koordinasi formal antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan perusahaan untuk perencanaan layanan dasar yang terintegrasi

RQ 3: Sejauh mana efektivitas program PPM dalam memperkuat layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat, serta bagaimana mekanisme evaluasinya selama ini?

Pelaksanaan program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kobe dan Sawai Itepo menunjukkan transformasi yang fundamental sejak masuknya PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) pada 2018. Perubahan ini terjadi pada bentuk bantuan, mekanisme, dan tata kelola hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Pada periode sebelumnya, ketika PT Weda Bay Nickel (WBN) dan PT Tekindo Energi beroperasi, bantuan kepada masyarakat lingkar tambang banyak diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi, penguatan kapasitas, dan penyediaan layanan langsung seperti bus pengantar sekolah, dokter kontrak, dan tenaga guru honorer. Kelembagaan penengah seperti Yayasan Saloi turut hadir sebagai jembatan formal antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat (Rusdin, 2012). **Setelah IWIP beroperasi, pola ini bergeser secara substansial menjadi mekanisme berbasis proposal dengan dominasi bantuan material fisik, sementara kelembagaan penengah tidak lagi berfungsi** dan pemetaan sosial sebagai dasar perencanaan tidak dirasakan masyarakat.

Pergeseran ini sebagian dapat dijelaskan oleh perbedaan karakter perusahaan. Sebelumnya, PT WBN dan PT Tekindo beroperasi sebagai pengekspor nikel mentah, sementara PT IWIP adalah kawasan industri yang mengelola fasilitas smelter dengan struktur kelembagaan dan regulasi yang berbeda.

Namun, perbedaan struktural menjadi salah satu faktor bagaimana perubahan model kelembagaan menciptakan serangkaian pola yang saling memperkuat, yaitu 1) ketergantungan masyarakat pada bantuan langsung yang bertahan, 2) lemahnya tata kelola yang membuat manfaat program tidak sampai kepada penerima yang seharusnya, 3) informalisasi saluran komunikasi antara masyarakat dan perusahaan, 4) serta munculnya manfaat yang bersifat semu.

1) Ketergantungan terhadap Bantuan dan Munculnya Risiko Moral

Pola pertama yang paling mencolok adalah bertahannya tingkat ketergantungan masyarakat Kobe dan Sawai Itepo terhadap bantuan langsung dari perusahaan, yang berjalan beriringan dengan menurunnya program pemberdayaan. Pada periode PT WBN dan PT Tekindo, masyarakat mengenal program agribisnis di mana hasil sayur dibeli langsung oleh perusahaan dengan pendampingan, pelatihan kerajinan yang hasilnya dipasarkan kembali melalui perusahaan, serta pembentukan kelompok nelayan dan tani dengan dukungan modal dan keterampilan. Program-program ini umumnya memiliki karakter membangun kapasitas produktif masyarakat dan tidak menciptakan ketergantungan terhadap pemberi bantuan (Sutrisno et al, 2023; Kao et al, 2014). Setelah tahun 2018, model bantuan yang diberikan perusahaan semakin bergeser pada bentuk langsung seperti distribusi material bangunan maupun fasilitas penunjang dasar yang sifatnya konsumtif dan tidak mendorong kemandirian.

Perubahan model ini juga tidak menghilangkan risiko moral dari penerima manfaat, sebagaimana sebagian warga tidak menanggung konsekuensi meskipun tindakannya mungkin merugikan pihak lain. **Misalnya dengan mengandalkan ekonomi berbasis bantuan, sehingga inisiatif untuk mandiri menjadi berkurang.** Sebagian warga yang menerima pembayaran lahan dalam jumlah besar menghabiskan dana tersebut dalam waktu relatif singkat tanpa reinvestasi produktif, kemudian kembali mengharapkan bantuan dari pemerintah maupun perusahaan. Pola serupa terlihat pada penerima bantuan material yang menjual kembali sebagian bantuan.

Dinamika ini mendekati dengan konsep *rentier mentality* (Malik, 2017; Ross, 2013), sebuah kondisi ketika ketersediaan rente sumber daya alam yang melimpah menggeser orientasi ekonomi masyarakat dari produksi ke distribusi. Di Kobe dan Sawai Itepo, mekanisme ini bekerja melalui beberapa lapisan yang saling terkait. **Pertama,** transisi bantuan dari program pemberdayaan ke bantuan langsung membentuk hubungan antara masyarakat dengan perusahaan yang bersifat distributif. **Kedua,** berhentinya kelembagaan penengah seperti Yayasan Saloi yang sebelumnya mengelola program pemberdayaan secara terstruktur, memutus kontinuitas pembangunan kapasitas produktif masyarakat yang sedang berlangsung. **Ketiga,** periode boom ekonomi dari industrialisasi tambang menciptakan likuiditas rumah tangga yang tinggi dalam waktu singkat melalui penjualan lahan, absennnya sistem ekonomi yang mandiri dan kemampuan menghadapi tekanan memperkuat ekspektasi terhadap bantuan eksternal.

Kasus serupa juga pernah terjadi pada pertambangan fosfat di Pulau Nauru, bahwa risiko moral ini tidak terjadi dalam ruang kosong. Riset oleh Ali et al (2017) menunjukkan bahwa kapasitas perencanaan dan sistem ekonomi yang tersedia, secara aktif mendorong perilaku tersebut. Ditambah lagi ketika struktur insentif dirancang agar lebih mudah diakses melalui bantuan langsung dibandingkan partisipasi dalam program pemberdayaan yang menuntut waktu dan komitmen jangka panjang, respons rasional masyarakat adalah memilih jalur termudah (**Sutrisno et al, 2024**).

2) Lemahnya Tata Kelola dan Lingkaran Partisipasi yang Menurun

Sejak PT IWIP beroperasi, mekanisme penyaluran bantuan bergeser ke sistem berbasis proposal yang harus diajukan oleh institusi seperti gereja, pustu, sekolah, atau karang taruna. Sistem ini, meskipun terlihat lebih terstruktur secara administratif, justru menciptakan hambatan baru bagi partisipasi masyarakat luas. Penyusunan proposal memerlukan kapasitas administratif tertentu dan menuntut pelaporan pertanggungjawaban yang tidak disertai pendampingan dari perusahaan. Sosialisasi mengenai mekanisme, kriteria, dan area prioritas PPM/CSR juga tidak pernah dilakukan secara terbuka kepada masyarakat. Konsekuensinya, akses terhadap bantuan menjadi reaktif dan terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki kapasitas administratif dan kedekatan dengan struktur formal desa. Artinya, **secara prosedural masyarakat tidak memiliki ruang yang bermakna untuk terlibat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan program PPM/CSR.** Pada sisi lain, forum dialog antara perusahaan dan masyarakat tidak dilembagakan, sementara kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur PPM vakum. Rantai sistem seperti ini menciptakan ketidakseimbangan prosedural di mana pihak yang paling berkepentingan tidak memiliki kapasitas formal untuk memastikan PPM dilaksanakan secara adil (Ham, 2025).

Menurunnya partisipasi ini kemudian berdampak pada melemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program. **Ketika masyarakat luas tidak terlibat dalam proses perencanaan, pengajuan, dan penerimaan bantuan, mereka juga tidak memiliki basis informasi untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas dan ketepatan sasaran program.** Pada saat yang sama, proses pengadaan bantuan tidak transparan menciptakan ruang bagi munculnya kecurigaan terhadap perangkat desa, termasuk dugaan adanya insentif khusus dari perusahaan kepada kepala desa yang tidak dialokasikan secara setara kepada perangkat lainnya. Lingkaran ini menjadi semakin tertutup ketika ketidakpercayaan terhadap perangkat desa membuat masyarakat semakin enggan terlibat dalam proses formal, yang pada gilirannya semakin mengurangi tekanan terhadap perbaikan tata kelola. Pada taraf yang lebih jauh, hal ini bisa menciptakan kerentanan terhadap konflik sosial yang lebih luas, terutama ketika tekanan ekonomi meningkat menjelang dan pasca penutupan tambang.



Gambar 16. Siklus Pelemahan Tata Kelola dalam PPM/CSR di Desa Kobe dan Sawai Itepo
Sumber: Diolah penulis

Lemahnya tata kelola ini berakar pada beberapa faktor struktural yang saling memperkuat. **Pertama,** ketiadaan pemetaan sosial sebagai dasar perencanaan PPM membuat perusahaan tidak memiliki basis data yang memadai untuk menentukan prioritas program, kelompok sasaran, dan mekanisme distribusi yang adil. Hal ini berbeda secara signifikan dari praktik perusahaan sebelumnya yang melibatkan konsultan dan humas di desa untuk melakukan survei kebutuhan sebelum program dijalankan.

Kedua, perubahan struktur regulasi yang menempatkan kewenangan pengawasan PPM untuk kontrak karya mineral logam di tingkat pusat membuat pemerintah provinsi dan kabupaten tidak memiliki akses terhadap dokumen RKAB dan tidak dapat melakukan verifikasi atas pelaksanaan PPM. Vakum pengawasan di level menengah ini menciptakan kondisi di mana perusahaan dapat menentukan sendiri prioritas dan mekanisme programnya tanpa akuntabilitas yang memadai.

Ketiga, lemahnya kelembagaan komunitas dan pemerintahan desa menciptakan ketidaksiapan struktural untuk merespons mekanisme proposal yang diperkenalkan PT IWIP. Ketika perangkat desa belum memiliki kapasitas memadai dalam penyusunan rencana berbasis kebutuhan, sementara organisasi masyarakat sipil di tingkat desa juga belum terkonsolidasi, mekanisme proposal yang seharusnya menjadi instrumen partisipatif justru menjadi pintu masuk bagi konsentrasi akses pada kelompok tertentu (Wolters & Zeyen, 2014)

3) Informalisasi Saluran Komunikasi dan Ketiadaan Pemetaan Sosial

Selain itu turut terlihat bagaimana ketiadaan saluran formal yang efektif mendorong munculnya jalur informal sebagai mekanisme utama akses terhadap bantuan perusahaan. Pada periode PT WBN dan PT Tekindo, hubungan masyarakat dengan perusahaan dimediasi oleh perwakilan desa yang berfungsi sebagai penghubung formal, ditambah dengan keberadaan Yayasan Saloi sebagai lembaga penengah yang mengelola program pemberdayaan secara terstruktur. Setelah tahun 2018, struktur ini berubah semenjak humas dari PT IWIP yang seharusnya menjadi penghubung formal di tingkat desa dinilai tidak bekerja optimal.

Absennya komunikasi formal ini kemudian diisi oleh saluran informal yang bergantung pada kedekatan personal. Variasi kecepatan respon perusahaan terhadap proposal yang masuk juga memperkuat pola di mana sebagian institusi mendapat tanggapan dalam waktu satu bulan, sementara desa lain yang serupa harus menunggu berbulan-bulan tanpa kepastian. Perbedaan ini tidak dapat dijelaskan oleh kriteria objektif kebutuhan, karena tidak ada informasi formal yang dapat diacu.

Informalisasi hubungan masyarakat-perusahaan ini tidak terlepas dari ketiadaan pemetaan sosial sejak transisi perusahaan. Pemetaan sosial pada dasarnya adalah instrumen yang memungkinkan perusahaan untuk memahami struktur komunitas, mengidentifikasi kebutuhan prioritas, dan merancang program yang berbasis pada kondisi riil masyarakat. Tanpa pemetaan ini, perusahaan tidak memiliki basis untuk merespons kebutuhan secara terstruktur, sehingga respons terhadap kebutuhan masyarakat menjadi reaktif dan bergantung pada siapa yang berhasil menjangkau perusahaan terlebih dahulu. Situasi ini mirip dengan temuan Ufi et al (2020) pada CSR CITIC Seram Energy Ltd (CSEL) di Maluku ketika ketiadaan pelibatan perusahaan dalam pemetaan kebutuhan secara terstruktur menjadi distorsi pemberian manfaat. Dalam konteks Kobe dan Sawai Itepo, bantuan yang diberikan sebagian besar tidak disertai dengan pekerja, pelatihan penggunaan, atau sarana pendukung yang memadai. Bantuan komputer berbahasa Mandarin yang tidak dapat digunakan oleh pustu adalah contoh dari konsekuensi tersebut.



Jika dipandang dari dimensi keadilan terhadap pengakuan (*recognition*), kebutuhan dan aspirasi masyarakat—terutama kelompok rentan—masih belum diakui secara sistematis dalam perancangan program PPM maupun CSR. Ketiadaan pemetaan sosial membuat kebutuhan masyarkat diperlakukan secara seragam oleh perusahaan. Akibatnya, perempuan yang menanggung beban domestik dari krisis layanan dasar, lansia yang kehilangan basis penghidupan tradisional, dan penyandang disabilitas yang tidak memiliki akses ke pekerjaan formal menjadi kelompok yang pengalamannya tidak tercermin dalam desain program saat ini.

Lebih jauh, informalisasi ini juga menciptakan *elite capture*, yaitu kondisi di mana manfaat program yang seharusnya menyebar luas justru terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki akses ke struktur kekuasaan (Dasgupta dan Beard, 2007; Woolcock, 2010; Warren dan Visser, 2016). Di Kobe dan Sawai Itepo, *elite capture* ini tidak hanya terjadi di tingkat elit desa, tetapi juga melibatkan elit informal yang memiliki koneksi dengan internal perusahaan. Adanya **kendala dalam keadilan distributif,** membuat manfaat dari program PPM tidak terdistribusi secara proporsional di antara masyarakat terdampak. Mekanisme proposal menciptakan ketimpangan akses antara institusi yang memiliki kapasitas administratif dengan rumah tangga atau kelompok yang tidak memiliki representasi formal. Selain itu, distribusi bantuan material yang dipengaruhi koneksi informal dengan perusahaan memperdalam ketimpangan ini, sehingga kelompok yang paling rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan rumah tangga miskin yang tidak terhubung dengan struktur formal desa justru berpotensi menerima manfaat paling sedikit.

Pada sisi lain, ketiadaan fungsi kelembagaan penengah yang ditinggalkan dengan berhentinya Yayasan Saloi tanpa alternatif fungsional akan terus menjadi hambatan struktural bagi pelaksanaan PPM yang efektif. **Tanpa kelembagaan penengah yang dipercaya oleh semua pihak, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan tetap berlangsung melalui saluran informal yang tidak terkontrol,** sementara koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah daerah akan tetap minimal. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan membuat persiapan pascatambang menjadi semakin tidak mungkin dilakukan secara terkoordinasi, karena tidak ada platform yang menyatukan kepentingan dan kapasitas berbagai pihak.

4) <u>Manfaat Semu dan Kebocoran Program</u>

Pelaksanaan program PPM/CSR yang ada juga menunjukkan penerimaan manfaat yang semu, ketika program PPM/CSR secara administratif tercatat telah disalurkan, tetapi belum memberikan manfaat yang berarti bagi penerima yang seharusnya. Pola ini bermanifestasi dalam beberapa bentuk yang saling terkait. Bantuan material seperti semen, paving blok, dan batu bata yang diberikan kepada warga sebagian dijual kembali, bantuan fasilitas seperti komputer dan smart TV yang tidak fungsional, dan program reboisasi mangrove yang tidak melibatkan masyarakat dalam pengelolaan jangka panjang, sehingga keberlanjutannya bergantung sepenuhnya pada inisiatif perusahaan. Di sisi lain, sejumlah bantuan yang dijanjikan tidak pernah terealisasi, termasuk lapangan bola dan voli, pembangunan politeknik, dan pembangunan jembatan yang sudah dianggarkan namun tidak pernah berjalan.

Bentuk manfaat semu yang lain adalah ketika bantuan tepat secara fisik tetapi tidak tepat secara sasaran. Distribusi bantuan material terkonsentrasi pada pihak yang memiliki akses ke perangkat desa atau dengan perusahaan, sehingga warga yang paling membutuhkan tidak menerima manfaat. Pada saat yang sama, sebagian penerima bantuan material adalah warga yang menjual lahan kepada perusahaan, sehingga material yang diterima lebih berfungsi sebagai bagian dari kompensasi penjualan lahan daripada sebagai program pemberdayaan. **Kaburnya batas antara kompensasi dan PPM ini membuat masyarakat kesulitan memisahkan mana bantuan yang masuk dalam kategori PPM, CSR sukarela, atau kompensasi lahan.**

Manfaat semu ini muncul sebagai konsekuensi langsung dari tiga pola sebelumnya yang saling memperkuat. Ketika kondisi tersebut berjalan, hasil akhirnya adalah program yang secara kuantitatif terlihat berjalan tetapi secara kualitatif tidak mencapai tujuannya. Akhir dari rentetan pola ini adalah implikasinya terhadap kesiapan masyarakat menghadapi fase pascatambang (<u>Resnawaty dan Rivani, 2017</u>; <u>Siahaan et al., 2025</u>). Bantuan yang diberikan PT IWIP saat ini sebagian besar tidak berkontribusi pada pengurangan kerentanan pascatambang. **Berdasarkan kerangka restoratif, program PPM/CSR saat ini sebagian besar belum memenuhi fungsinya sebagai instrumen pemulihan jangka panjang atas kerugian yang ditimbulkan aktivitas tambang.** Selama belum ada program penguatan ekonomi alternatif memadai, investasi dalam diversifikasi penghidupan, serta penguatan kapasitas yang memastikan manfaat berlanjut ketika perusahaan berhenti beroperasi, artinya model PPM/CSR dari PT IWIP saat ini masih berfungsi sebagai mekanisme legitimasi operasional sementara.

Implikasi Respon yang Diperlukan

Memperhitungkan temuan di atas, nampak bahwa terdapat kesenjangan dalam tata kelola dan substansi PPM/CSR di Kobe dan Sawai Itepo. Selain itu juga terindikasi adanya persoalan dalam akses terhadap program dan dinamika sosial yang melingkupinya. Berikut ini adalah respon yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan aspirasi oleh masyarakat, peneliti, dan rekan interlokutor.



- **Pada level kelembagaan dan tata kelola:**
  - Pelaksanaan pemetaan sosial yang komprehensif sebagai dasar perencanaan PPM oleh PT IWIP, dengan melibatkan akademisi independen dan masyarakat sipil untuk memastikan kredibilitas hasil
  - Pembentukan forum koordinasi PPM tingkat kabupaten atau provinsi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, dengan partisipasi perusahaan, perwakilan masyarakat desa lingkar tambang, dan organisasi masyarakat sipil
  - Pembukaan data PPM perusahaan kepada pemerintah daerah dan publik agar koordinasi dengan program pemerintah dapat dilakukan dan tumpang tindih dapat dihindari
  - Penyusunan blueprint PPM yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah dan persiapan pascatambang.



- **Pada level mekanisme dan akses:**
  - Reformasi mekanisme pengajuan bantuan agar mencakup mekanisme yang dapat diakses oleh kelompok rentan tanpa kapasitas administratif tinggi
  - Penyediaan pendampingan bagi masyarakat dalam penyusunan proposal dan pelaporan pertanggungjawaban, baik melalui perusahaan maupun pemerintah desa
  - Sosialisasi terbuka mengenai jenis program PPM, kriteria penerima, dan jalur pengaduan kepada seluruh warga desa lingkar tambang
  - Penguatan fungsi humas perusahaan di tingkat desa, termasuk kehadiran fisik yang konsisten dan mekanisme dialog rutin dengan masyarakat



- **Pada level substansi program:**
  - Pergeseran orientasi PPM dari bantuan konsumtif ke program pemberdayaan yang membangun kapasitas produktif jangka panjang
  - Pengembangan program diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal seperti perikanan, perkebunan, dan UMKM yang dapat berfungsi sebagai jangkar ekonomi pascatambang
  - Pelibatan bermakna masyarakat dalam program lingkungan dengan transfer kapasitas pengelolaan ke kelembagaan lokal
  - Investasi dalam pendidikan dan keterampilan generasi muda agar memiliki pilihan penghidupan di luar sektor tambang



- **Pada level transparansi dan akuntabilitas:**
  - Publikasi rutin realisasi PPM per program, per desa, dan per kelompok sasaran agar dapat diawasi oleh masyarakat dan pemerintah daerah
  - Pembentukan mekanisme pengaduan yang independen dari struktur desa untuk mengatasi keterbatasan jalur formal yang ada saat ini
  - Audit independen terhadap pelaksanaan PPM secara berkala dengan publikasi hasil yang dapat diakses publik
  - Penguatan kapasitas perangkat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program agar kelembagaan desa dapat menjadi penghubung yang berfungsi antara masyarakat dan perusahaan

RQ 4: Apa tingkat pemahaman dan kesiapan masyarakat serta pemerintah daerah terhadap fase pasca tambang, termasuk aspirasi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam merumuskan kebijakan pasca tambang yang adil?

Temuan di Desa Kobe dan Sawai Itepo tentang pascatambang memperlihatkan dua kondisi yang berjalan beriringan dan saling menopang. Sebagian masyarakat belum memiliki kesadaran yang memadai tentang risiko nyata pascatambang, sementara kondisi struktural yang menentukan tingkat kerentanan pascatambang terus memburuk tanpa ada intervensi yang sistematis. Kombinasi kedua kondisi ini menciptakan fenomena silent lock-in, yaitu proses penguncian kerentanan yang berlangsung tanpa banyak disadari oleh mereka yang paling akan terdampak.

1) Variasi Persepsi dan Distorsi Imajinasi Masa Depan

Ketika ditanya tentang apa yang mungkin terjadi ketika tambang berhenti, masyarakat di Kobe dan Sawai Itepo memberikan respons yang sangat bervariasi. Variasi ini mencerminkan perbedaan mendasar dalam posisi ekonomi, akses informasi, dan keterikatan terhadap struktur ekonomi tambang. Setidaknya tiga kelompok persepsi dapat diidentifikasi dari temuan lapangan.

Kelompok pertama, yang sebagian besar terdiri dari pekerja tambang, pemilik kos-kosan, pedagang, dan kontraktor, memandang pascatambang sebagai potensi keruntuhan ekonomi yang menyeluruh meskipun kesadaran tentang risiko tidak selalu diterjemahkan menjadi tindakan persiapan yang konkret. **Kelompok kedua** adalah nelayan dan sebagian petani yang tidak sepenuhnya terintegrasi ke dalam ekonomi tambang. Bagi mereka, pascatambang justru menghadirkan bayangan pemulihan yang positif seperti pencemaran laut akan berkurang dan tangkapan ikan yang akan kembali melimpah. **Kelompok ketiga** memandang pascatambang sebagai sesuatu yang tidak akan terlalu mempengaruhi mereka secara pribadi, karena menganggap dampak utamanya hanya akan dirasakan oleh pekerja tambang dan kontraktor. Pandangan ini memperlihatkan bahwa mereka yang tidak tergantung langsung pada tambang kemungkinan menghadapi shock yang lebih kecil.

Variasi persepsi yang teridentifikasi di atas adalah refleksi dari perbedaan posisi ekonomi masing-masing kelompok sekaligus juga hasil dari informasi yang sangat terbatas. Empat mekanisme bekerja secara bersamaan membatasi bayangan masa depan masyarakat Desa Kobe dan Sawai Itepo terhadap pascatambang. **Mekanisme pertama** adalah absennya informasi struktural tentang rencana penutupan tambang. Tidak ada sosialisasi dari perusahaan tentang rencana reklamasi, batas waktu operasi, atau kondisi yang akan terjadi setelah penutupan akan mempengaruhi cara pandang bagaimana alihfungsi seharusnya dilakukan (Kivinen et al, 2018).

Perangkat desa yang mengetahui sebagian informasi ini juga dianggap tidak meneruskannya kepada warga secara sistematis. **Kedua,** masyarakat mengalami sebuah psikologi kognitif disebut sebagai *normalcy bias*—kecenderungan untuk mengasumsikan bahwa masa depan akan menyerupai masa kini, terutama ketika kondisi saat ini terasa lebih baik dari sebelumnya (Omer & Alon, 1994; Yahara et al, 2021; Sutrisno et al, 2024) sehingga sulit bagi sebagian besar orang untuk membayangkan pembalikan kondisi yang drastis.

Mekanisme ketiga adalah *scarcity mindset* yang dipicu oleh tekanan ekonomi harian yang sudah meningkat (Hamilton et al, 2018; Hunter et al, 2014). Kenaikan biaya hidup yang konsisten menghabiskan kapasitas kognitif dan finansial rumah tangga yang menyisakan sangat sedikit ruang untuk perencanaan jangka panjang. **Mekanisme keempat** adalah ketidakcukupan referensi pengalaman lokal. Kasus Pulau Gebe adalah satu-satunya referensi konkret yang dimiliki sebagian warga tentang pascatambang. Namun jika Gebe adalah pengalaman orang lain yang diketahui dari cerita, **referensi yang tidak terhubung langsung dengan konteks Desa Kobe dan Sawai Itepo menjadi kurang memadai untuk mengubah orientasi perilaku** dan prioritas ekonomi sehari-hari.

2) Dua Mekanisme *Lock-In* yang Saling Memperkuat

Di balik variasi persepsi yang terlihat di permukaan, temuan lapangan mengungkap dua mekanisme struktural yang secara diam-diam mengunci masyarakat Kobe dan Sawai Itepo ke dalam posisi yang semakin rentan terhadap pascatambang. Kedua mekanisme ini berjalan secara bersamaan dan saling memperkuat satu sama lain.

Mekanisme pertama adalah ***lock-in* aset produktif yang terjadi melalui penjualan lahan secara masif.** Ketika tambang berhenti dan pendapatan dari sektor tambang dan turunannya menghilang, kelompok yang sudah menjual lahan tidak memiliki basis produktif untuk kembali ke model ekonomi tradisional sebagai petani atau pekebun.

Mekanisme kedua adalah ***lock-in* keterampilan yang terjadi melalui marginalisasi bertahap dari kapasitas ekonomi tradisional.** Selama bertahun-tahun tambang beroperasi, generasi muda yang seharusnya mewarisi keterampilan bertani, berkebun, dan melaut dari orang tua mereka justru memilih jalur pekerjaan di tambang atau sektor pendukungnya. Akibatnya, ketika tambang berhenti, bahkan jika lahan masih tersedia, kapasitas untuk mengolahnya secara produktif sudah melemah secara signifikan. Yang paling mengkhawatirkan adalah keterkaitan antara kedua mekanisme ini di mana **kelompok terdampak tidak memiliki jalan keluar yang mudah karena tidak ada lahan untuk digarap, tidak ada keterampilan untuk mengolah lahan yang ada,** dan tidak ada program pemberdayaan yang membangun kapasitas alternatif. Dalam kacamata *Social-Ecological Resilience Theory* (Marais et al, 2018; Herdiyanti et al., 2026), kondisi ini menggambarkan sistem yang kehilangan kapasitas adaptifnya secara gradual hingga mencapai ambang batas di mana *shock* sekecil apapun dapat mendorong sistem ke titik yang jauh lebih buruk dan sulit dipulihkan.

Kelompok yang paling diuntungkan dalam skenario pascatambang adalah mereka yang memiliki sesuatu yang bisa dipindahkan atau dipulihkan. Baik nelayan yang masih memiliki alat produksi dan akses ke laut, petani yang masih mempertahankan lahan produktif, rumah tangga yang mengkonversi hasil tambang menjadi aset jangka panjang, atau pendatang karena mereka memiliki opsi mobilitas dengan kembali ke kampung halaman atau berpindah ke lokasi industri lain. Sebaliknya, **kelompok yang paling menanggung beban adalah mereka yang terikat pada lokasi dan struktur ekonomi yang ada tanpa diversifikasi.** Rumah tangga yang sudah menjual lahan dan sangat bergantung pada pendapatan tambang, pekerja tambang yang belum membangun keterampilan non-tambang, serta perempuan dan rumah tangga rentan yang ekonominya bergantung pada daya beli pekerja tambang akan kehilangan basis pendapatan.

Ini artinya, **secara distributif, beban pascatambang yang ditanggung masih belum proporsional.** Hal ini mempertimbangkan bahwa kelompok yang paling menanggung beban selama tambang beroperasi, yaitu pihak yang tidak memiliki aset tettapi menanggung kenaikan biaya, sama-sama merupakan kelompok yang akan paling terdampak ketika tambang berhenti.

Perbedaan kerentanan ini adalah hasil dari beragam faktor termasuk pilihan individual, akses terhadap informasi, serta situasi yang sudah ada sejak sebelum tambang beroperasi dan diperparah selama masa operasi tambang. Jika kerentanan ini tidak diatasi, mereka yang tidak memiliki representasi dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan dampak tambang akan menanggung konsekuensi bagaimanapun bentuknya. Secara **pengakuan (*recognition*)**, identitas dan nilai penghidupan tradisional masyarakat Kobe dan Sawai Itepo belum nampak menjadi narasi yang dipertimbangkan dalam pembangunan daerah padat dengan industri tambang. Keterampilan bertani, berkebun, dan melaut dipandang sebagai aktivitas yang wajar ditinggalkan demi pekerjaan tambang yang lebih menguntungkan. Pada sisi lain, keberadaan penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak-anak dianggap memiliki aspirasi yang seragam tentang dinamika operasi tambang.

3) <u>Ketiadaan Persiapan Kolektif dan Fragmentasi Respons</u>

Warga Desa Kobe dan Sawai Itepo juga sebagian besar berbicara soal persiapan pascatambang dalam kerangka strategi individual, seperti menabung, membuka usaha sampingan, dan mengelola uang dengan lebih hati-hati. Sedangkan **persiapan kolektif yang terorganisir, seperti bagaimana desa akan menghadapi transisi dan perencanaan bersama tentang pengelolaan aset komunal pascatambang belum menjadi narasi utama.**

Ketiadaan persiapan kolektif ini semakin menjadi biasa karena minimnya ruang formal yang memfasilitasinya. Diskusi tentang pascatambang hanya berlangsung dalam obrolan informal antartokoh desa, tetapi tidak pernah dibawa ke forum resmi seperti musdes atau musdus. Pada sisi lain, perangkat desa yang menyadari risiko ini tidak memiliki kapasitas untuk menginisiasi perencanaan pascatambang secara formal. Pada tingkat lanjut, perusahaan maupun pemerintah belum membuka ruang terhadap diskusi tentang skenario penutupan atau persiapan transisi. Dalam kata lain, **terdapat celah prosedural akibat minimalnya pelibatan masyarakat dalam diskusi mengenai rencana pascatambang oleh perusahaan maupun pemerintah daerah.**

Absennya persiapan kolektif ini menciptakan situasi di mana respons terhadap pascatambang sepenuhnya terfragmentasi pada level rumah tangga. Setiap keluarga menghadapi risiko yang serupa tetapi menghadapinya sendiri-sendiri, tanpa koordinasi yang dapat membagi risiko secara kolektif. Sementara itu, pendatang menjadi satu-satunya kelompok dengan risiko relatif paling rendah terhadap pascatambang. Persiapan yang dilakukan secara mandiri pada dasarnya digambarkan oleh warga untuk menghindari situasi yang terjadi pada Pulau Gebe, yaitu kolaps ekonomi bertahap yang dimulai dari eksodus pendatang, diikuti oleh runtuhnya usaha-usaha yang bergantung pada daya beli pekerja tambang, kemudian pengangguran massal yang mendorong konflik sosial dan potensi kriminalitas.

Meski demikian, cara yang dilakukan oleh sebagian warga untuk menghadapi skenario tersebut berpaku pada 'penyelamatan diri sendiri'. Sehingga skenario ini justru **berpotensi menempatkan Desa Kobe dan Sawai Itepo dalam ambang kemiskinan yang lebih dalam. Terutama ketika menyisakan kelompok yang rentan untuk tinggal di dalam lingkungan di mana infrastruktur penghidupan tradisional sudah terlanjur rusak.**

4) Alasan Persiapan Kolektif Tidak Terbentuk

Ada tiga penjelasan yang saling terkait untuk ketiadaan persiapan kolektif ini. **Pertama,** fragmentasi sosial yang sudah berlangsung selama periode tambang beroperasi melemahkan fondasi untuk tindakan kolektif. Memudarnya gotong royong, meningkatnya individualisme ekonomi, dan tumbuhnya ketidakpercayaan terhadap perangkat desa menciptakan modal sosial yang lebih rendah dari yang dibutuhkan untuk mengorganisir respons kolektif terhadap tantangan jangka panjang (Sutrisno et al, 2024). **Kedua,** ketiadaan fasilitator yang dipercaya oleh semua pihak menjadi hambatan menyeluruh (Akbar et al, 2021). Perangkat desa tidak cukup dipercaya untuk menginisiasi diskusi pascatambang yang inklusif, perusahaan memiliki kepentingan untuk tidak terlalu menekankan skenario penutupan, serta pemerintah daerah yang belum hadir sebagai fasilitator yang aktif. **Ketiga,** program PPM yang seharusnya menjadi instrumen utama persiapan pascatambang belum menjalankan fungsi utamanya. Akibatnya, satu-satunya mekanisme formal yang seharusnya mempersiapkan masyarakat untuk pascatambang tidak mampu menjadi instrumen transisi yang dapat diandalkan.

Apabila persiapan kolektif tidak segera dimulai, konsekuensi terhadap pemulihan yang tidak merata mungkin terjadi. Situasi ini akan menimbulkan di mana sebagian kelompok berhasil beradaptasi tetapi sebagian besar terjebak dalam kemiskinan jangka panjang. Misalnya, ekosistem laut ataupun kebun dapat pulih sehingga petani dan nelayan bisa kembali bekerja, tetapi karena tidak adanya pasar yang menjangkau dan daya beli masyarakat, produktivitasnya menjadi tidak bernilai.

5) Aspirasi Masyarakat sebagai Titik Masuk Intervensi

Warga menyebutkan kebutuhan akan tunjangan atau jaminan pendapatan selama periode transisi, akses pembiayaan untuk usaha non-tambang, penguatan pasar desa sebagai platform ekonomi alternatif, penyediaan lahan pengganti bagi mereka yang sudah kehilangan akses lahan, dan pengembangan pariwisata berbasis lingkungan sebagai sektor alternatif jangka panjang. Aspirasi-aspirasi ini mencerminkan pemahaman intuitif masyarakat tentang jenis dukungan yang mereka butuhkan. **Bagian penting untuk dicatat adalah bahwa sebagian besar aspirasi menuntut keterlibatan pihak eksternal, baik pemerintah maupun perusahaan, sebagai prasyara**t (Hood et al., 2025). Masyarakat tidak membayangkan bahwa mereka bisa menghadapi pascatambang sepenuhnya melalui kapasitas mandiri. Hal ini karena dari perspektif dimensi restoratif, belum tersedia mekanisme untuk memulihkan kerugian yang sudah terjadi, terutama pada lahan yang sudah dijual. Sementara keterampilan tradisional membutuhkan investasi aktif, ekosistem membutuhkan rehabilitasi yang terencana, dan kapasitas ekonomi alternatif membutuhkan pemberdayaan jangka panjang. Sehingga upaya penanganan yang ada hanya bersifat sementara dan belum berorientasi pada pemulihan yang utuh.

Implikasi Respon yang Diperlukan

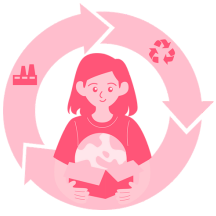
Berdasarkan temuan di atas, terlihat bahwa persoalan pada aspek pascatambang di Desa Kobe dan Sawai Itepo terdapat kesenjangan terkait koordinasi formal, kerangka persiapan pascatambang, hingga ketersediaan aset dan pemberdayaan. Oleh karena itu, peneliti bersama dengan masyarakat dan perangkat daerah melihat adanya beberapa respons yang mungkin dibutuhkan, berikut adalah poin-poinnya yang dibedakan berdasarkan urgensi :



- **Segera (sebelum tambang berhenti):**
  - Sosialisasi terbuka tentang rencana pascatambang oleh perusahaan kepada masyarakat dan pemerintah daerah, termasuk informasi tentang jadwal operasi, rencana reklamasi, dan kewajiban perusahaan pasca penutupan
  - Pembentukan forum tripartit antara perusahaan, pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat untuk merencanakan transisi secara kolektif
  - Reorientasi PPM ke program yang membangun kapasitas pascatambang: keterampilan non-tambang, diversifikasi ekonomi, dan penguatan usaha lokal.
  - Pendataan menyeluruh tentang kondisi aset produktif, keterampilan, dan kerentanan ekonomi rumah tangga sebagai basis perencanaan transisi



- **Jangka menengah (selama masa transisi):**
  - Pengembangan program penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah yang tidak bergantung pada tambang: perikanan, pertanian, pariwisata lingkungan, dan UMKM
  - Penyusunan kebijakan perlindungan lahan bagi kelompok yang belum menjual aset produktif mereka
  - Investasi dalam rehabilitasi ekosistem yang melibatkan masyarakat sebagai pengelola
  - Pembangunan dana jaminan transisi yang dapat diakses oleh rumah tangga terdampak selama periode peralihan



- **Jangka panjang (setelah tambang berhenti):**
  - Program reklamasi lahan yang transparan dan partisipatif, dengan prioritas pengembalian fungsi produktif lahan kepada masyarakat
  - Penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes dan koperasi sebagai penyangga ekonomi komunal pascatambang
  - Investasi dalam pendidikan dan keterampilan generasi muda yang memungkinkan mobilitas ekonomi di luar sektor tambang
  - Sistem monitoring dan evaluasi kondisi sosial-ekonomi pascatambang yang melibatkan masyarakat sebagai pengawas aktif

Penutup

Temuan dari keempat pertanyaan penelitian di Desa Kobe dan Sawai Itepo memperlihatkan bahwa permasalahan pada keadilan **distributif** menjadi benang merah yang paling konsisten. Manfaat ekonomi dari industri nikel terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki usia produktif, akses terhadap pekerjaan formal, modal usaha, atau lahan yang bernilai jual, sementara beban dalam bentuk pencemaran lingkungan, kenaikan biaya hidup, tekanan terhadap layanan dasar, dan hilangnya basis penghidupan tradisional didistribusikan secara luas kepada kelompok yang justru paling tidak terhubung dengan ekonomi tambang. Ketimpangan ini bahkan mungkin berlanjut dan memburuk dalam proyeksi pascatambang, di mana kelompok yang sudah menjual lahan dan kehilangan keterampilan tradisional akan menanggung guncangan paling berat tanpa cadangan aset maupun kapasitas pemulihan.

Pada dimensi keadilan **prosedural,** temuan memperlihatkan pola partisipasi yang bersifat formalistik namun belum bermakna. Musyawarah desa berjalan tetapi belum melibatkan seluruh elemen masyarakat, serta menunjukkan kapasitas yang terbatas untuk menuntaskan persoalan mendasar. Hal ini tercermin dengan usulan layanan dasar diajukan berulang tetapi realisasinya minim. Adapun faktor eksternal dari perusahaan di mana mekanisme PPM/CSR yang bergeser ke sistem proposal yang justru mempersempit akses kelompok tanpa kapasitas administratif. Pada sisi lain, diskusi tentang pascatambang juga tidak dilembagakan secara formal. Asimetri informasi menjadi akar bersama, dengan tantangan berlapis karena regulasi perizinan yang memusatkan kewenangan pengawasan di pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah maupun masyarakat menghadapi keterbatasan untuk memverifikasi dan mengawasi keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Pada dimensi keadilan **rekognisi,** kebutuhan dan identitas kelompok rentan seperti lansia, perempuan, penyandang disabilitas, nelayan, dan petani tradisional belum diakui secara sistematis dalam perencanaan layanan dasar, desain program PPM, maupun persiapan pascatambang. Ketiadaan pemetaan sosial membuat program diperlakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan keragaman kerentanan, sementara keterampilan dan pengetahuan ekologis lokal terlihat sebagai hal yang wajar ditinggalkan demi ekonomi tambang. Pada dimensi keadilan **restoratif**, belum terdapat mekanisme yang berjalan untuk memulihkan kerugian yang sudah terjadi maupun mempersiapkan pemulihan atas kerugian yang akan datang. Bantuan masih cenderung bersifat konsumtif dan reaktif alih-alih pemulihan dan transformatif, sehingga kapasitas pemulihan tidak terbangun di tingkat komunitas.

Secara keseluruhan, kelompok yang paling diuntungkan adalah mereka yang memiliki mobilitas dan diversifikasi aset seperti pendatang dengan opsi kembali ke daerah asal, rumah tangga yang berhasil mengonversi hasil tambang menjadi aset jangka panjang, serta kelompok dengan keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi. Sementara kelompok yang paling menanggung beban adalah mereka yang terikat pada lokasi dan struktur ekonomi tambang tanpa cadangan, seperti rumah tangga yang telah menjual lahan, generasi muda yang kehilangan akses lahan tanpa keterampilan alternatif, perempuan dan rumah tangga rentan, serta warga yang kehilangan sumber penghidupan tradisional. **Tabel 9** berikut merangkum posisi masing-masing kelompok berdasarkan temuan lintas pertanyaan penelitian dilihat dari tingkat manfaat dan kerentanannya dalam menghadapi perubahan.

Tabel 9. Kelompok manfaat dan rentan berdasarkan kelompok di Desa Kobe dan Sawai Itepo

Kelompok	Kelompok manfaat vs. kerentanan			
	RQ1* Perubahan sosio-ekonomi tambang	RQ2* Perubahan layanan dasar	RQ3* Implementasi CSR/PPM	RQ4* Pascatambang
Nelayan	Paling rentan	Paling rentan	Stabil	Manfaat Rentan
Buruh nelayan	Paling rentan	Paling rentan	Stabil	Manfaat Rentan
Petani/pekebun (memiliki lahan)	Stabil	Paling rentan	Stabil	Stabil
Petani (tidak memiliki lahan)	Paling rentan	Paling rentan	Stabil	Paling rentan
Penebang pohon	Paling rentan	Paling rentan	Stabil	Paling rentan
Pemilik lahan dan modal usaha	Manfaat Utama	Manfaat Rentan	Stabil	Stabil
Warga tanpa lahan, modal, atau akses usaha baru	Paling rentan	Paling rentan	Paling rentan	Paling rentan
Pemilik kios, kontrakan, kos-kosan	Manfaat Utama	Manfaat Rentan	Stabil	Paling rentan
Pemilik umkm dan kontraktor (lokal)	Manfaat Utama	Manfaat Rentan	Stabil	Paling rentan

Kelompok	Kelompok manfaat vs. kerentanan			
	RQ1* Perubahan sosio-ekonomi tambang	RQ2* Perubahan layanan dasar	RQ3* Implementasi CSR/PPM	RQ4* Pascatambang
Pelaku UMKM dan kontraktor (pendatang)	Manfaat Utama	Manfaat Utama	Stabil	Manfaat Utama
Masyarakat yang kehilangan aset produktif (sagu, kebun, hutan)	Paling rentan	Paling rentan	Paling rentan	Paling rentan
Rumah tangga yang berhasil mengubah hasil penjualan lahan menjadi aset produktif jangka panjang	Manfaat Utama	Manfaat Rentan	Stabil	Manfaat Utama
Rumah tangga yang menjual lahan tetapi gagal mengelola hasilnya secara produktif	Paling rentan	Stabil	Manfaat Rentan	Paling rentan
Rumah tangga miskin	Paling rentan	Paling rentan	Manfaat Rentan	Paling rentan
Lansia (memiliki lahan)	Stabil	Paling rentan	Manfaat Rentan	Stabil
Lansia (tidak memiliki aset)	Paling rentan	Paling rentan	Manfaat Rentan	Paling rentan
Warga lokal yang terdampak lingkungan dan sosial tetapi tidak menikmati ekonomi tambang	Paling rentan	Paling rentan	Paling rentan	Paling rentan

Kelompok	Kelompok manfaat vs. kerentanan			
	RQ1* Perubahan sosio-ekonomi tambang	RQ2* Perubahan layanan dasar	RQ3* Implementasi CSR/PPM	RQ4* Pascatambang
Pekerja tambang (lokal)	Manfaat Rentan	Stabil	Stabil	Paling rentan
Pekerja tambang pendatang	Manfaat Utama	Stabil	Stabil	Stabil
Pekerja sektor penunjang tambang usia produktif	Manfaat Utama	Manfaat Utama	Stabil	Paling rentan
Generasi muda yang meninggalkan pendidikan atau sangat bergantung pada peluang kerja tambang	Manfaat Rentan	Manfaat Rentan	Stabil	Paling rentan
Pekerja non-tambang dengan pendapatan relatif stabil (guru, tenaga kesehatan)	Stabil	Paling rentan	Stabil	Stabil
Aparat desa	Stabil	Manfaat Rentan	Manfaat Utama	Stabil
Tokoh masyarakat	Manfaat Rentan	Manfaat Rentan	Manfaat Utama	Stabil
Pelajar dan Anak-anak	Paling rentan	Paling rentan	Manfaat Rentan	Paling rentan
Ibu hamil dan Ibu dengan balita	Manfaat Rentan	Manfaat Rentan	Stabil	Paling rentan

Kelompok	Kelompok manfaat vs. kerentanan			
	RQ1* Perubahan sosio-ekonomi tambang	RQ2* Perubahan layanan dasar	RQ3* Implementasi CSR/PPM	RQ4* Pascatambang
Penyedia layanan alternatif (mobil pengantar, air, obat)	Manfaat Utama	Manfaat Utama	Stabil	Paling rentan
Pegawai Negeri Sipil	Manfaat Rentan	Manfaat Utama	Stabil	Stabil
Kelompok dengan keterampilan tinggi	Manfaat Utama	Stabil	Stabil	Manfaat Utama
Pelaku usaha dengan lebih dari satu lini	Manfaat Utama	Manfaat Utama	Stabil	Manfaat Utama

Definisi	
Penerima manfaat utama **(Manfaat Utama)**	Kelompok yang memperoleh **manfaat sosial-ekonomi tinggi** dari aktivitas industri namun **risiko rendah** dalam menghadapi perubahan karena **kapasitas dan sumberdaya yang tinggi.**
Relatif stabil **(Stabil)**	Kelompok yang memperoleh **manfaat sosial-ekonomi relatif terbatas** dari aktivitas industri, namun memiliki **risiko yang rendah** dalam menghadapi perubahan karena **sumber penghidupannya tidak bergantung secara langsung** pada aktivitas industri.
Penerima Manfaat yang Rentan **(Manfaat Rentan)**	Kelompok yang memperoleh **manfaat sosial-ekonomi yang tinggi** dari aktivitas industri, namun memiliki **risiko yang tinggi** dalam menghadapi perubahan karena **tingkat ketergantungan tinggi** terhadap aktivitas industri.
Kelompok paling rentan **(Paling Rentan)**	Kelompok yang memperoleh **manfaat sosial-ekonomi yang terbatas atau dirugikan** dari aktivitas industri, sekaligus memiliki **risiko yang tinggi** dalam menghadapi perubahan karena **kapasitas dan sumber daya yang rendah.**

Refleksi lintas dimensi ini menegaskan bahwa penguatan keadilan di tingkat desa tidak dapat dicapai oleh satu aktor secara terpisah, melainkan memerlukan koordinasi lintas aktor yang selama ini belum terbangun. Pemerintah desa membutuhkan penguatan kapasitas perencanaan dan tata kelola agar dapat menjadi penghubung yang dipercaya, pemerintah daerah perlu hadir sebagai fasilitator dan koordinator meski dengan kewenangan yang terbatas terhadap perusahaan, perusahaan perlu dituntut membuka informasi dan mengarahkan PPM pada pemberdayaan yang substantif, serta pemerintah pusat perlu membuka ruang bagi pengawasan di tingkat daerah. Tanpa kolaborasi yang menyatukan peran-peran ini, masalah pada dimensi keadilan yang teridentifikasi berpotensi terulang dan kerentanan terhadap pascatambang semakin mendalam.

Tabel 10 menjelaskan lebih detil peran masing-masing aktor dalam membentuk perubahan di kedua desa.

Aktor	Peran
PT IWIP, perusahaan tambang, dan perusahaan industri	• Mendorong arus migrasi dan peningkatan permintaan lokal melalui aktivitas industri dan kebutuhan tenaga kerja • Menjadi aktor yang sangat berpengaruh melalui bantuan CSR dan program PPM (menentukan model, prioritas, dan mekanisme PPM), tetapi beroperasi tanpa pemetaan sosial sebagai basis perencanaan dan tanpa mekanisme akuntabilitas yang efektif terhadap pemerintah daerah maupun masyarakat. • Aktor yang memiliki informasi tentang rencana operasi dan reklamasi pascatambang.
Pemerintah pusat	• Memegang kewenangan pengawasan terhadap kontrak karya mineral logam. • Memegang kewenangan pemberian izin usaha pertambangan
Pemerintah Daerah Provinsi	• Memiliki mandat untuk mengintegrasikan persiapan pascatambang ke dalam RPJMD dan program pembangunan daerah • Keterbatasan kewenangan terhadap perusahaan yang beroperasi di bawah skema pusat menjadi kendala struktural
Pemerintah Daerah Kabupaten	• Berperan melalui alokasi APBD sektoral dan program strategis seperti pendidikan gratis dan bantuan rumah layak huni. • Aktor yang paling kehilangan kewenangan dalam tata kelola PPM
Humas PT IWIP	• Idealnya menjadi penghubung formal antara masyarakat desa dengan perusahaan.

Aktor	Peran
Pemerintah Desa	• Menjadi penghubung utama antara masyarakat, pemerintah daerah, dan perusahaan • Sebagai pengelola langsung dana desa dan pelaksana musyawarah perencanaan. • Berada di posisi yang paling dekat dengan masyarakat
Tenaga layanan dasar (bidan, guru)	• Berada di garis depan yang menanggung beban paling langsung dari kesenjangan antara kebutuhan yang meningkat (termasuk harus menanggung kelebihan beban menggunakan dana pribadi atau dana operasional). • Pihak yang secara langsung menentukan hajat hidup masyarakat
Masyarakat lokal	• Pihak yang menanggung dinamika sosial-ekonomi akibat industri tambang. Sebagian menjadi penerima manfaat dalam dinamika tersebut
Pendatang	• Meningkatkan jumlah penduduk dan permintaan terhadap hunian, pangan, transportasi, serta jasa lainnya sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan tekanan terhadap harga • Sebagai kelompok yang memiliki opsi mobilitas lebih besar dan menjadi pihak yang paling siap menghadapi pascatambang.
Tokoh adat dan tokoh agama	• Menjaga kohesi sosial, menyampaikan aspirasi masyarakat, mengamati perubahan sosial yang terjadi, serta menjadi sumber legitimasi dan pengaruh dalam komunitas
Lansia dan Penyandang Disabilitas	• Menjadi kelompok yang memiliki keterbatasan untuk beradaptasi dengan peluang kerja baru di sektor tambang dan tetap bergantung pada penghidupan tradisional yang semakin tertekan • Menjadi pihak yang paling merasakan dampak ketika semua mekanisme formal gagal bekerja. • Kelompok yang tidak memiliki representasi formal atau koneksi informal. • Mereka tidak memiliki akses terhadap informasi program, belum dilibatkan dalam perencanaan, dan tidak mendapatkan manfaat yang setara dengan kelompok yang memiliki akses ke saluran formal maupun informal.

Aktor	Peran
Pemilik lahan dan masyarakat yang memiliki modal	• Menjadi kelompok yang relatif lebih mampu memanfaatkan peluang ekonomi melalui penjualan lahan, pembangunan kos-kosan, kontrakan, kios, dan usaha perdagangan lainnya • Berpotensi menjadi pihak pemberi kerja dan membuka peluang diversifikasi ekonomi
Nelayan	• Mengalami dampak perubahan kondisi lingkungan pesisir dan laut melalui penurunan hasil tangkapan
Petani dan pekebun	• Mengalami penyusutan aset produktif akibat penjualan atau pembebasan lahan serta menghadapi penurunan hasil produksi
Pemuda	• Menjadi kelompok yang paling banyak terserap ke dalam industri tambang dan sektor penunjangnya. • Kelompok yang paling dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan pendidikan, serta menentukan kualitas sumber daya di generasi mendatang

Daftar Pustaka

Agung Dwi Sutrisno, Lee, C.-H., Sapta Suhardono, & Koko, W. (2024). Evaluating Factors Influencing Community Readiness for Post-mining Environmental Development Strategies. *Journal of Environmental Management*, 366, 121823–121823. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.121823

Akbar, D., Rolfe, J., Lechner, A. M., Everingham, J.-A., & Kinnear, S. (2021). Workshop processes to generate stakeholder consensus about post-mining land uses: An Australian case study. *Journal of Environmental Planning and Management*, 64(2), 334–358. https://doi.org/10.1080/09640568.2020.1764341

Alauddin, R. (2012, September 4). *Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pelaku Usaha Pertambangan Emas Dan Nikel Di Provinsi Maluku Utara.* Brawijaya Knowledge Garden. ub.ac.id. https://repository.ub.ac.id/id/eprint/160866/

Ali, S., Clifford, M., & Matsubae, K. (2017, July 27). *Mining and Socio-Ecological Resilience in Mineral-Rich Small States: An Integrative Approach to Phosphate Mining on Nauru*. Papers.Ssrn.Com. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3009738

Antonius Ufi, J., Abidin Rengifurwarin, Z., & Madubun, J. (2020). Collaboration and Its Distortion in Managing Migas' CSR Programs: A Case Study on the CSEL's Community Empowerment Program in the Salas Village, Bula Sub-District, Eastern Part Seram Regency, Maluku Province, Indonesia. *International Journal of Science and Society (IJSOC)*, 2(3).

Auty, R. (2002). *Sustaining Development in Mineral Economies*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203422595

Baker, S., Ayala-Orozco, B., & García-Frapolli, E. (2020). Hybrid, Public and Private Environmental Governance: The Case of Sustainable Coastal Zone Management in Quintana Roo, Mexico. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 27(7), 625 -637. https://doi.org/10.1080/13504509.2020.1722764

Bebbington, A. J., Humphreys Bebbington, D., Sauls, L. A., Rogan, J., Agrawal, S., Gamboa, C., Imhof, A., Johnson, K., Rosa, H., Royo, A., Toumbourou, T., & Verdum, R. (2018). Resource Extraction and Infrastructure Threaten Forest Cover and Community Rights. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(52), 13164–13173. https://doi.org/10.1073/pnas.1812505115

Cheshire, L., Everingham, J.-A., & Lawrence, G. (2014). Governing the Impacts of Mining and the Impacts of Mining Governance: Challenges for Rural and Regional Local Governments in Australia. *Journal of Rural Studies*, 36, 330–339. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2013.10.010

Dasgupta, A., & Beard, V. A. (2007). Community Driven Development, Collective Action and Elite Capture in Indonesia. *Development and Change*, 38(2), 229–249. https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2007.00410.x

Deacon, L., & Lamanes, T. (2015). Resiliency and Resource-based Communities: A Canadian Case Study. *WIT Transactions on Ecology and the Environment*, 193, 713–724. https://doi.org/10.2495/SDP150601

Grabher, G. (1993). The Weakness of Strong Ties the Lock-In of Regional Development in Ruhr Area. In *The Embedded Firm: On the Socioeconomics of Industrial Networks*. Routledge. https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3339875

Ham, U. (2025). The Implementation of the Social Licence to Operate (SLO) Concept in Nickel Mining Governance in Kolaka Regency. *PCD Journal*, 13(1), 153–192. https://doi.org/10.22146/pcd.v13i1.16659

Hamilton, R. W., Mittal, C., Shah, A., Thompson, D. V., & Griskevicius, V. (2018). How Financial Constraints Influence Consumer Behavior: An Integrative Framework. *Journal of Consumer Psychology*, 29(2), 285–305. https://doi.org/10.1002/jcpy.1074

Herdiyanti, H., Suyanto, B., & Mas'udah, S. (2026). Social capital and ecological transformation in post-mining land restoration in Indonesia. *Ambio*, 55(2), 433–449. https://doi.org/10.1007/s13280-025-02223-8

Hunter, B., Howlett, M., & Gray, M. (2014). *The economic impact of the mining boom on Indigenous and non-Indigenous Australians*. CAEPR. https://cipr.cass.anu.edu.au/research/publications/economic-impact-mining-boom indigenous-and-non-indigenous-australians

Lochner , M., Fiona Haslam, M., Leith, D., Etienne, N., Deidre van, R., & Jan, C. (2018). The changing nature of mining towns: Reflections from Australia, Canada and South Africa. *Land Use Policy*, 76(C), 779–788. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.03.006

Kao, T.-Y., Chen, J. C. H., Wu, J.-T. B., & Yang, M.-H. (2014). Poverty Reduction Through Empowerment for Sustainable Development: A Proactive Strategy of Corporate Social Responsibility. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 23(3), 140–149. https://doi.org/10.1002/csr.1365

Kementerian Kesehatan RI. (2025). SATUSEHAT: Perencanaan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan. Dreams Kemkes. https://dreams.kemkes.go.id/user/kekosongan_dev/PUSTU

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). Data Sekolah - Pauddikdasmen. Kemendikdasmen.Go.Id. https://dapo.kemendikdasmen.go.id/sp/3/270210

Kim, K. (2021). Analysing Indonesia's Infrastructure Deficits from a Developmentalist Perspective. *Competition & Change*, 27(1), 102452942110433. https://doi.org/10.1177/10245294211043355

Lestari, T., & Inayah, B. (2023). *Pedoman Mendorong Transisi Berkeadilan Di Indonesia*. Climate Strategies https://climatestrategies.org/wp-content/uploads/2023/02/Pedoman Mendorong-Transisi-Berkeadilan-di-Indonesia.pdf

Malik, A. (2017). *Rethinking the Rentier Curse*. Revue Internationale De Politique De Développement, 7(7).

Maren Songe Eriksen, & Maria Tønnessen Frivold. (2023). Barriers to regional industrial development: An analysis of two specialised industrial regions in Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift - *Norwegian Journal of Geography*, 77(1), 21–34. https://doi.org/10.1080/00291951.2023.2192225

Martin, R., & Sunley, P. (2006). Path Dependence and Regional Economic Evolution. Journal of *Economic Geography*, 6(4), 395–437.

Mononen, T., Sihvonen, J., Sairinen, R., & Tiainen, H. (2023). Local Governance of the Mining Industry—five Finnish Examples. *Resources Policy*, 82, 103478. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103478

Murillo, D., & Sardon, S. (2024). Commodity Booms, Local State Capacity, and Development. arXiv.Org. https://arxiv.org/abs/2411.09586

Omer, H., & Alon, N. (1994). The continuity principle: A unified approach to disaster and trauma. American Journal of Community Psychology, 22(2), 273–287. https://doi.org/10.1007/bf02506866

Prabowo, D. (2017, May 8). Demi Pemerataan, Sejumlah Infrastruktur Dibangun Di Maluku Utara. KOMPAS.Com; Kompas.com. https://properti.kompas.com/read/2017/05/08/110820521/demi.pemerataan.sejumlah.infrastrktur.dibangun.di.maluku.utara?

Riduan Siahaan, J., Pagalung, G., Bahsar Demmallino, E., Saleng, A., Amran Sulaiman, A., & Nagu, N. (2025). Reframing Sustainability in Post-Mining Landscapes: A Foundational Framework for Institutional and Behavioral Integration in Indonesia. Sustainability, 17(12). https://doi.org/10.3390/su17125278

Resnawaty Risna, & Rivani. (2017). Empowered Community vs Dependent Community: Corporate Social Responsibility (CSR) Implications by Mining Companies in South Sumatra Province. Mediterranean Journal of Social Sciences, 8(5–1), 69–78. https://doi.org/10.2478/mjss-2018-0098

Ross, M. L. (2013). The Politics of the Resource Curse: A Review. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2342668

Schlosberg, D. (2007). *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford University Press. https://academic.oup.com/book/4798

Sovacool, B. K. (2021). Who Are the Victims of Low-carbon Transitions? Towards a Political Ecology of Climate Change Mitigation. *Energy Research & Social Science*, 73, 101916. https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.101916

Sutrisno, A. D., Chen, Y.-J., Suryawan, I. W. K., & Lee, C.-H. (2023). Building a Community's Adaptive Capacity for Post-Mining Plans Based on Important Performance Analysis: Case Study from Indonesia. *Land*, 12(7), 1285. https://doi.org/10.3390/land12071285

Sutrisno, A. D., Lee, C.-H., Suhardono, S., & Suryawan, I. W. K. (2024). Evaluating factors influencing community readiness for post-mining environmental development strategies. *Journal of Environmental Management,* 366, 121823. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.121823

Hood , A., Neddenriep, K., Crossley, C., Bungartz, L., & Dillon, T. (2025). *Planning the end from the beginning: Embedding stakeholder engagement in post-mining land use decisions.* Mine Closure 2025: 18Th International Conference on Mine Closure, 2025. Luleå; Australian Centre for Geomechanics. https://papers.acg.uwa.edu.au/p/2515_40_hood/

van der, P., & Sethulego Matebesi. (2021). *'The Mines Must Fix the Potholes': A Desperate Community*. https://doi.org/10.3366/edinburgh/9781474487054.003.0015

Wang, Z., Liu, C., & Tian, Y. (2025). The Effect of Urban–Rural Public Service Gaps on Consumption Gaps Under the Perspective of Sustainable Development: Evidence from China. *Sustainability*, 17(13), 6148–6148. https://doi.org/10.3390/su17136148

Warren, C., & Visser, L. (2016). The Local Turn: An Introductory Essay Revisiting Leadership, Elite Capture and Good Governance in Indonesian Conservation and Development Programs. *Human Ecology*, 44, 277. https://doi.org/10.1007/s10745-016-9831-z

Wolters, S., & Zeyen, A. (2014). *CSR in the Extractive Industries and Its Effect on Communities in Developing Countries: A Synthesis.* https://pure.royalholloway.ac.uk/ws/portalfiles/portal/24308949/Wolters_Zeyen_2014_CSR_in_the_Extractive_Industries_CRRC_Conference_Paper.pdf

Woolcock, M. (2010). Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework. *Theory and Society*, 27(2), 151–208. https://doi.org/10.1023/a:1006884930135

Yahara, T., Tanaka, W., Inoue, Y., Lee, J., Qian, K., Javadi, F., Onda, N., Yokota, F., Eguchi, K., Nishikitani, M., Kikuchi, K., Kawasaki, N., Jeong, Y., Ide, J., Ota, T., Fujiwara, T., Hosoya, T., Kano, Y., Sugimoto, M., … Murakami, T. (2021). Decision Science for Future Earth: A Conceptual Framework. *Decision Science for Future Earth*, 3–64. https://doi.org/10.1007/978-981-15-8632-3_1